



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Dokumen perencanaan pembangunan dimaksud yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Selain itu sesuai dengan amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan RKPD.

Pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun keempat periode RPJMD Tahun 2016 – 2021 yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah dimana berisikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

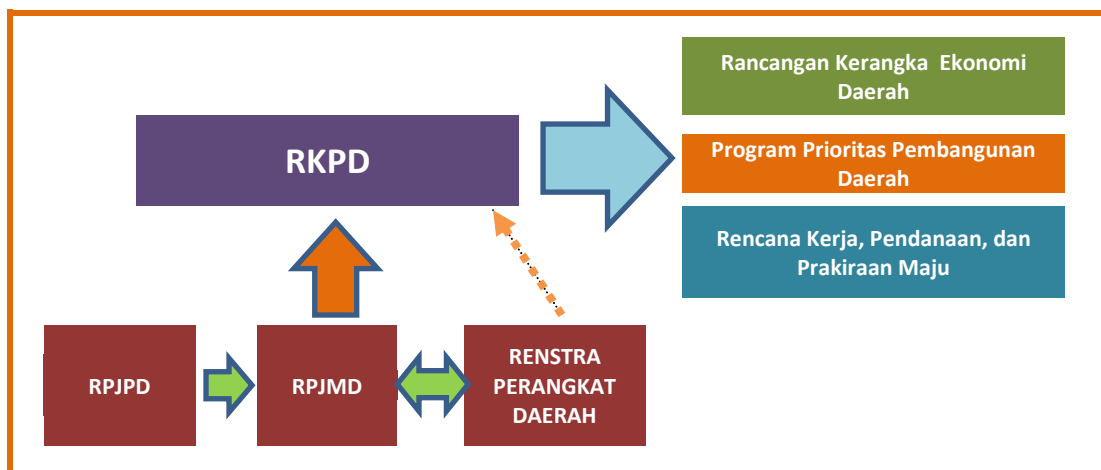
Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan upaya kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 juga memuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang merupakan representasi dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 dan RPJMD Tahun 2016 - 2021. Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 memuat program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan

tahun 2019, hasil penelaahan hasil reses DPRD, hasil Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2019.

RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2019 sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Penjabaran RKPD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Penjabaran Dokumen RKPD Tahun 2019



Penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan secara khusus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, yang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir

RKPD, pembahasan rancangan akhir oleh seluruh Perangkat Daerah, fasilitasi Ranperbup RKPD oleh Gubernur dan penetapan RKPD. Seperti gambar 1.2 :

Gambar 1.2
Proses Penyusunan RKPD



Proses penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 diawali dengan tahap persiapan penyusunan RKPD, yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD Tahun 2019, orientasi mengenai penyusunan RKPD, penyusunan agenda kerja penyusunan RKPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD, kegiatan yang dilaksanakan mencakup :

- Analisis gambaran umum kondisi daerah
- Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah
- Analisis kapasitas riil keuangan daerah
- Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah
- Perumusan permasalahan pembangunan daerah
- Penelaahan terhadap sasaran RPJMD
- Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD
- Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada rkp dan program strategis nasional
- Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
- Perumusan prioritas pembangunan daerah, dan;
- Perumusan rencana kerja program dan pendanaan

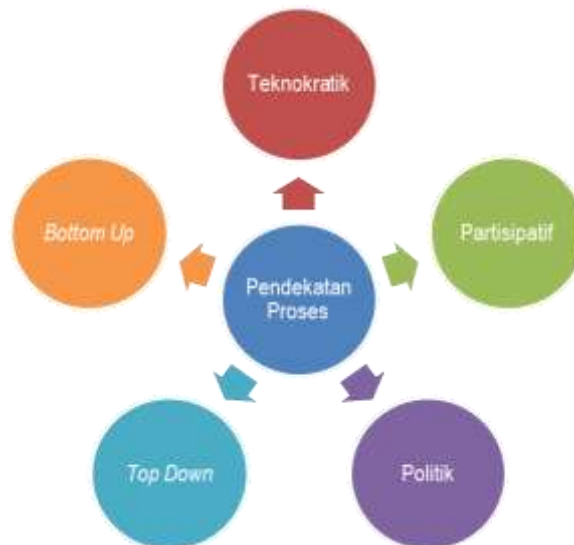
Tahap berikutnya adalah penyusunan rancangan RKPD, yang pada dasarnya adalah penyempurnaan dari dokumen rancangan awal RKPD berdasarkan saran dan masukan para *stakeholder* pembangunan melalui Forum Konsultasi Publik, serta berdasarkan rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang secara simultan juga disempurnakan sejalan dengan proses penyusunan rancangan RKPD. Rancangan RKPD ini selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RKPD untuk disempurnakan menjadi rancangan akhir RKPD selanjutnya dilakukan pembahasan rancangan akhir oleh seluruh Perangkat Daerah, fasilitasi

Ranperbup RKPD oleh Gubernur setelah itu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.

Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD yaitu **teknokratik, partisipatif, politis, top down dan bottom up** sedangkan untuk substansi menggunakan pendekatan **tematik, holistik, integratif dan spasial** sebagaimana digunakan dalam penyusunan RKP tahun 2019.

a. Pendekatan Proses

Gambar 1.3
Pendekatan Proses penyusunan RKPD Tahun 2019



Pendekatan **teknokratik** dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Pendekatan **partisipatif** dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2019.

Pendekatan **politik** dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 dilakukan dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan.

Pendekatan **top down** dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 dan RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 – 2025.

Pendekatan **bottom up** dilakukan dengan memperhatikan usulan dari nagari dan kecamatan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang Nagari dan Kecamatan dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Gambar 1.4
Pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan



Selain melalui musrenbang nagari dan kecamatan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menjaring aspirasi masyarakat juga melakukan inovasi berupa **Jaring Asmara Kenari** (menjaring aspirasi masyarakat ke nagari) bertatap muka dengan masyarakat untuk menampung aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Disamping itu Bupati juga menyampaikan informasi tentang pelaksanaan pembangunan daerah.

Gambar 1.5
Bupati dan Perangkat Daerah terkait mendengar aspirasi masyarakat di Nagari
(Berkantor dan bermalam di Nagari)



Jaring asmara kenari adalah inovasi yang dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat langsung ke nagari



Dalam pelaksanaan Jaring Asmara Kenari Bupati didampingi oleh Perangkat Daerah terkait secara bergiliran berkantor dan bermalam di nagari

b. Pendekatan Substansi

RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 juga menggunakan pendekatan substansi **Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial**, sebagaimana yang digunakan dalam penyusunan RKP 2019.

Gambar 1.6
Pendekatan Substansi Penyusunan RKPD Tahun 2019

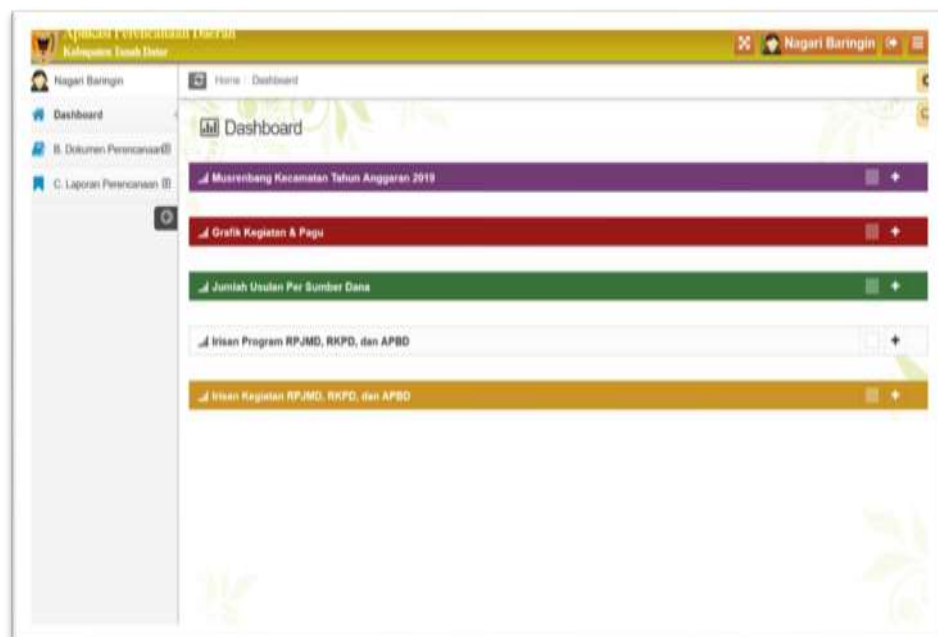


Pendekatan **tematik** adalah tema –tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu, pendekatan **holistik** penjabaran tematik dari tema pembangunan kedalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan, pendekatan **integratif** adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program pemerintah daerah dilihat dari peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan dan pendekatan **spasial** adalah kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu sama lain antara wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Untuk memudahkan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah dan memperkuat pendekatan perencanaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerapkan sistem informasi (*e-planning* dan *e-budgeting*). Sistem ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah. Disamping itu, penerapan sistem *e-planning* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah benar-benar dihasilkan melalui proses perencanaan yang transparan mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten serta melalui penjangkaran aspirasi masyarakat pada saat anggota DPRD melakukan kegiatan reses di nagari dan kecamatan.

Gambar 1.7

Tampilan awal dan menu *e-plan* Pemerintah Kabupaten Tanah Datar



Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKPD merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan

sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* pembangunan (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, RKPD Tahun 2019 adalah pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019, serta menjadi bahan dalam proses penyusunan APBD yang dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu :

- a. Secara Substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- b. Secara Normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Secara Operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
- d. Secara Faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan yang tercantum pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai – nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” dimana visi tersebut dirumuskan untuk menjawab permasalahan yang terjadi di daerah. Sebagai upaya mewujudkan Visi Kabupaten Tanah Datar, RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 disusun dengan mengangkat tema :



“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah serta kualitas SDM dalam tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

Adapun beberapa inovasi program yang dicanangkan oleh Bupati Tanah Datar untuk mendukung tema tersebut, antara lain:

1. *Tahfizh Alqur'an* Gerakan untuk menjadikan Kabupaten Tanah Datar menjadi daerah yang masyarakatnya hafizh Alqur'an
(Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pandai Baca Tulis Alqur'an)
2. *Subuh Berjama'ah* Kegiatan yang dilakukan secara bergiliran melaksanakan sholat subuh berjama'ah di masjid
3. *Maghrib Mengaji* Gerakan setiap ba'da maghrib masyarakat dianjurkan untuk membaca ayat suci Alqur'an
4. *Gapura Mantap* Gerakan Pugar Rumah Masyarakat Tidak Mampu
5. *Gerbang Cerdas* Gerakan Pembangunan Masyarakat Cerdas
(Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan)
6. *Gerobak baca* Gerakan untuk menumbuhkan minat baca masyarakat ditempat keramaian.
7. *Geliat* Gerakan Peduli Sehat untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat
8. *OASE Sahabat Hati* Satu Hari Banyak Tempat, Harapan Terpenuhi dalam pelayanan kependudukan
9. *Teknologi Padi Salibu* Satu Kali Tanam Tiga Kali Panen
10. *siPINTAR* Sistem Informasi Pelayanan Izin dan Non Izin Terpadu Tanah Datar
11. *Teman Candu* Sistem Pelayanan Calon Penganten Terpadu
12. *Gesit* Gerakan Sadar Tertib Arsip
13. *Wakaf Buku* Buku Membawaku ke Surga

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Dan RKPD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun



- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 16).
 11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 50); dan
 12. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

1.3. Hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2019 merupakan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu (*e-planning* dan *e-budgeting*) sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD Tahun 2019 terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya yang meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra Perangkat Daerah dan (4) Renja Perangkat Daerah. Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, dimana dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Selain itu penyusunan RKPD Tahun 2019 juga memperhatikan dokumen perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 – 2031.

RKPD Tahun 2019 akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019.

Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 juga mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015 - 2019 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

1.3.1. Hubungan RKPD Tahun 2019 dengan RKP Tahun 2019.

Dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 secara substansi mengacu pada prioritas RKP Tahun 2019 dan program strategis nasional terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Keterkaitan RKPD Tahun 2019 dan RKP Tahun 2019 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional Nawa Cita yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 terutama dalam perwujudan :

- 1) Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara;
- 2) Cita 2: Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- 3) Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
- 4) Cita 4: Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 5) Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- 6) Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- 7) Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8) Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
- 9) Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Selain mengacu pada RKP Tahun 2019, penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 juga memperhatikan arah kebijakan

kementerian/lembaga yang tercantum dalam Renstra Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran RPJMN Tahun 2015-2019. Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.3.2. Hubungan RKPD dengan RKPD Provinsi

Wilayah Kabupaten Tanah Datar yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, sangat perlu untuk memperhatikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Keterkaitan RKPD Tahun 2019 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam prioritas pembangunan Tahun 2019 yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga RPJMD 2016 - 2021 yang memuat Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021 : **"Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"** dengan **5 (lima)** misi pembangunan Sumatera Barat 2016 - 2021 adalah:

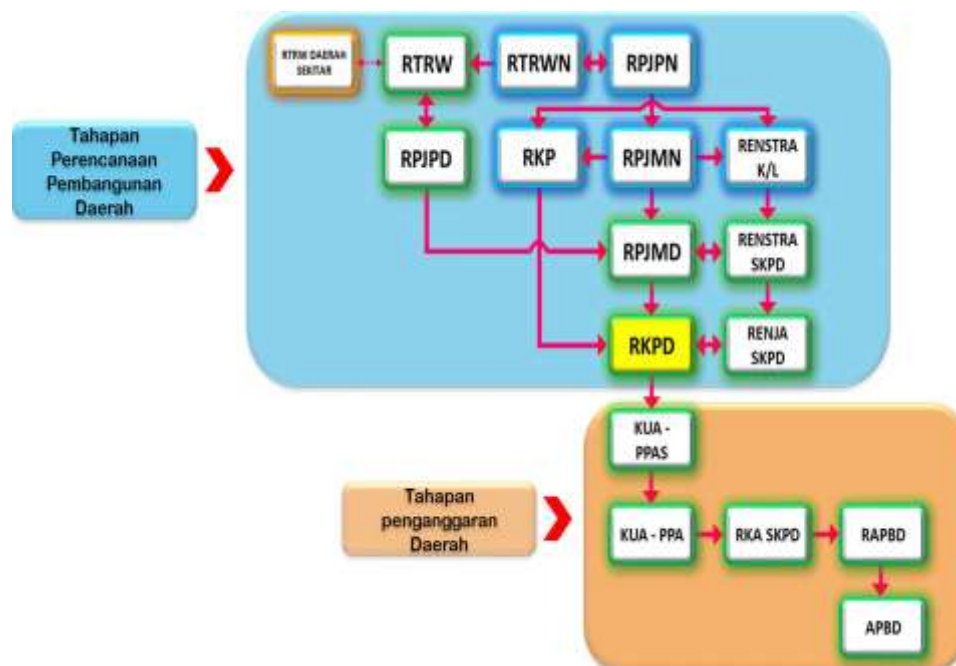
1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan adanya keterkaitan antara kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi Sumatera Barat maka dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat dengan mengacu berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar 1.8 :

Gambar 1.8
Hubungan antar dokumen terhadap RKPD Tahun 2019



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2019 untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik sektoral, wilayah serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi dan kabupaten sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 adalah:

1. Menjadi acuan perencanaan program dan kegiatan bagi seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;



2. Sebagai landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahun 2019 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Dan RKPD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD, dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan Pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah kebijakan Ekonomi Nasional

3.2. Kebijakan Perekonomian Sumatera Barat

3.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Tanah Datar

3.4. Arah kebijakan Ekonomi Daerah

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah

mendesak ditingkat daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2019
- 4.3. Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial
- 4.4. Inovasi Program Pembangunan Tahun 2019

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII Penutup



Halaman ini sengaja dibiarkan kosong



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Tanah Datar sering juga disebut sebagai Luhak Nan Tuo karena daerah ini adalah luhak yang mula-mula didirikan di Minangkabau dan terdiri atas tiga bagian, yaitu Limo Kaum Duo Baleh Koto, Sungai Tarab Salapan Batu dan Batipuah Sapuluah Koto. Sebagai Luhak Nan Tuo, di Kabupaten Tanah Datar terdapat peninggalan bersejarah antara lain Sawah Satampang Baniah, Lurah Nan Indak Barangin, Galundi Nan Baselo dan Kuburan Panjang Datuk Tantejo Gurhano yang dikenal sebagai arsitek rumah gadang. Dari Luhak Nan Tuo inilah penduduk Minangkabau menyebar ke Luhak Limapuluh Kota dan Luhak Agam.

Luhak Tanah Datar memiliki ungkapan yang khas, yaitu “buminyo lembang, aianyo tawa, ikannyo banyak” yang kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia secara harfiah adalah “daerahnya nyaman, airnya tawar, ikannya banyak”. Ungkapan ini melukiskan kondisi masyarakatnya, yaitu penduduknya ramah sehingga menjadi daya tarik bagi orang dengan berbagai latar belakang untuk datang ke Tanah Datar. Bagi orang yang baru mengenal Kabupaten Tanah Datar, seringkali terjadi salah penafsiran mengenai nama Tanah Datar. Banyak orang mengira di Kabupaten Tanah Datar banyak wilayahnya yang berupa dataran (tanah yang datar). Luhak Tanah Datar sebenarnya mengandung pengertian Tak Nan Data yang berarti tidak ada yang datar. Hal ini sejalan dengan kondisi geografis kawasan ini yang memang didominasi oleh kawasan perbukitan.

Kabupaten Tanah Datar adalah daerah agraris karena kurang lebih 70% penduduknya bergerak di sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan maupun perikanan, yang semuanya telah berjalan secara turun temurun. Sektor lain yang berkembang pada dasarnya juga berbasis pertanian, seperti industri kecil dan industri pengolahan, di samping juga sektor pariwisata.

Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, masyarakatnya dikenal sangat kuat memegang teguh ajaran agama dan adat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Filosofi inilah yang menjadi landasan kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Tanah Datar meliputi beberapa aspek yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, dengan ibukota Batusangkar. Daerah ini merupakan wilayah pegunungan dengan luas wilayah 1.336 km² atau 133.600 Ha. Secara administrasi Kabupaten Tanah Datar mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Batas	Kabupaten/Kota
Utara	Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota
Selatan	Kabupaten Solok
Barat	Kabupaten Padang Pariaman
Timur	Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung



Gambar 2.1 Peta Administrasi

Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1.336 km² atau 133.600 ha, atau sekitar 3,16% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (42.297,30 km²), menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten dengan wilayah paling kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Secara administratif, Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Kecamatan paling

luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 20.431 Ha atau 15,29% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas 4.315 Ha atau 3,23% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Komposisi luas wilayah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1

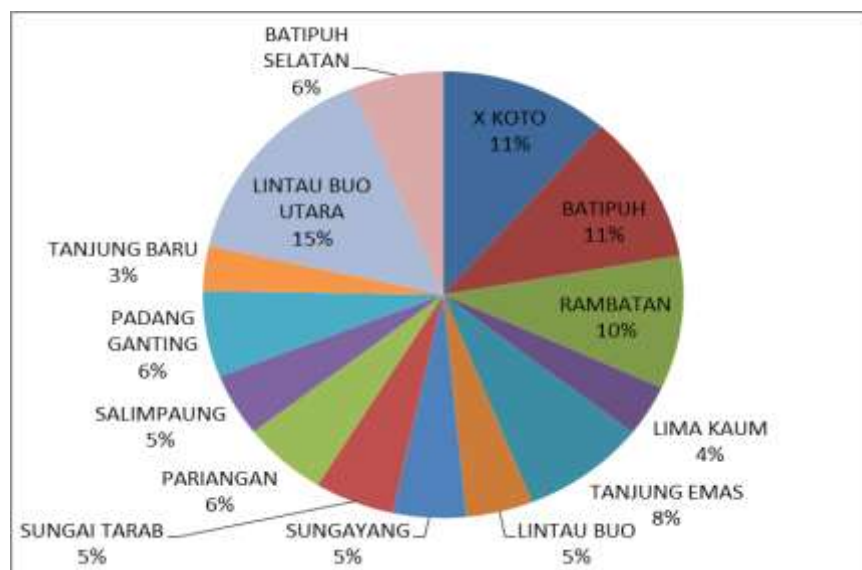
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase	Jumlah	
				Nagari	Jorong
1.	X Koto	15.202	11,38	9	41
2.	Batipuh	14.427	10,8	8	49
3.	Batipuh Selatan	8.273	6,19	4	17
4.	Pariangan	7.643	5,72	6	21
5.	Rambatan	12.915	9,67	5	33
6.	Lima Kaum	5.000	3,74	5	33
7.	Tanjung Emas	11.205	8,39	4	19
8.	Padang Ganting	8.350	6,25	2	7
9.	Lintau Buo	6.022	4,51	4	22
10.	Lintau Buo Utara	20.431	15,29	5	63
11.	Sungayang	6.545	4,9	5	14
12.	Sungai Tarab	7.185	5,38	10	32
13.	Salimpaung	6.088	4,58	6	27
14.	Tanjung Baru	4.315	3,23	2	17
Jumlah		133.600	100	75	395

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

Grafik 2.1

Komposisi Luas Wilayah Administrasi Kecamatan





b. Letak dan Kondisi Geografis

1) Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Tanah Datar terletak pada $00^{\circ}17'' - 00^{\circ}39''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}19'' - 100^{\circ}51''$ Bujur Timur.

2) Posisi Geostrategis

Secara geostrategis, Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini memberi keuntungan tersendiri, yaitu waktu tempuh ke hampir seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Barat menjadi tidak terlalu lama atau tidak terlalu jauh perbedaannya.

c. Topografi

1) Kemiringan lahan

Topografi Kabupaten Tanah Datar secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 satuan morfologi yaitu:

- Morfologi datar dengan kemiringan 0-3%, dataran yang mempunyai satuan morfologi ini relatif kecil dan dengan ketinggian antara 226-274 meter di atas permukaan laut.
- Morfologi dataran agak landai dengan kemiringan 3-8%, umumnya terletak pada lembah diantara perbukitan atau pada lereng perbukitan dengan ketinggian antara 365-615 meter di atas permukaan laut.
- Morfologi bergelombang dengan kemiringan 8-15% merupakan daerah peralihan antara satuan dataran bergelombang dengan satuan perbukitan terjal yang mempunyai ketinggian antara 612-952 meter dpl.
- Morfologi curam dengan kemiringan $> 15\%$, merupakan daerah puncak-puncak perbukitan seperti yang terdapat pada Selatan Gunung Merapi lebih dari 1000 dpl.

2) Ketinggian lahan

Wilayah Kabupaten Tanah Datar didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan elevasi atau ketinggian yang bervariasi, wilayah terendah berada pada ketinggian ± 200 m.dpl dan tertinggi pada ketinggian ± 1.000 m.dpl, dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2

Ketinggian Lahan menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

No.	Kecamatan	Ketinggian (m dpl)	
		Terendah	Tertinggi
1.	X Koto	700	1.000
2.	Batipuh	500	850



No.	Kecamatan	Ketinggian (m dpl)	
		Terendah	Tertinggi
3.	Batipuh Selatan	500	850
4.	Pariangan	500	800
5.	Rambatan	600	700
6.	Lima Kaum	450	550
7.	Tanjung Emas	450	550
8.	Padang Ganting	450	550
9.	Lintau Buo	200	750
10.	Lintau Buo Utara	200	750
11.	Sungayang	400	750
12.	Sungai Tarab	450	450
13.	Salimpaung	750	1.000
14.	Tanjung Baru	750	1.000

Sumber : BPS Tanah Datar, 2017

d. Geologi

Secara geologi Kabupaten Tanah Datar ditutupi oleh beragam jenis batuan mulai dari endapan permukaan, batuan gunung, batuan sedimen, batuan malihan dan batuan intrusi. Susunan stratigrafi daerah ini dari peta geologi adalah sebagai berikut:

1) Endapan Permukaan

- Alluvium Sungai, Kwartir Resen, terdiri dari lempung, pasir, kerikil, dan bongkahan-bongkahan batuan beku, kwarsit dan macam-macam batuan lainnya.

2) Batuan Gunung Api, Kwartir

- Tufa basalt berupa tufa abu-abu, lapili, tufa basalt berkaca dan pecahan lava. Pecahan lava ini mengandung fenokris labradorit dan piroksen-klino dalam dasar berkaca gelap Tufa batuapung, khas terdiri dari batuapung putih sampai kekuning-kuningan bergaris tengah 0,5-10 cm dalam masa dasar kelaran berkomposisi riolit. Secara setempat-setempat bagian bawahnya mengandung lapisan kerikil dan lapilli.
- Andesit Gunung Melintang, berupa breksi andesit sampai basalt, pecahan lava berongga, endapan lahar dan lava.
- Andesit Gunung Marapi, berupa breksi andesit sampai basalt, bongkahan-bongkahan lava, lapili, tufa, agromerat dan endapan lahan.



- 3) Batuan Gunung Api, Karter – Tersier
 - Batuan vulkanik tak terpisahkan, berupa aliran lahar, konglomerat dan endapan kolvium lainnya, bersusunan anatar andesit sampai basalt
- 4) Batuan Sedimen, Tersier
 - Anggota bawah Formasi Ombilin, berupa batuan pasir kwarsa mengandung mika dalam lapisan-lapisan setebal ± 2 m, dan setempat-setempat mengalami metamorfosa, mengandung sisipan arkosa, serpihan lempungan, abu-abu semu biru, konglomerat kwarsa dan lapisan batubara.
 - Batu gamping karang, terdapat pada bagian bawah dari anggota bawah Formasi Telisa
 - Formasi Sangkarewang, terdiri dari serpih napalan coklat tua sampai kehitaman disisipi oleh batu pasir arkosa dan setempat-setempat oleh breksi andesit kasar bersudut.
 - Formasi Brani terdiri dari konglomerat kasar beraneka ragam dan beberapa sisipan batu pasir. Sebelah Timur Danau Singkarak, satuan ini terdiri dari konglomerat batu gamping dengan sedikit kerakal kwarsit dan granit dalam masa dasar atau gamping.
- 5) Batuan Malihan, Trias
 - Anggota batusabak dan serpih Formasi Tuhur, terdiri dari batusabak, serpihan napalan, berwarna abu-abu muda sampai tua dengan sisipan rijang coklat, radioralit, serpih hitam terkarsikan dan lapisan tipis grewake termalihan.
- 6) Batuan Malihan, Perem – Karbon
 - Anggota filit dan serpih Formasi Kuantan, terutama terdiri dari serpih dan filit berwarna kemerah-merahan sampai coklat tua, kwarsit, batu lanau, rijang abu-abu dan aliran lava bersusunan andesit hingga basalt.
 - Anggota batu gamping Formasi Kuantan, berupa batu gamping pejal, berongga, berwarna putih abu-abu kemerahan mengandung sisipan tipis batu sabak abu-abu tua, kwarsit, batu lanau, rijang abu-abu dan aliran lava bersusunan andesit hingga basalt.
 - Anggota batu gamping Formasi Kuantang berupa batu gamping pejal, berwarna putih abu-abu kemerahan mengandung sisipan tipis batusabak, filit, serpihan terkarsikan dan kwarsit umumnya berbentuk topografi kasar berpunggur tajam.
 - Anggota bawah Formasi Kuantan, terutama terdiri dari kwarsit dan batu pasir kwarsa dengan sisipan filit, batusabak terkarsikan, serpih, batuan gunungapi, tufa klorit konglomerat dan rijang coklat.



7) Batuan Terobosan (intrusi), Trias

- Granit, susunan berkisar dari leuco-granit sampai monzonit kwarsa. Disebelah Timur Danau Singkarak singkapan granit genes yang berkekar dan tergeser jelas, yang ada hubungannya dengan jalur pergeseran dari patahan Semangko.
- Granodiorit, bertekstur porfitrik-feneritik berwarna abu-abu muda. Beberapa singkapan terlihat telah cukup lapuk dan terkena proses kloritisasi.
- Kwarsa diorit, bertekstur butiran hipotomorfik holokristalin, berwarna abu-abu sampai abu-abu semu hijau. Kebanyakan terdiri dari oligoklas, kwarsa, hornblende dan biotit.
- Profil kwarsa, terdiri dari fenokris kwarsa, feldspar dan dalam massa dasar bebutir sedang, hampir bebas dan mineral mafik, mungkin hasil pemisahan granit.

Sumber : Lembar Solok skala 1 : 250.000 (PH. Silitonga dan Kastowo, 1975) dan peta geologi lembar Padang (Kastono, Gerhard W. Leo, S. Gafoer dan T.C. Amin, 1996)

e. Hidrologi

1) Daerah aliran sungai

Secara hidrologi, Kabupaten Tanah Datar dilalui oleh beberapa sungai yang bersumber dari lereng Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago dan gugusan Bukit Barisan. Beberapa sungai di bagian barat bermuara dan menjadi sumber air Danau Singkarak. Sedangkan saluran keluar limbah air Danau Singkarak adalah Sungai Batang Ombilin. Saat ini potensi air Danau Singkarak telah dimanfaatkan untuk kegiatan PLTA yang terdapat di Malalo dan Ombilin.

Sumber-sumber air tersebut sangat membantu usaha pertanian tanaman pangan lahan basah khususnya pada Kecamatan Batipuh, Pariangan, Lima Kaum, Rambatan dan Sungai Tarab. Namun beberapa wilayah Kabupaten Tanah Datar sulit mendapatkan pengairan karena faktor morfologinya. Wilayah tersebut meliputi bagian selatan Kecamatan Batipuh dan Rambatan serta bagian timur yang terdiri dari Kecamatan Sungayang, Tanjung Emas dan Lintau Buo. Tabel 2.3 menyajikan nama-nama sungai pada tiap kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.3
Sungai di Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Sungai	Kecamatan
1	- Batang Anai - Batang Anai Tambang - Batang Arau - Muaro Sitanang - Muaro Bulan Sabik	X Koto
2	- Batang Sagu - Batang Gadis - Batang Sumpu - Batang Talang	Batipuh
3	- Batang Bengkawas	Pariangan
4	- Batang ombilin	Rambatan
5	- Batang Kiambang - Batang Malana	Lima Kaum
6	- Batang Selo	Lima kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting
7	- Batang Tampo - Batang Sinamar	Lintau Buo
8	- Batang Selo Tengah	Sungayang
9	- Batang Bangkahan - Batang Sinandang	Sungai Tarab
10	- Batang Baburai - Batang Air Kampung Panjang - Batang Bona - Batang Gadang	Salimpaung

Sumber : BPS Tahun 2017 (data diolah)

Kecamatan X Koto merupakan kecamatan yang memiliki banyak sungai di Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah 5 sungai.



Gambar 2.2 Peta Hidrologi



f. Klimatologi

1) Tipe

Secara Klimatologi, iklim di Kabupaten Tanah Datar termasuk iklim tropis seperti pada umumnya daerah di Indonesia yang memiliki dua musim dalam setahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Tanah Datar 23^o C dengan ketinggian rata-rata adalah 936 m dpl.

2) Curah hujan

Hasil dari analisis data curah hujan di Kabupaten Tanah Datar didapat melalui 8 stasiun pengamatan. Tingkat curah hujan tahunan cukup tinggi yaitu berkisar antara 1.750 – 4000. Adapun sebaran dari kelas curah hujan di Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

- Wilayah dengan curah hujan 3.000–4.000 mm/th tanpa bulan kering berada di sekitar pinggang Gunung Merapi yang meliputi bagian Kecamatan Pariangan, Lima Kaum dan Lintau Buo.
- Wilayah dengan curah hujan 2.500–3.000 mm/th dengan bulan kering (curah hujan <100 mm) rata-rata < 2 bulan. Wilayah ini meliputi sebagian Kecamatan Pariangan, Lima Kaum, Lintau Buo dan Batipuh.
- Wilayah dengan curah hujan 2.000–2.500 mm/th dengan bulan kering rata-rata 4–6 bulan berturut-turut. Wilayah ini meliputi sebagian Kecamatan Batipuh, Salimpaung, Sungai Tarab, Sungayang, dan bagian Utara Kecamatan Tanjung Emas.
- Wilayah dengan curah hujan 1.750 – 2.000 mm/th meliputi bagian Barat wilayah 12 Kabupaten Tanah Datar yaitu sebagian Kecamatan Batipuh dan Kecamatan X Koto.

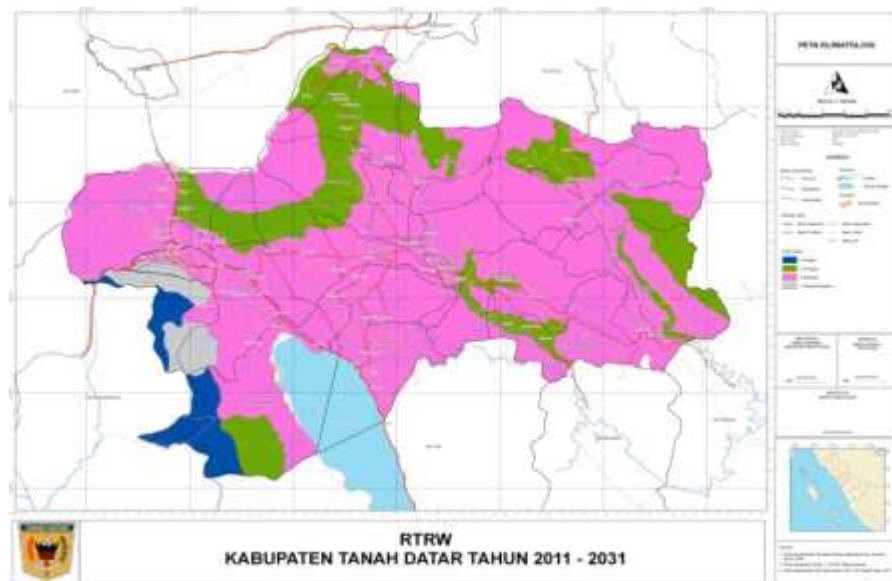
Jumlah hari hujan dan curah hujan di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil pengamatan BMKG, Stasiun Klimatologi Sicincin digambarkan pada tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Curah Hujan dan Hari Hujan (mm/bln)
Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2017

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Rata-rata (mm/hari)
Januari	133	10	13,30
Februari	132	12	11,00
Maret	195	15	13,00
April	139	14	9,92
Mei	182	16	11,38

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Rata-rata (mm/hari)
Juni	120	9	13,33
Juli	63	8	7,88
Agustus	187	14	13,36
September	153	12	12,75
Oktober	62	8	7,75
November	169	16	10,56
Desember	185	17	10,88

Sumber : BPS, Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2018



Gambar 2.3 Peta Curah Hujan

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2017, puncak musim hujan terjadi pada bulan Agustus dengan rata-rata hujan 13,36 mm³/hari, sedangkan pada bulan Oktober curah hujan dan jumlah hari hujan sangat rendah dengan rata-rata hujan 7,75 mm³/hari.

g. Penggunaan Lahan

Data penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel 2.5. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa wilayah Kabupaten Tanah Datar masih didominasi oleh kawasan hutan dengan luas keseluruhan mencapai 37,37% yang terdiri dari hutan lindung (15,22%), hutan produksi (7,01 %), hutan konservasi (15,05%) dan hutan produksi konservasi sebesar 0,08 persen. Selanjutnya, penggunaan lahan untuk sektor pertanian mencapai 48,37%, yang terdiri dari pertanian lahan basah (17,70%), pertanian lahan kering (13,24%), dan perkebunan rakyat (17,43%).



Tabel 2.5.
Luas Lahan Menurut Penggunaan

No.	Penggunaan Tanah	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	12.073,00	9,04
2.	Pertanian lahan kering	17.691,52	13,24
3.	Pertanian lahan basah	23.653,00	17,70
4.	Telaga/kolam/perairan umum	6.970,77	5,22
	- Telaga	17,97	17,97
	- Sungai	292,80	292,80
	- Danau	6.660,00	6.660,00
5.	Hutan	49.921,52	37,37
	- Hutan konservasi	20.111,69	15,05
	- Hutan lindung	20.336,87	15,22
	- Hutan produksi	9.359,06	7,01
	- Hutan produksi konservasi	113,90	0,08
6.	Perkebunan rakyat	23.290,19	17,43
Jumlah		133.600,00	100

Sumber: BPS, Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2017

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Tanah Datar meliputi beberapa kawasan antara lain :

1. Kawasan peruntukan pertanian;

Peruntukan kawasan pertanian di Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan peternakan/ perikanan dan kawasan perkebunan.

a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan terbagi atas kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah dan kawasan tanaman pangan lahan kering. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah pada umumnya ditanam dengan tanaman padi sawah, sedangkan kawasan tanaman pangan lahan kering ditanami dengan tanaman palawija atau hortikultura.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah sentra komoditi tanaman pangan di Provinsi Sumatera Barat bahkan sebagian besar komoditi ini sudah dipasarkan ke Provinsi tetangga seperti Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Sumatera Utara. Jenis komoditi tanaman pangan unggulan ini adalah padi, jagung, dan ubi jalar. Sebaran sentra produksi tanaman pangan sebagaimana digambarkan pada tabel 2.6 :



Tabel 2.6

Sentra Produksi Beberapa Komoditi Tanaman Pangan

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Kecamatan)
1.	Padi	Seluruh Kecamatan
2.	Jagung	Rambatan, Sungai Tarab, Salimpaung, dan Tanjung Baru
3.	Ubi Jalar	X Koto, Batipuh, Pariangan, Salimpaung, Tanjung Baru, Sungayang, Sungai Tarab, dan Lintau Buo Utara

Sumber : Dinas Pertanian, 2017

Adapun perkembangan produksi tanaman pangan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7

Perkembangan Produksi Tanaman Pangan
Tahun 2016 dan 2017

No	Uraian	2016	2017	Pertumbuhan (%)
1.	Padi	232.386,00	299.188,00	28,75
2.	Jagung	21.955,00	52.047,00	137,06
3.	Ubi jalar	48.831,00	32.552,00	(33,33)

Sumber : Dinas Pertanian, 2017

Produksi padi dan jagung pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016 dimana produksi padi meningkat sebesar 66.802 ton atau 28,75%, sedangkan produksi jagung meningkat sebesar 30.092 ton atau 137%. Peningkatan produksi padi dan jagung disebabkan peningkatan luas panen dan produktivitas. Sedangkan produksi ubi jalar mengalami penurunan sebesar 33,33% yang disebabkan karena serangan hama penyakit, penurunan harga komoditi dan alih tanam ke komoditi lain.

Kabupaten Tanah Datar juga merupakan salah satu daerah sentra komoditi hortikultura di Provinsi Sumatera Barat bahkan sebagian besar komoditi ini sudah dipasarkan ke Provinsi tetangga seperti Riau, Kepulauan Riau dan Jambi. Jenis komoditi hortikultura unggulan adalah cabe, tomat, kubis, dan pisang. Sentra komoditi hortikultura unggulan tersebut terlihat pada tabel 2.8 berikut:



Tabel 2.8
Beberapa Komoditi Hortikultura

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Kecamatan)
1	Cabe	Seluruh Kecamatan
2	Tomat	Salimpaung, Sungai Tarab, Lintau Buo, Sungayang, X Koto
3	Kubis	X Koto, Tanjung Baru, Salimpaung
4	Pisang	Salimpaung, Tanjung Baru

Sumber : Dinas Pertanian, 2017

Selanjutnya perkembangan produksi tanaman hortikultura dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura
Tahun 2016 dan 2017

No	Uraian	2016	2017	Pertumbuhan (%)
1.	Cabe	13.931,30	13.469,40	(3,31)
2.	Tomat	15.366,80	13.643,70	(11,21)
3.	Kubis	19.600,40	23.873,20	21,79
4.	Pisang	15.931,60	15.684,00	(1,55)

Sumber: Dinas Pertanian, 2017

Berdasarkan Tabel 2.9 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan produksi komoditi hortikultura kecuali kubis karena pada tahun 2017 terjadi peningkatan harga komoditi ini sehingga sebagian besar petani beralih tanam ke komoditi kubis. Walaupun terjadi penurunan produksi pada beberapa komoditi hortikultura namun realisasi produksi tahun 2017 telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian tahun 2016-2021.

b. Kawasan Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tanah Datar juga salah satu pusat pengembangan peternakan di Sumatera Barat, dengan komoditas peternakan yang banyak dibudidayakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, kuda, ayam buras, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging serta itik.

Kawasan pengembangan perikanan di Kabupaten Tanah Datar terdapat di Kecamatan Rambatan, X Koto, Batipuh, Batipuh Selatan, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Padang Ganting dan Salimpaung.

Perkembangan produksi peternakan pada tahun 2017 telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian Tahun 2016-2021.



Tabel 2.10
Perkembangan Produksi Peternakan
Tahun 2016 dan 2017

No	Uraian	2016	2017	Pertumbuhan (%)
1.	Daging Sapi	1.099.244,00	1.069.185,00	(2,73)
2.	Daging Kerbau	128.200,00	133.189,00	3,89
3.	Daging Kambing	113.800,00	121.550,00	6,81
4.	Daging Ayam	3.000.146,00	3.049.695,00	1,65
5.	Telur	8.872.758,00	8.527.942,00	(3,88)

Sumber: Dinas Pertanian, 2017

Dari tabel 2.10 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terjadi peningkatan produksi peternakan kecuali daging sapi dan telur. Hal ini disebabkan masyarakat lebih memilih mengkonsumsi daging kerbau dibandingkan daging sapi. Sedangkan peningkatan produksi daging kambing disebabkan karena tingginya permintaan kambing untuk kurban.

Selanjutnya perkembangan populasi ternak dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Perkembangan Populasi Ternak
Tahun 2016 dan 2017

No	Uraian	2016	2017	Pertumbuhan (%)
1.	Ternak besar	40.301,00	43.490,00	7,91
2.	Ternak kecil	28.776,00	30.106,00	4,62
3.	Unggas	2.403.616,00	2.367.611,00	(1,49)

Sumber: Dinas Pertanian, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, populasi ternak besar dan ternak kecil pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Peningkatan populasi ini disebabkan karena keberhasilan program Inseminasi Buatan (IB) gratis. Sedangkan populasi mengalami sedikit penurunan karena menurunnya jumlah peternak unggas.

Perkembangan produksi komoditi perikanan budidaya seperti ikan mas, nila, lele, gurami dan ikan lainnya dilaksanakan melalui sistem budidaya ikan kolam air tenang, kolam air deras, keramba, mina padi dan produksi perikanan tangkap di danau dan perairan umum lainnya.



Selanjutnya perkembangan produksi perikanan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut:

Tabel 2.12
Perkembangan Produksi Perikanan tahun 2016-2017

No	Uraian	2016 (ton)	2017 (ton)	(%)
1.	Jumlah produksi perikanan budidaya <ul style="list-style-type: none"> • Ikan mas • Ikan nila • Gurami • lele • Ikan lainnya 	5.524,8	7.177,6	29,91
2.	Jumlah produksi perikanan tangkap	1.860,7	2.083,9	11,99
	TOTAL	7.385,5	9.261,5	25,40

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat produksi perikanan pada tahun 2017 meningkat 1.876 ton atau 25,40% dibandingkan tahun 2016. Peningkatan produksi perikanan pada tahun 2017 karena keberhasilan program budidaya perikanan.

Sarana dan prasarana perikanan yang mendukung peningkatan produksi perikanan dapat dilihat pada tabel 2.13 dibawah ini:

Tabel 2.13
Sarana dan Prasarana Perikanan

No	Uraian	Unit	Lokasi
1.	Balai Benih Ikan (BBI)	6	<ul style="list-style-type: none"> - Simpuruik Kec. Sungai Tarab - Padang Magek Kec. Rambatan - Pagaruyuang Kec. Tanjung emas - Padang Ganting Kec. Padang Ganting - Pangian Kec. Lintau Buo - Minangkabau Kec. Sungayang
2.	Pos Penyuluhan	2	<ul style="list-style-type: none"> - Sumpur Kec. Batipuh Selatan - Padang Ganting Kec. Padang Ganting
3.	Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	22	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Batipuh (1 kelompok) - Kecamatan X Koto (1 kelompok) - Kecamatan Rambatan (3 kelompok) - Kecamatan Tanjung Emas (2 kelompok) - Kecamatan Lintau Buo (1 kelompok)



No	Uraian	Unit	Lokasi
			<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Sungai Tarab (9 kelompok) - Kecamatan Lintau Buo Utara (4 kelompok) - Kecamatan Tanjung Baru (1 kelompok)
4.	Bangsai Pengolahan Ikan	4	<ul style="list-style-type: none"> - Guguak Malalo Kec. Batipuh Selatan - Simawang Kec. Rambatan - Batu Taba Kec. Batipuh Selatan - Tanjung Kec. Sungayang
5.	Pos Pokmaswas	5	<ul style="list-style-type: none"> - Aia Angek Kec. X koto - Batu Taba Kec. Batipuh Selatan - Simawang Kec. Rambatan - Padang Laweh Kec. Batipuh Selatan - Guguak Malalo Kec. Batipuh Selatan

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan, 2017

c. Kawasan Perkebunan

Beberapa kawasan yang dapat dikembangkan untuk komoditi perkebunan dalam rangka menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel 2.14 :

Tabel 2.14

Sentra Produksi Komoditi Perkebunan Unggulan Tahun 2017

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Kecamatan)
1	Karet	Tanjung Emas, Padang Ganting, Lintau Buo, Lintau Buo Utara
2	Kakao	Rambatan, Lintau Buo Utara, Lima Kaum
3	Tebu	X Koto, Salimpaung, Lintau Buo Utara
4	Kopi	Salimpaung, Sungai Tarab

Sumber: Dinas Pertanian, 2017

Selanjutnya perkembangan produksi tanaman perkebunan pada tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15

Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2016 dan 2017

No	Uraian	2016	2017	Pertumbuhan (%)
1.	Karet	6.509,96	6.817,72	4,73
2.	Kakao	3.787,37	3.981,96	5,14
3.	Tebu	4.677,54	4.974,37	6,35
4.	Kopi	573,20	763,39	33,18



Sumber: Dinas Pertanian, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat seluruh produksi komoditi perkebunan pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016. Peningkatan produksi komoditi perkebunan pada tahun 2017 karena keberhasilan program rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan serta gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan. Selanjutnya perkembangan produksi tanaman perkebunan pada tabel 2.16 berikut:

Tabel 2.16
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2016 dan 2017

No	Uraian	2016	2017	Pertumbuhan (%)
1.	Karet	6.509,96	6.817,72	4,73
2.	Kakao	3.787,37	3.981,96	5,14
3.	Tebu	4.677,54	4.974,37	6,35
4.	Kopi	573,20	763,39	33,18

Sumber: Dinas Pertanian, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat seluruh produksi komoditi perkebunan pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016. Peningkatan produksi komoditi perkebunan pada tahun 2017 karena keberhasilan program rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan serta gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.

2. Kawasan Pertambangan

Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi pertambangan dan sumber energi, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP) oleh pemerintah sehingga penerbitan izin-izin usaha pertambangan baru untuk sementara belum dapat diproses.

Potensi sektor pertambangan yang sudah dikelola baru terbatas pada beberapa jenis bahan galian seperti pasir/kerikil, granit/andesit/batu beku, tanah liat yang izinnya telah terbit sebelum moratorium izin usaha pertambangan baru.

3. Kawasan Pariwisata

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu destinasi wisata di Sumatera Barat yang memiliki objek wisata sejarah budaya, alam dan minat



husus. Selain Istano Basa Pagaruyung yang dikenal dengan Rumah Gadang, Kabupaten Tanah Datar juga memiliki Danau Singkarak, yang cukup terkenal bukan saja di wilayah Tanah Datar atau di Provinsi Sumatera Barat, melainkan di tingkat nasional. Disamping itu masih banyak potensi pariwisata yang belum digali dan terekspose di masyarakat luas.

Potensi-potensi yang ada diantaranya adalah Objek Wisata Nagari Tuo Pariangan, Panorama Tabek Patah, Batu Batikam, Ngatau Indah Pangian, Air terjun Tanjung Bonai dan sebagainya. Objek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar berjumlah sebanyak 170 buah objek wisata yang terdiri dari :

- a) Objek Wisata Alam sebanyak 59 buah
- b) Objek Wisata Sejarah/Budaya sebanyak 105 buah
- c) Objek Wisata Minat Khusus sebanyak 4 buah
- d) Objek Wisata Agro sebanyak 1 buah
- e) Tempat Rekreasi/Hiburan sebanyak 1 buah

Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 2.17 dibawah ini:

Tabel 2.17
Jumlah Kunjungan ke Objek Wisata Tahun 2016-2017

No	Uraian	2016		2017	
		Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman
1.	Istano Basa Pagaruyung	364.653	23.481	549.171	18.188
2.	Batu Angkek-angkek	10.267	547	10.734	608
3.	Puncak Pato	9.857	487	27.924	1
4.	Panorama Tabek Patah	8.995	523	20.200	-
5.	Aia Angkek Padang Ganting	37.862	6.834	46.538	-
6.	Lembah Anai	249.480	18.726	89.969	27.010
7.	Tanjung Mutiara	17.234	689	33.299	458
8.	Nagari Tuo Pariangan	10.634	1.756	45.760	1.638
9.	Batu Batikam			26.134	
10.	Batu Basurek			56.201	646
11.	Pandai Sikek			130.324	2.420
12.	Kincia Kamba Tigo	-	-	39.622	-
13.	Puncak Aua Sarumpun	-	-	28.296	1
14.	Pacu Jawi			45.090	1.047
15.	Wisata Pendakian Gunung			13.380	486
16.	Event Kepariwisataaan	-	-	61.085	649
	Jumlah	898.762	103.972	1.223.727	53.152

Sumber : Dinas Parpora, 2017



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Istana Basa Pagaruyung menjadi objek wisata tujuan utama. Secara umum terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah kunjungan wisatawan baik kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Tahun 2017 juga terdapat kunjungan masyarakat ke event-event kepariwisataan yang diadakan oleh daerah dan masyarakat seperti Festival Pesona Budaya Minangkabau, Tour De Singkarak, Pacu Jawi, Festival Danau Singkarak, Pagaruyung Walk Heritage dan Festival 5 (lima) Danau.

Jumlah hotel, wisma/homestay, dan rumah makan/restoran/cafe yang mendukung sektor kepariwisataan dapat dilihat pada tabel 2.18 dibawah ini:

Tabel 2.18
Jumlah Hotel, Wisma/Homestay dan Rumah Makan/Restoran/Cafe
Tahun 2016-2017

No.	Uraian	Jumlah (unit)	
		2016	2017
1.	Hotel	8	7
2.	Wisma/Home stay	9	14
3.	Rumah makan/restoran/cafe	220	220

Sumber : Dinas Pariwisata, 2017

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Tanah Datar memiliki bentang alam yang bervariasi, yaitu posisinya berada di antara 2 (dua) gunung yang masih aktif yaitu Gunung Marapi dan Gunung Singgalang, memiliki morfologi bergelombang, banyak dilalui sungai-sungai besar serta dilalui jalur sesar besar Sumatera (Sesar Semangko) sehingga menyebabkan Kabupaten Tanah Datar rentan terhadap bencana. Potensi bencana yang ada di Kabupaten Tanah Datar diantaranya adalah :

1. Gempa Bumi

Gempa bumi di Kabupaten Tanah Datar disebabkan oleh adanya jalur sesar aktif yang melalui wilayah Tanah Datar yang memanjang mulai dari Teluk Semangko di tenggara hingga Banda Aceh.

Nagari yang berpotensi rawan bencana gempa yaitu Nagari Gunung Rajo dan Nagari Pitalah karena kedua nagari tersebut berada tepat di jalur sesar. Sedangkan daerah yang harus diwaspadai dengan gempa tektonik adalah Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Salimpaung dan Kecamatan X Koto bagian Timur.

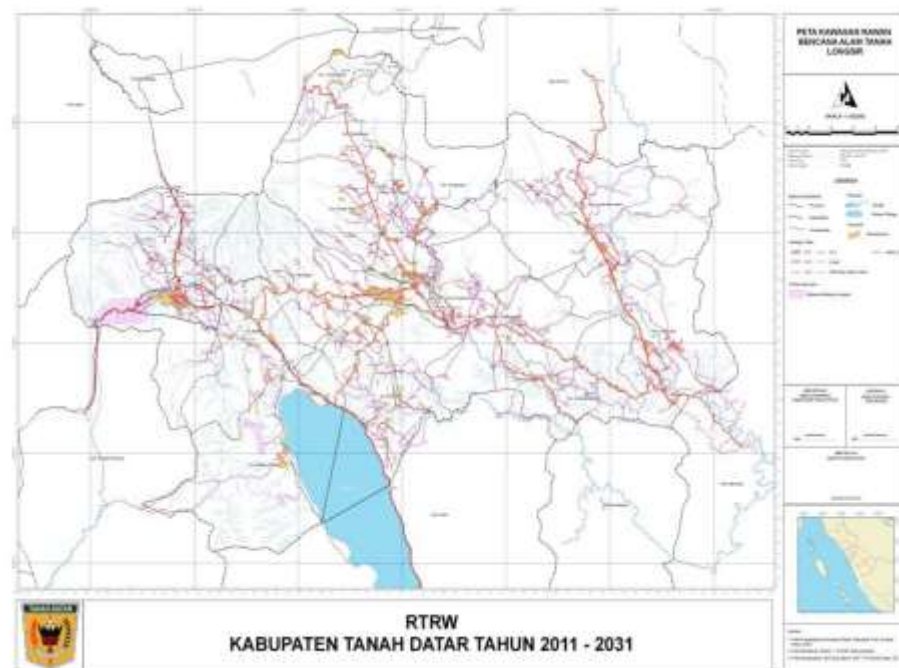
2. Gerakan Tanah (Longsor)

Wilayah Kabupaten Tanah Datar yang merupakan bagian dari jajaran Pegunungan Bukit Barisan secara geologi memiliki potensi terjadinya gerakan tanah. Beberapa penyebab terjadinya gerakan tanah, antara lain :

- a. Faktor keairan (curah hujan) yang tinggi dan geologi yang kompleks pada wilayah ini.
- b. Faktor aktivitas manusia merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya bencana gerakan tanah, misalnya tataguna lahan yang tidak sesuai dengan topografi dan struktur geologi setempat, pemotongan kaki bukit untuk wilayah pemukiman dan pelebaran jalan.
- c. Kondisi morfologi yang bergelombang.

Jenis gerakan tanah yang sering terjadi adalah jenis longsoran bahan rombakan (*debris slide*) dan aliran bahan rombakan (*debris avalanche*). Berdasarkan hasil studi pemetaan mengenai gerakan tanah di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya, jenis gerakan tanah yang dijumpai berupa longsoran bahan rombakan dan nendatan, selain itu dijumpai juga beberapa gawir gerakan tanah lama. Di bawah ini akan diuraikan mengenai kondisi lahan yang memiliki potensi bencana gerakan tanah, serta lokasi penyebarannya, sebagai berikut :

- 1) Breksi, lapuk, bersifat berai - mudah tererosi, fragmen andesit dan material vulkanik lainnya dengan ukuran fragmen kerikil-bongkah berada di zona patahan sehingga sangat labil terhadap gerakan tanah terdapat di sekitar Jalan Padang Panjang - Singkarak, Nagari Subang Anak Kecamatan Batipuh.
- 2) Pengamatan lapangan dari formasi endapan Kuartar Marapi yang relatif labil terhadap gerakan tanah, terdapat di Jalan Padang Panjang - Batusangkar, Bukit Tampang Biaro, Sikaladi, Kecamatan Pariangan.
- 3) Pemaprasan tebing yang tidak mengikuti kaidah kestabilan lereng sangat berbahaya bagi pengguna fasilitas jalan, terdapat di Desa Baruah Bukik Kecamatan Sungayang.
- 4) Granit, coklat-putih, tergerus kuat, bidang gerusan terisi oleh lempung, lapukan granit berukuran pasir kasar - kerikil kasar, mineral lapuk: kuarsa, feldspar, biotit (inset: kontak antara granit lapuk dan masif yang dibatasi oleh bidang patahan).
- 5) Gerakan tanah bersifat rayapan terdiri dari material halus (klastik) berupa lahar, abu-abu, fragmen rempah-rempah vulkanik terdiri dari andesit dan material gunungapi lainnya. Lokasi terdapat di perbatasan Kota Padang Panjang – Kabupaten Tanah Datar



Gambar 2.4 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor

3. Gunung Berapi

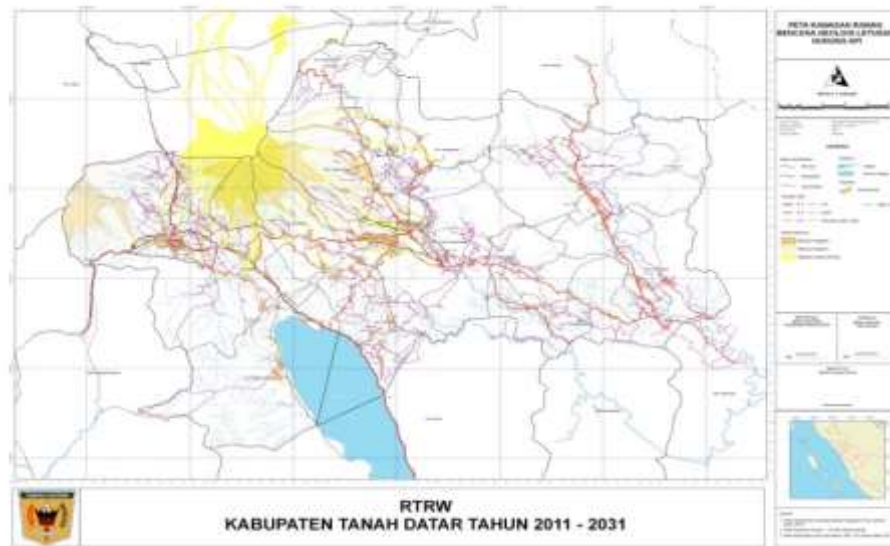
Selain gempa bumi dan gerakan tanah, potensi bencana lainnya adalah letusan gunung api aktif, yaitu Gunung Marapi. Bahaya yang ditimbulkan letusan gunung api adalah terjadinya aliran lava, awan panas, gas beracun, lahar primer pada letusan gunung api yang mempunyai danau kawah, lahar sekunder atau sering disebut lahar hujan dan gelombang pasang. Daerah rawan letusan gunung api terdapat pada daerah sekitar lembah sungai yang berhulu di lereng atas Gunung Marapi memanjang hingga ke lereng bawah.

Daerah-daerah yang perlu diwaspadai jika aktifitas Gunung Marapi kembali aktif diantaranya: Bulan Sarik, Guguk, Labuatan dan Batur (Kecamatan Pariangan); Lumbung Bapereng, Tanjung Ateh Bukik, Pasir Laweh dan Talang Tengah (Kecamatan Sungai Tarab); serta Koto Baru, Kayutanduak, Marapi, Hilia Balai (Kecamatan X Koto); Andaleh dan Sabu (Kecamatan Batipuh); daerah-daerah tersebut diindikasikan sebagai jalur lahar jika terjadi letusan.

Pengamanan daerah rawan letusan gunung api dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Kawasan Bahaya I dengan radius 0 – 2 Km dari puncak gunung.
- Kawasan Bahaya II dengan radius 3 – 7 Km dari puncak gunung.
- Kawasan bahaya III dengan radius 8 – 14 Km dari puncak gunung.

Dari pembahasan mengenai potensi bencana di atas, berdasarkan kriteria kawasan lindung untuk kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor serta gelombang pasang dan banjir, maka kawasan-kawasan yang berada pada jalur atau radius bencana diarahkan menjadi kawasan berfungsi lindung.



Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Gunung Api

2.1.1.4. Demografi

a. Jumlah dan Struktur Penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Data jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk pokok yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan. Suatu wilayah dikatakan berstruktur umur muda apabila kelompok penduduk yang berumur di bawah 15 tahun jumlahnya lebih dari 40% populasi dan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas kurang dari 10%. Sebaliknya, suatu wilayah dikatakan berstruktur penduduk tua apabila kelompok penduduk yang berumur di bawah 15 tahun jumlahnya kurang dari 40% dan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas lebih dari 10%.

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat sebanyak 367.754 jiwa. Komposisinya menunjukkan penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, yakni 184.306 jiwa laki-laki dan 183.448 jiwa perempuan dengan *sex ratio* 100,46, sebagaimana tergambar pada tabel 2.19 :



Tabel 2.19
Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan, Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk, 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk			Kepadatan Penduduk per Km ²
			Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	X Koto	152,02	21,778	21,260	43,038	283,11
2	Batipuh	144,26	15,928	15,980	31,908	221,18
3	Rambatan	129,15	19,236	18,724	37,960	293,92
4	Lima Kaum	50,00	18,916	18,974	37,890	757,80
5	Tanjung Emas	112,05	12,043	12,090	24,133	215,38
6	Lintau Buo	60,22	9,588	9,467	19,055	316,42
7	Sungayang	65,45	9,310	9,469	18,779	286,92
8	Sungai Tarab	71,85	16,387	16,026	32,413	451,12
9	Pariangan	76,43	10,422	10,511	20,933	273,88
10	Salimpauang	60,88	11,639	11,712	23,351	383,56
11	Padang Ganting	83,05	7,226	7,526	14,752	176,67
12	Tanjung Baru	43,14	7,173	7,066	14,239	330,06
13	Lintau Buo Utara	204,31	18,941	18,868	37,809	185,05
14	Batipuh Selatan	82,73	5,719	5,775	11,494	138,93
	Tanah Datar	1.336,00	184,306	183,448	367,754	275,26

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Dari data diatas didapat bahwa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan X Koto sedangkan terendah yaitu kecamatan Batipuh Selatan.

Tabel 2.20

Sex ratio dan Pertumbuhan Penduduk, 2013 – 2017

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex ratio	Pertumbuhan (%)
2013	167.051	175.813	342.864	95,02	0,28
2014	167.677	176.198	343.875	95,16	0,29
2015	168.313	176.515	344.828	95,35	0,28
2016	168.772	176.984	345.706	95,39	0,25
2017	169.306	177.143	346.560	95,64	0,25

Sumber: Badan Pusat Statistik

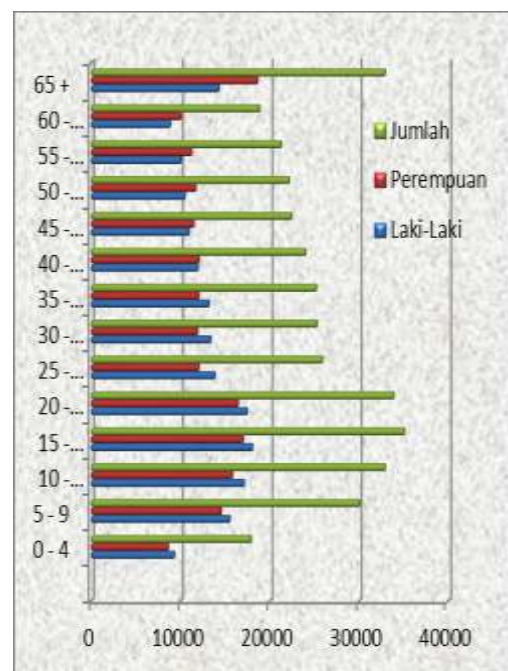
Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 2.21 :

Tabel 2.21

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2017

Umur	Jumlah		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0 - 4	9,287	8,617	17,904
5 - 9	15,505	14,553	30,058
10 - 14	17,109	15,784	32,893
15 - 19	18,042	16,997	35,039
20 - 24	17,453	16,434	33,887
25 - 29	13,834	12,038	25,872
30 - 34	13,368	11,901	25,269
35 - 39	13,171	12,043	25,214
40 - 44	11,929	12,061	23,990
45 - 49	10,958	11,470	22,428
50 - 54	10,481	11,687	22,168
55 - 59	10,047	11,228	21,275
60 - 64	8,845	10,026	18,871
65 +	14,277	18,609	32,886
	184,306	183,448	367,754

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Tanah Datar, 2017



Komposisi penduduk Kabupaten Tanah Datar menurut kelompok umur memperlihatkan pola yang cukup menarik. Berdasarkan data pada tabel di atas, Kabupaten Tanah Datar adalah wilayah dengan struktur umur muda yang ditandai dengan penduduk usia 15 – 64 tahun jumlahnya 69.07% atau lebih dari 40% dan penduduk usia lebih dari 65 tahun jumlahnya 8,94% atau kurang dari 10%.

Ditinjau dari rasio ketergantungan yaitu jumlah penduduk kelompok usia belum atau tidak produktif (anak sekolah dan lansia) dibandingkan dengan usia produktif (usia 15 – 64) maka angka ketergantungan di Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 terlihat cenderung berfluktuasi, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 cenderung meningkat namun pada tahun 2016 dan 2017 cenderung terjadi penurunan.

Tabel 2.22

Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanah Datar, 2013- 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk usia < 15 tahun	99.319	101.068	98.890	83.214	80.855
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	27.862	28.048	27.997	31.265	32.886
3.	Jumlah Penduduk usia tdk produktif (1) & (2)	127.181	129.116	126.887	114.479	113.741
4.	Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun	215.683	217.120	216.988	250.446	254.013
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4)*100	58,97	59,47	58,47	45,71	44,8

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Tanah Datar, 2017

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2017 adalah 0,37% menurun dibandingkan Tahun 2016 yaitu 0,59.

Grafik 2.2

Persentase Pertumbuhan Penduduk



c. Distribusi/Persebaran Penduduk

Aspek demografis berikutnya yang perlu dicermati adalah distribusi atau sebaran penduduk antar wilayah. Tabel 2.13 memperlihatkan bahwa distribusi penduduk Kabupaten Tanah Datar antar kecamatan cukup bervariasi. Ada 6 kecamatan berpenduduk lebih dari 25.000 jiwa dengan penduduk paling banyak terdapat pada Kecamatan X Koto dengan jumlah penduduk 42.222 jiwa. Kecamatan lainnya berpenduduk kurang dari 25.000 dan ada 3 kecamatan yang berpenduduk kurang dari 15.000, yaitu Batipuh Selatan, Padang Ganting dan Tanjung Baru. Kecamatan berpenduduk paling sedikit adalah Batipuh Selatan dengan jumlah penduduk 11.324 jiwa.

Kepadatan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Tanah Datar juga cukup bervariasi. Kecamatan paling padat penduduknya adalah Lima Kaum dengan jumlah penduduk 757 jiwa per km² pada hal luas wilayahnya paling kecil yakni hanya 50 km². Kondisi ini dapat dipahami karena ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Datar berada di wilayah kecamatan tersebut. Kecamatan berikutnya yang cukup padat penduduknya adalah Sungai Tarab dengan kepadatan 451 jiwa per km². Sebagian wilayah dari kecamatan ini juga termasuk wilayah ibu kota Kabupaten Tanah Datar yakni Kota Batusangkar. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit dan paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Batipuh Selatan dengan tingkat kepadatan 138 jiwa per km². Secara keseluruhan, kepadatan penduduk di Kabupaten Tanah Datar adalah 275,265 jiwa per km².

Tabel 2.23

Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, 2017

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1.	X Koto	152,02	43,038	283,11
2.	Batipuh	144,26	31,908	221,18
3.	Rambatan	129,15	37,960	293,92
4.	Lima Kaum	50,00	37,890	757,80
5.	Tanjung Emas	112,05	24,133	215,38
6.	Lintau Buo	60,22	19,055	316,42
7.	Sungayang	65,45	18,779	286,92
8.	Sungai Tarab	71,85	32,413	451,12
9.	Pariangan	76,43	20,933	273,88
10.	Salimpaung	60,88	23,351	383,56



No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
11.	Padang Ganting	83,05	14,752	176,67
12.	Tanjung Baru	43,14	14,239	330,06
13.	Lintau Buo Utara	204,31	37,809	185,05
14.	Batipuh Selatan	82,73	11,494	138,93
Jumlah		1.336,00	367,754	275,265

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

d. Komposisi dan populasi masyarakat

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017, penduduk Kabupaten Tanah Datar mayoritas beragama Islam dengan jumlah pemeluk 367,250 jiwa atau 99,86 %. Agama dengan pemeluk terbanyak kedua adalah agama Kristen dengan jumlah pemeluk 365 jiwa (0,10%). Komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel 2.24 :

Tabel 2.24

Komposisi Penduduk berdasarkan Agama yang Dianut, 2017

No.	Agama	Jumlah Pemeluk	%
1.	Islam	367.250	99.86
2.	Kristen	365	0.10
3.	Katholik	116	0.03
4.	Hindu	0	0
5.	Budha	23	0.01
6.	Kong Hu Chu	0	0
7.	Kepercayaan	0	0

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, komposisi penduduk Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tergambar dalam tabel 2.25 :

Tabel 2.25

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan yang ditamatkan, 2017

No.	Pendidikan Terakhir	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	%
1.	Tidak/belum tamat sekolah	36213	34144	70357	19,1
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	32023	29103	61126	16,6
3.	Tamat SD/Sederajat	44646	44247	88893	24,2
4.	SLTP/Sederajat	30167	28195	58362	15,9
5.	SLTA/Sederajat	33111	34475	67586	18,4

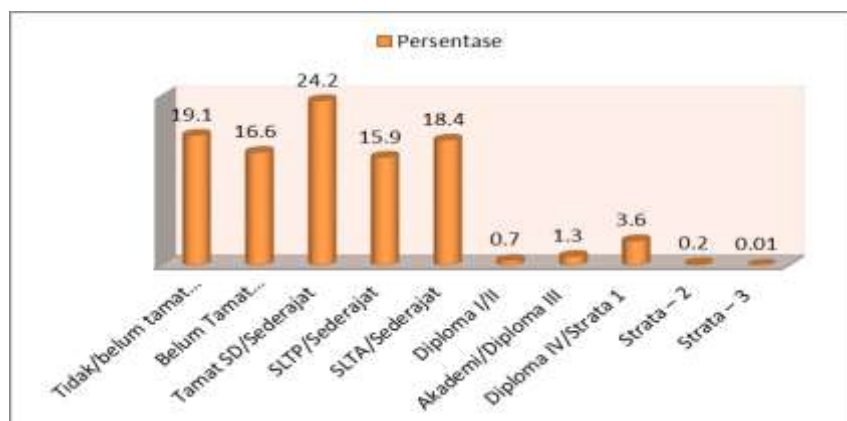


No.	Pendidikan Terakhir	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	%
6.	Diploma I/II	686	1987	2673	0,7
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	1674	2932	4606	1,3
8.	Diploma IV/Strata – 1	5380	7959	13339	3,6
9.	Strata – 2	379	380	759	0,2
10.	Strata – 3	27	26	53	0.01

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Pada umumnya, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Tanah Datar masih cukup rendah, hanya 3,81% penduduk yang menyelesaikan pendidikan sampai jenjang D-4/S-1/S-2/S-3. Penduduk yang mengenyam pendidikan hanya sampai dengan jenjang SD jumlahnya mencapai 24,2%. Hanya 5,81% penduduk yang mengenyam jenjang pendidikan tinggi dengan komposisi terbanyak adalah jenjang S-1 (3,6%).

Grafik 2.3
Tingkat Pendidikan, 2017



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Datar

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar dapat ditinjau dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga, dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator – indikator pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dan angka Kriminalitas yang tertangani.



a. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB – ADHB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB – ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang dapat menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah, pergeseran dan struktur perekonomian daerah.

Pada tahun 2017 nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih dominan dibandingkan dengan nilai tambah lapangan usaha lainnya dengan kontribusi sebesar 3,8 triliun rupiah atau 32,42% dari total PDRB Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Enceran Reperasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor kedua terbesar dalam memberikan sumbangannya terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar. Selama tahun 2017 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Enceran Reperasi Mobil dan Sepeda Motor menghasilkan nilai tambah sebesar 1,54 triliun rupiah atau sekitar 13,19% terhadap total PDRB Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas merupakan lapangan usaha yang paling kecil memberikan sumbangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar yang hanya menghasilkan nilai tambah sebesar 3,51 milyar rupiah atau sekitar 0,03% terhadap total PDRB Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2017.

Pada tahun 2017, PDRB-ADHB Kabupaten Tanah Datar nilainya 11,724 triliun rupiah dan pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 12,44 triliun rupiah.



Tabel 2.26
PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha, 2013 – 2017

No	Lapangan Usaha	Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2013	2014	2015 ^{*)}	2016	2017 ^{***)}
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.713.538,1	3.108.811,4	3.326.388,3	3.489.171,2	3.800.979,4
2.	Pertambangan dan Penggalan	243.599,8	307.029,3	353.094,4	377.552,0	394.466,3
3.	Industri Pengolahan	1.048.553,8	1.128.220,5	1.180.503,9	1.273.491,5	1.358.936,4
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.332,9	1.551,1	2.196,6	2.927,7	3.514,6
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.927,1	9.563,8	10.907,8	12.149,5	13.468,5
6.	Konstruksi	751.182,3	834.939	924.985,0	1.008.058,9	1.112.176,4
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	979.992,4	1.097.672,4	1.125.480,6	1.379.667,8	1.546.302,3
8.	Transportasi dan Pergudangan	656.914,6	742.336,6	808.191,6	888.984,4	983.428,8
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50.492,2	56.587,1	64.384,8	74.490,5	84.806,0
10.	Informasi dan Komunikasi	354.923,8	400.443,8	399.978,7	444.681,4	480.086,1
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	211.309,9	233.621,9	252.122,6	279.153,8	306.324,2
12.	Real Estat	128.657,5	146.885,2	163.139,6	177.777,9	198.048,5
13.	Jasa Perusahaan	3.048,8	3.350,9	3.687,7	4.063,3	4.471,7
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	536.659,7	583.866,9	576.188,6	651.538,3	695.623,2
15.	Jasa Pendidikan	230.998,2	261.859,6	292.786,6	336.304,5	381.183,2
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107.157,6	119.554	128.063,6	138.910,5	151.484,8
17.	Jasa lainnya	136.623,9	151.465,8	163.879,8	188.107,7	209.288,5
	Total	8.163.912,6	9.187.759,4	9.875.980,55	10.727.031,2	11.724.588,8

Sumber : BPS Tanah Datar Tahun 2017

^{*)} Angka sementara

^{**) Data diolah}

^{***)} Angka sangat sementara

2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB – ADHK)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB – ADHK) disusun berdasarkan harga dasar pada tahun dasar yang telah ditetapkan dan digunakan untuk



mengetahui atau mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Secara keseluruhan, nilai tambah seluruh sektor ekonomi/lapangan usaha selama tahun 2017 apabila dihitung adalah sebesar 8,81 triliun rupiah, atau meningkat sebesar 465,91 milyar rupiah. Tabel berikut menggambarkan perkembangan PDRB – ADHK Tahun 2013 – 2017 :

Tabel 2.27
Perkembangan PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha, 2013 – 2017

No	Sektor	Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017 ^a
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,353,788.59	2,465,574.57	2,574,335.52	2,599,988.68	2,667,205.1
2.	Pertambangan dan Penggalian	199,732.45	213,648.87	228,661.56	243,890.42	276,530.8
3.	Industri Pengolahan	936,043.86	979,383.25	1,000,338.31	1,052,854.05	1,079,194.7
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,241.47	1,644.94	1,715.40	1,887.74	1,908.5
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,469.18	8,967.87	9,453.93	10,002.54	10,067.7
6.	Konstruksi	640,491.83	677,388.08	717,818.50	772,651.28	847,888.1
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	887,412.44	956,029.18	1,014,518.33	1,084,673.85	1,167,049.9
8.	Transportasi dan Pergudangan	575,387.67	622,862.75	678,917.75	736,315.87	802,710.6
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41,796.44	44,292.77	47,412.67	50,871.15	58,552.1
10.	Informasi dan Komunikasi	350,949.02	378,385.98	412,635.22	451,978.65	480,642.7
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	186,962.27	199,183.03	208,960.58	223,925.05	239,341.8
12.	Real Estat	111,018.47	118,299.58	125,131.02	130,989.24	141,646.6
13.	Jasa Perusahaan	2,592.38	2,741.79	2,903.01	3,071.67	3,277.9
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	459,543.36	475,811.19	489,575.17	512,930.72	526,847.3



No	Sektor	Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017 ^{a)}
	Wajib					
15.	Jasa Pendidikan	183,739.10	195,350.98	211,478.56	229,433.09	250,029.6
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,833.12	93,563.38	101,571.28	107,466.12	114,952.9
17.	Jasa lainnya	113,267.60	119,621.49	128,460.10	139,756.85	150,751.5
	Total	7,139,269.25	7,552,749.70	7,953,886.91	8,352,686.97	8,818,597.6

Sumber : BPS Tanah Datar, 2017

Jika dilihat menurut sektor ekonomi, seluruh sektor mengalami peningkatan nilai tambah yang bervariasi. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai peranan paling besar dalam menyumbang nilai PDRB – ADHK, yaitu mencapai 2,66 trilyun. Selanjutnya, lapangan usaha yang menyumbang nilai tambah di atas 1 trilyun adalah lapangan usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan lapangan usaha Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan nilai tambah berturut-turut 1,079 trilyun dan 1,167 trilyun. Lapangan usaha yang memberikan nilai tambah paling kecil berturut-turut adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,908 milyar, Jasa Perusahaan sebesar 3,277 milyar dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 10,06 milyar.

3. PDRB

Nilai PDRB atas dasar harga konstan, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB per Kapita atas dasar harga konstan, PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28

No	PDRB	Tahun(Jutaan Rupiah)						
		2013	2014	2015	2016	2017		
						Target	Realisasi	Capaian
1.	PDRB-ADHK	7,139,269.25	7,552,749.70	7,953,886.91	8,352,686.97	8,751,487.03	8,818,597.6	100.77%
2.	PDRB-ADHB	8,163,912.6	9,187,759.4	9,875,980.55	10,727,031.2	11,578,081.85	11,724,588.8	101.27%
3.	PDRB per Kapita ADHK	20,82	21,96	23,07	24,17	23.80	25,34	106.47%
4.	PDRB per Kapita	23.78	26.63	28.64	32.77	32.99	33.80	102.46%



	ADHB							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas terlihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB per Kapita atas dasar harga konstan, dan PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku sudah melampaui target yang ditetapkan.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu tahun 2013-2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar berfluktuasi. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi 5,85%, dan pada tahun 2015 menurun 5,31% dan Tahun 2016 turun menjadi 5,01%. Pada tahun 2017, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar diproyeksikan mencapai 5,12%. Pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi Kabupaten Tanah Datar, khususnya aktivitas di bidang pertanian yang dari tahun ke tahun masih menjadi kegiatan ekonomi utama masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.29

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha, 2013 – 2017

No	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017**)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,10	4,87	4,00	1,00	2,59
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,38	6,97	6,90	6,66	4,48
3.	Industri Pengolahan	4,03	4,63	5,00	5,25	2,50
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,66	8,69	8,00	10,05	31,92
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,25	5,89	9,00	5,80	0,65
6.	Konstruksi	11,38	5,76	5,99	7,64	9,74
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,04	7,73	6,99	6,92	7,59
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,25	8,25	7,99	8,45	9,02
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,62	5,97	6,00	7,29	15,10
10.	Informasi dan Komunikasi	12,45	7,82	3,03	9,53	6,34
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,41	6,54	6,99	7,16	6,88
12.	Real Estat	6,49	6,56	6,00	4,68	8,14
13.	Jasa Perusahaan	5,45	5,76	5,99	5,81	6,71



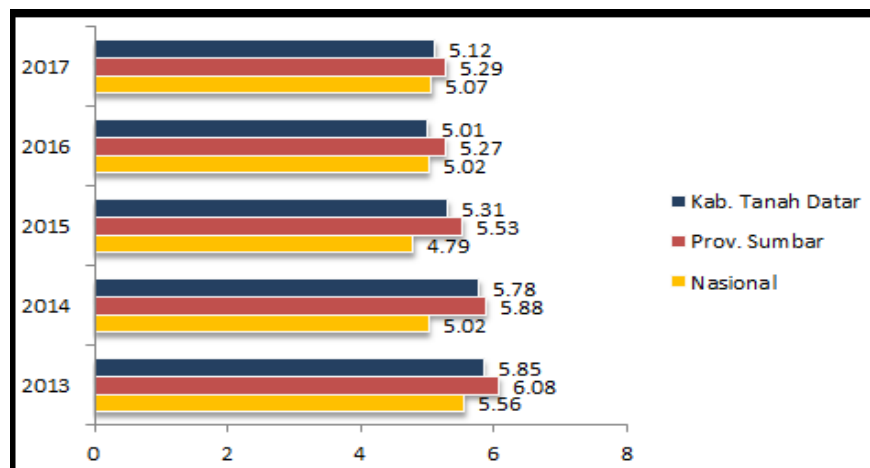
No	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017**)
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,83	2,84	2,99	4,77	2,71
15.	Jasa Pendidikan	8,42	6,32	6,00	8,49	8,98
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,42	7,75	8,00	5,80	6,97
17.	Jasa lainnya	5,40	5,61	6,00	8,79	7,87
	Pertumbuhan Ekonomi	5,85	5,78	5,31	5,01	5,12

Sumber : BPS, Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2017

***) Data sementara

Grafik 2.4

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar dan Nasional, 2013 – 2017



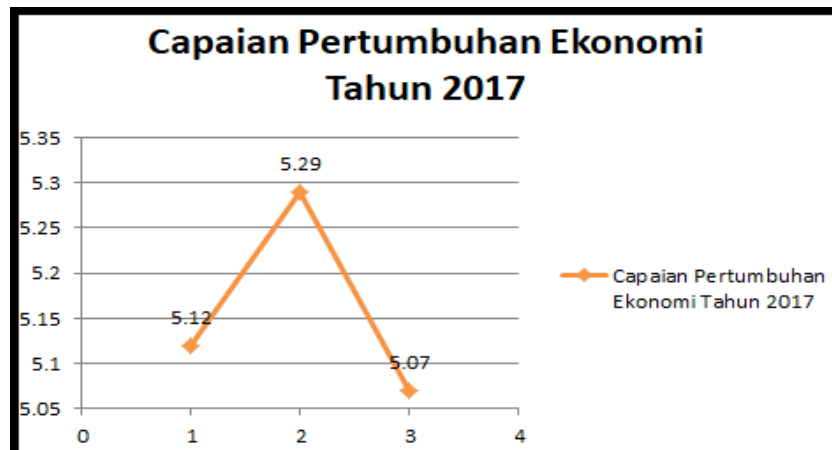
Sumber : BPS Tanah Datar, 2017

Dari grafik 2.4 diatas terlihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 antara target tahun 2017 terealisasi sebesar 90,29%, dimana realisasi pertumbuhan ekonomi 5,12% dari yang ditargetkan sebesar 5,67%.

Perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada tahun 2017 dapat dilihat pada grafik 2.5.

Grafik 2.5



b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kecenderungan kenaikan tingkat harga secara terus menerus dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi dapat ditunjukkan oleh fluktuasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK dilakukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari harga barang/jasa yang akan mencerminkan daya beli masyarakat.

Penghitungan IHK di Provinsi Sumatera Barat hanya dilakukan pada kota Padang dan Bukittinggi. Dengan demikian, kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar secara umum dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada kedua kota tersebut.

Berikut adalah perbandingan inflasi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2013 – 2017 :

Grafik 2.5
Inflasi Tahun 2013 – 2017



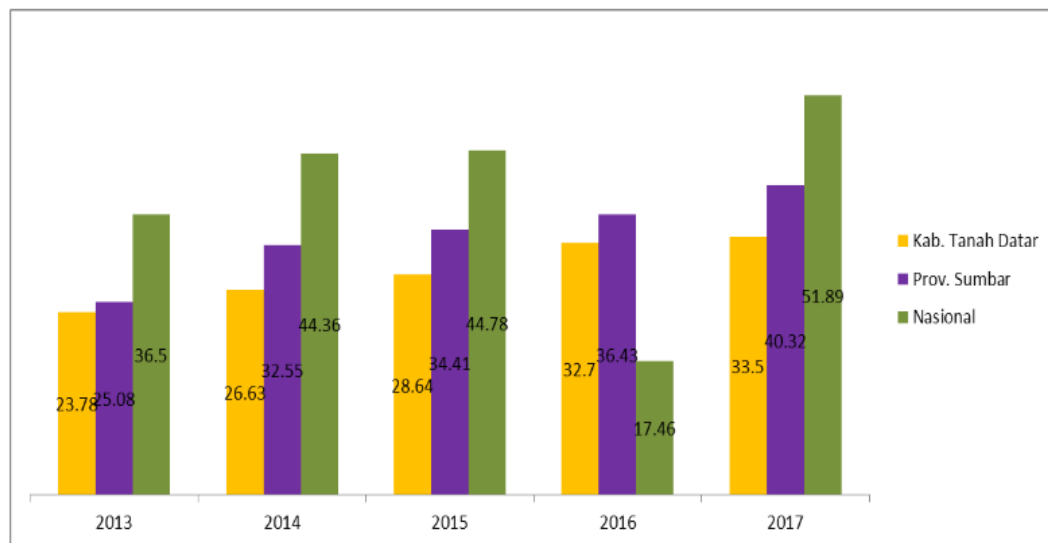
Sumber : Badan Pusat Statistik

c. PDRB Perkapita

Indikator lain yang digunakan sebagai tolok ukur kekuatan ekonomi suatu daerah adalah PDRB perkapita. Secara konseptual PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan dan diterima secara rata-rata oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi.

Pada tahun 2017, PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar mencapai kisaran Rp.33.800.000,- pertahun. Perbandingan PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik 2.6 :

Grafik 2.6
PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
dan Nasional, 2013-2017



Sumber : BPS Tanah Datar

Dari tabel grafik diatas terlihat bahwa pendapatan PDRB perkapita Kabupaten Tanah datar dari Tahun 2013 – 2017 selalu mengalami peningkatan.

d. Indeks Gini

Pemerataan hasil pembangunan sangat erat kaitannya dengan permasalahan kemiskinan. Secara umum semakin lebar jurang pemisah antara penduduk kaya dengan penduduk miskin menandakan kemiskinan semakin meluas dan begitu juga sebaliknya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya adalah *Gini Ratio* atau Indeks Gini, yang membagi kesenjangan atau ketimpangan dalam kriteria:

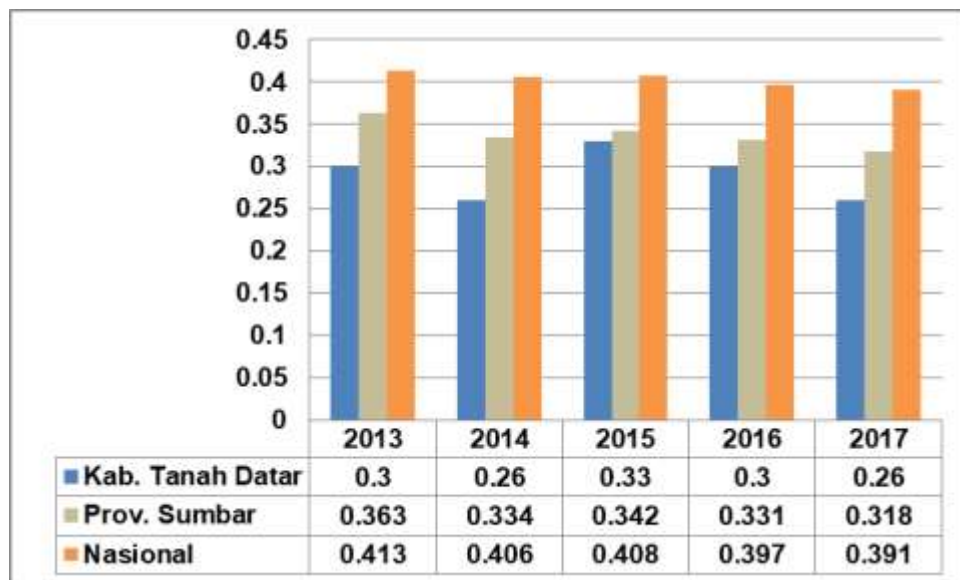
- $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah
- $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang
- $> 0,50$ berarti ketimpangan tinggi

Grafik 2.7 menggambarkan indeks gini Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 – 2017.



Grafik 2.7

Indeks Gini Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Sumber : BPS Kab. Tanah Datar, 2017

*Tahun 2017 Gini Ratio Nasional berdasarkan Rancangan RKP 2019

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Gini Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 dari 0,3 menjadi 0,26 hal ini berarti kesenjangan antar masyarakat penduduk miskin dan kaya rendah dengan kata lain terjadi pemerataan pendapatan.

f. Kemiskinan

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar secara umum menunjukkan tren menurun, dari 5,82% pada tahun 2015 dapat ditekan menjadi 5,56% pada tahun 2017. Namun demikian, angka ini masih jauh di bawah persentase penduduk miskin pada tahun 2014 yang mencapai 5,29%, dan apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, persentase penduduk miskin tahun 2015 – 2017 angkanya di atas target yang ditetapkan, walaupun secara umum masih di bawah angka provinsi.

Tabel 2.30

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Datar 2013 – 2017

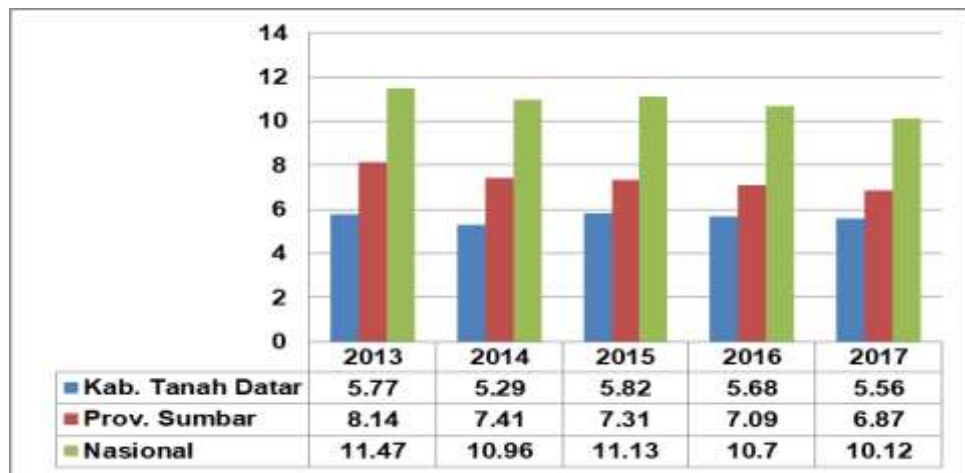
No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
1.	2013	342.864	19.800	5,77
2.	2014	343.875	18.220	5,29



No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
3.	2015	344.828	20.050	5,82
4.	2016	345.706	19.630	5,68
5.	2017	346.578	19.269	5,56

Sumber : BPS Kab. Tanah Datar, 2017

Grafik 2.8
Persentase Penduduk Miskin



Sumber : Badan Pusat Statistik

RKPD Provinsi Sumatera Barat 2019

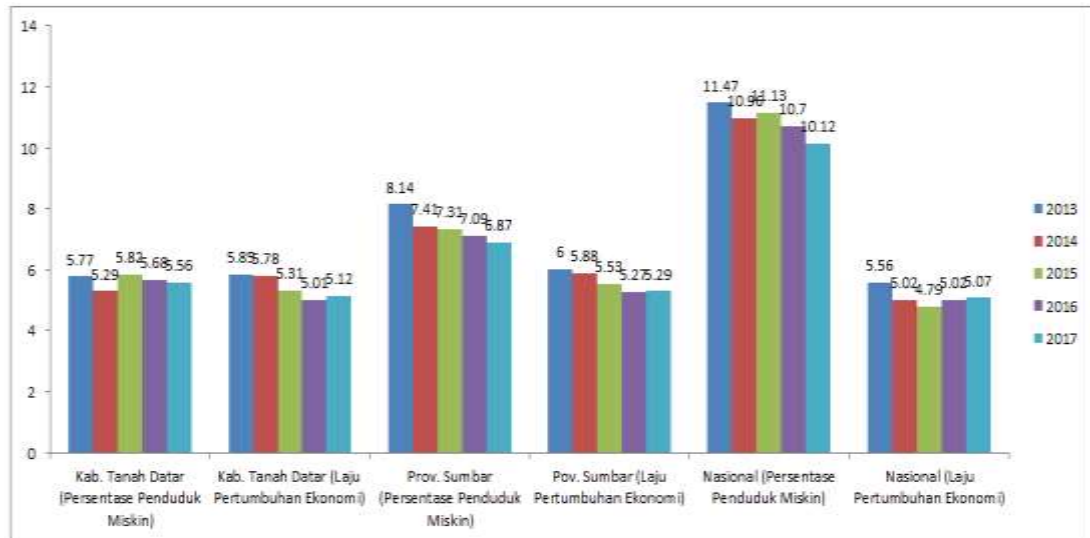
Dari data diatas didapatkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu dari 5,68% menjadi 5,56%.

Walaupun persentase penduduk miskin di Kabupaten tanah Datar mengalami penurunan, namun demikian upaya pengentasan kemiskinan masih perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, program-program untuk masyarakat miskin perlu diupayakan agar dapat dirasakan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Perbaikan distribusi pendapatan, program pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan ekonomi pada masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses perlindungan sosial perlu terus diupayakan.

Adapun perbandingan persentase penduduk miskin dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar dengan Nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.9

Perbandingan persentase Penduduk Miskin dengan Pertumbuhan Ekonomi



Untuk menggambarkan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan tingkat pengangguran terbuka, gini rasio, dan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31

Perbandingan Rasio Perubahan TPT, Perubahan Gini Rasio, dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin dengan Nasional



No	Indikator	Capaian Daerah		Selisih Capaian Daerah	Perbandingan Selisih Capaian Daerah (TPT/GR/TK) dengan pertumbuhan ekonomi	Capaian Nasional		Selisih Capaian Nasional	Perbandingan Selisih Capaian Nasional (TPT/GR/TK), dengan pertumbuhan ekonomi	Rasio
		2016	2017			2016	2017			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pertumbuhan Ekonomi		5.12				5.07			
2	Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	4.02	3.72	-0.3	-0.056	5.61	5.6	-0.01	-0.002	28.590
3	Gini Rasio (GR)	0.3	0.26	-0.04	-0.008	0.397	0.391	-0.006	-0.001	6.353
4	% Penduduk Miskin	5.68	5.56	-0.12	-0.023	10.7	10.12	-0.58	-0.114	0.197

Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan ekonomi berdampak positif pada perubahan tingkat pengangguran terbuka. Selain itu juga berdampak positif pada gini ratio serta berdampak positif pada persentase penduduk miskin.

Capaian Kabupaten Tanah Datar terhadap rasio perubahan TPT, rasio perubahan gini ratio dan rasio perubahan persentase penduduk miskin lebih baik dibandingkan capaian nasional.

3.1.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator diantaranya: angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan dan rasio penduduk yang bekerja.

Secara umum kesejahteraan sosial dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator angka melek huruf. IPM adalah suatu indeks komposit yang mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Indeks ini mencakup tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Menurut UNDP, indeks ini dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak.

1. Pendidikan

Perkembangan pembangunan bidang pendidikan antara lain dapat dilihat dari Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi murni.

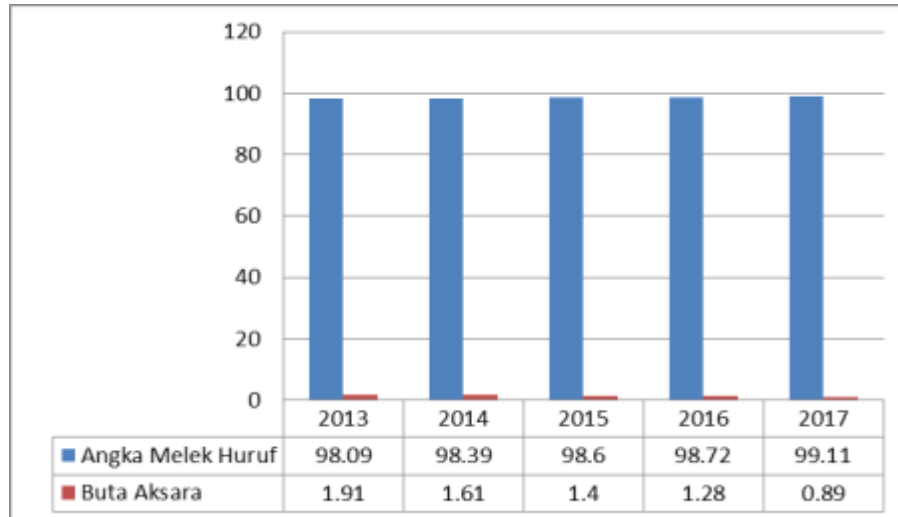
a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanah Datar sudah tinggi dan mengalami peningkatan ssetiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa program-program pemberantasan buta huruf sudah berhasil dilaksanakan seperti belajar paket A, B dan C serta program penunjang kinerja seperti kelompok kegiatan belajar masyarakat. Angka melek huruf ini juga menunjukkan kemampuan penduduk Kabupaten Tanah Datar dalam menyerap informasi dari berbagai media yang mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus konstribusi terhadap pembangunan

daerah. Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada grafik 2.10 :

Grafik 2.10

Angka Melek Huruf dan Buta Aksara 2013 – 2017

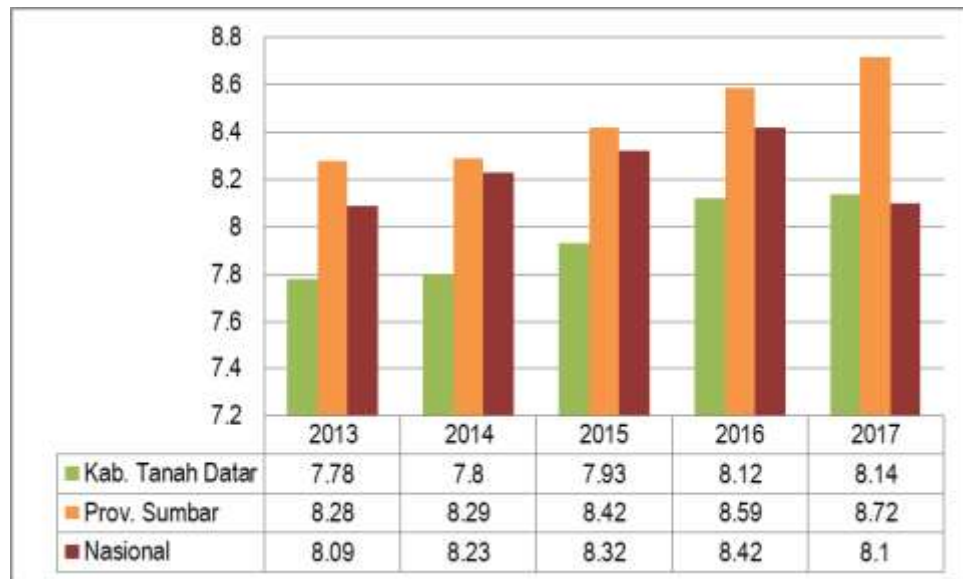


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2017)

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang dijalani. Indikator RLS dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 sebesar 8,14 tahun, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan di Kabupaten Tanah Datar tidak tamat SMP/MTs atau hanya sampai kelas 2 SMP/MTs. Perkembangan rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada grafik 2.11 :

Grafik 2.11
Angka Rata-rata Lama Sekolah, 2013 – 2017



Sumber: BPS Tahun 2017

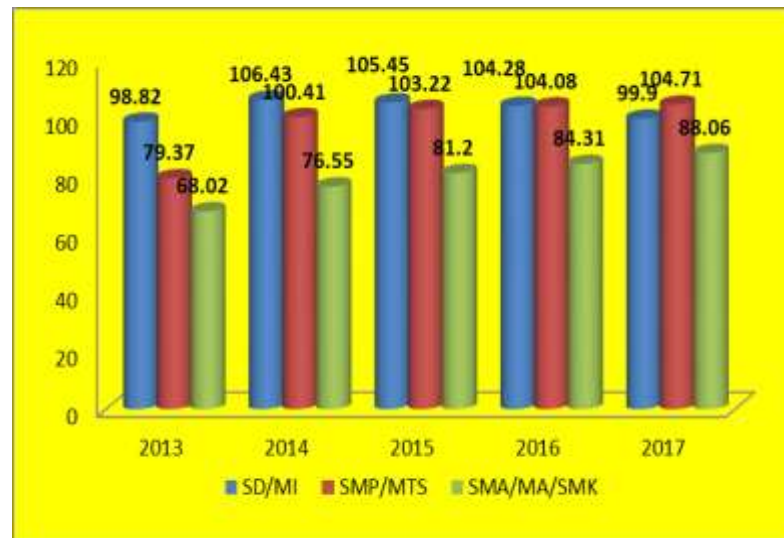
Rata-rata lama sekolah pada setiap tahun terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil dengan baik meskipun kenaikannya belum mencapai rata-rata 9 tahun.

c. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan yang merupakan indikator yang paling sederhana untuk mendukung daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan angka partisipasi kasar di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada grafik 2.12:

Grafik 2.12
Angka Partisipasi Kasar (APK), 2013 – 2017



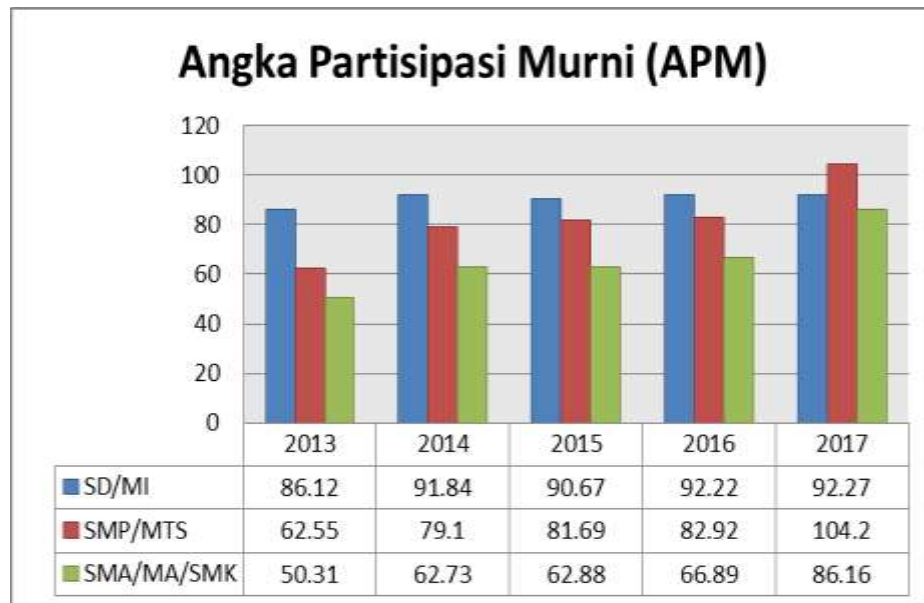
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2017)

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK pada tahun 2017 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan dari 104,28% pada tahun 2016 menjadi 99,90% pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh siswa yang berada di perbatasan cenderung bersekolah ke daerah tetangga yang mutu pendidikannya lebih baik karena merupakan sekolah *boarding school* (sekolah percontohan) serta adanya kebijakan pembatasan usia masuk sekolah dan berkurangnya jumlah anak yang tinggal kelas.

d. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 s.d 18 tahun yang mendaftar pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 s.d 18 tahun. Angka partisipasi murni menunjukkan angka partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu yang merupakan indikator daya serap yang lebih baik. Pada grafik dibawah ini dapat terlihat bahwa angka partisipasi murni meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Grafik 2.13
Angka Partisipasi Murni (APM), 2013 – 2017



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2017)

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2013-2017 secara umum telah mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, penyuluhan serta peningkatan keterampilan petugas kesehatan melalui asuhan persalinan normal dan juga pemberian bantuan berobat keluarga miskin melalui program dan kegiatan Jamkesmas dan Jamkesda.

Kinerja pembangunan kesehatan dapat dilihat pada beberapa indikator diantaranya Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Usia Harapan Hidup.

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi yaitu jumlah kematian bayi dalam satu tahun dibagi dengan jumlah bayi yang lahir dalam satu tahun. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Tanah Datar berfluktuasi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik 2.14 dibawah ini :

Grafik 2.14
Angka Kelangsungan Hidup Bayi, 2013 – 2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar (2017)

Dari grafik diatas terlihat bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2017 terjadi peningkatan Angka kelangsungan hidup bayi dimana hal ini dipengaruhi oleh multi faktor antara lain penyakit infeksi, berat badan lahir rendah, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan lain-lain.

b. Angka Usia Harapan Hidup

Untuk menilai kinerja pembangunan kesehatan salah satunya dapat dilihat pada indikator Umur Harapan Hidup sebagaimana tergambar pada grafik 2.15 :

Grafik 2.15
Umur Harapan Hidup, 2013 – 2017



Sumber: BPS Tahun 2017

Dari grafik di atas terlihat Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Tanah Datar selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu 68,28 pada tahun 2013 menjadi 69,11 tahun pada tahun 2017. Dengan kata lain, upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah berhasil dilaksanakan dalam bentuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas antara lain pelayanan preventif (pengendalian kesehatan lingkungan, pengawasan obat tradisional, pencegahan penyakit menular dan tidak menular) dan pelayanan promotif (PHBS) dan meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit (kuratif dan rehabilitatif).

3. Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan indikatornya dapat dilihat dari rasio penduduk yang bekerja yaitu perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja.

a. Rasio Penduduk yang Bekerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Penambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap penambahan angkatan kerja.

Tabel 2.31
Jumlah Angkatan Kerja, 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas	240.066	245.168	245.168	249.882	249.882



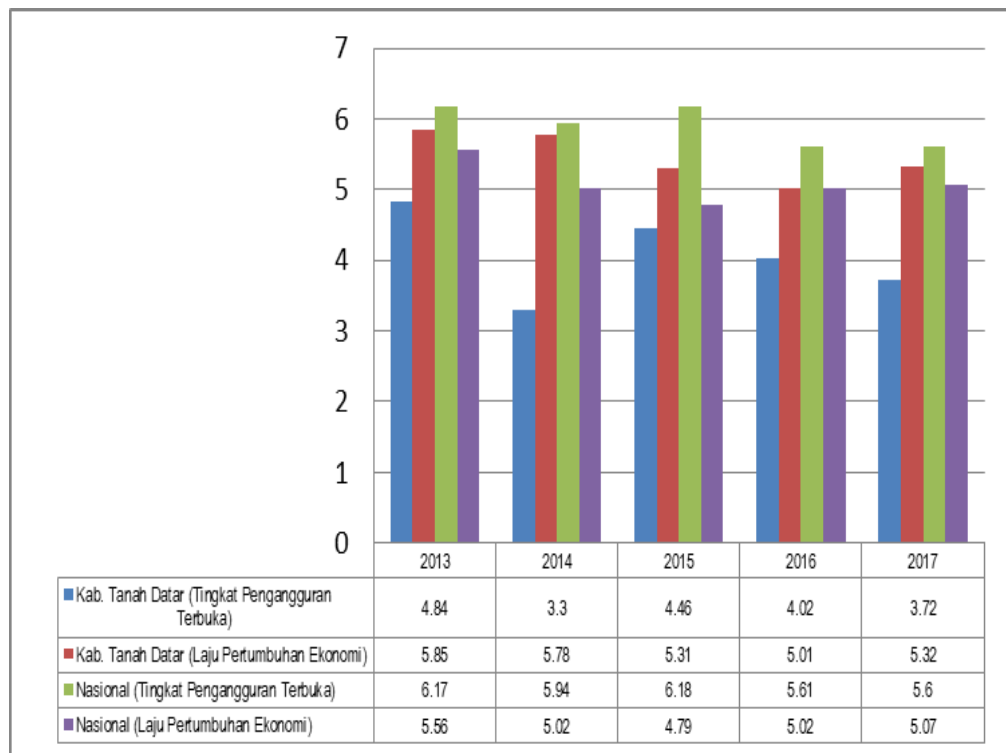
No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2	Angkatan Kerja	172.722	167.911	167.911	153.984	153.984
	- Bekerja	164.359	162.375	162.375	147.874	147.874
	- Pengangguran	8.363	5.536	5.536	6.189	6.189
3	Bukan Angkatan Kerja	67.614	82.793	82.793	95.898	95.898
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	71,95	68,49	68,49	61,64	61.64
5	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)/Rasio penduduk yang bekerja %	95,16	96,70	96,70	96,00	96.00
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,84	3,30	4,46	4,02	3,72

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka (Data Diolah, 2017)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas terus meningkat, Tahun 2016 Tingkat pengangguran terbuka 4,02% sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 3,72%, ini berarti angkatan kerja yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan yang masih mencari pekerjaan atau menganggur.

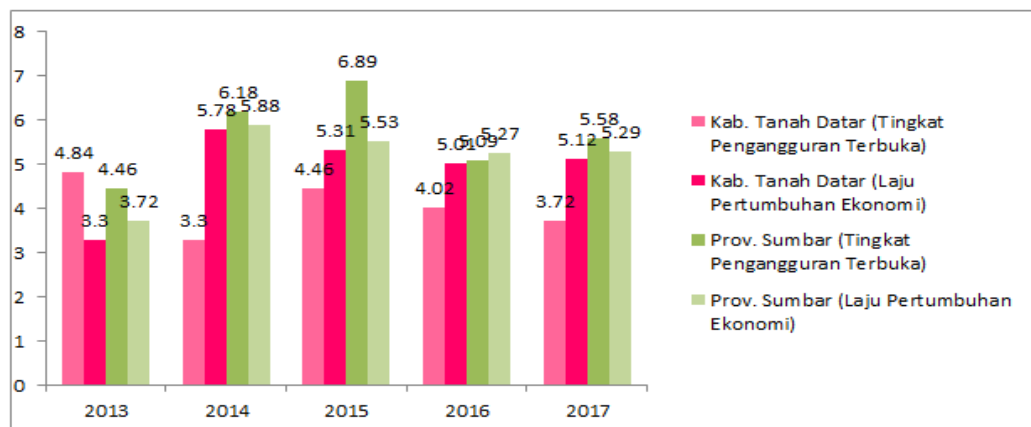
Perbandingan TPT dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar dengan nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.16
Perbandingan TPT dengan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Tanah Datar dengan Nasional



Selanjutnya jika Perbandingan TPT dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.17
Perbandingan TPT dengan Pertumbuhan Ekonomi

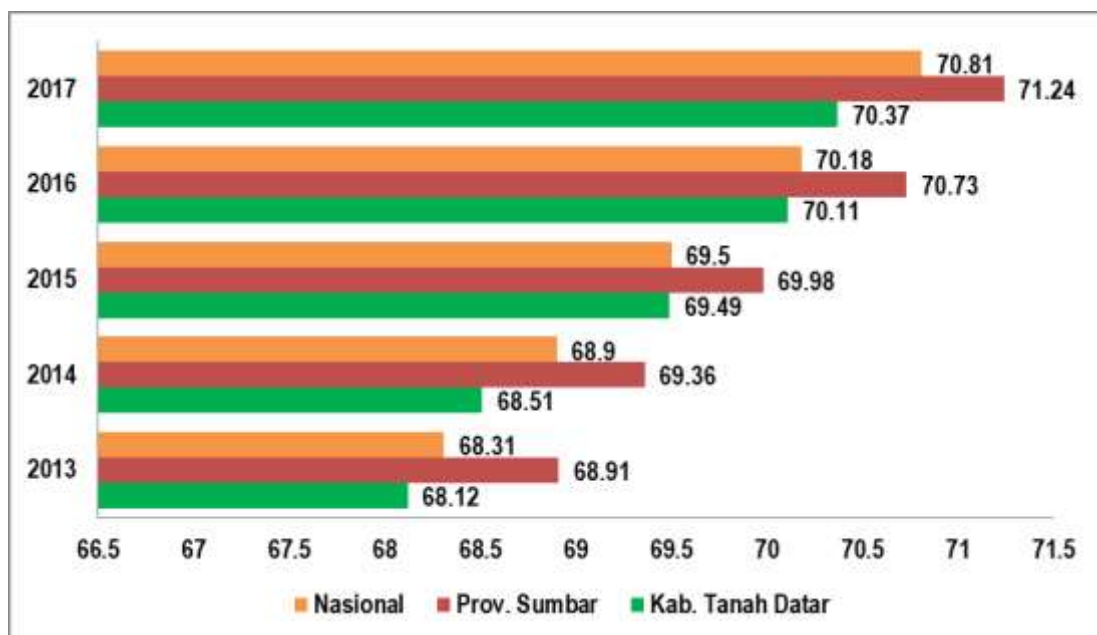


Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Datar dalam waktu 5 tahun terakhir lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks standar hidup layak. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel 2.32 :

Grafik 2.18
IPM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional,
2013 – 2017



Tabel 2.32
Target dan Realisasi IPM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 – 2017

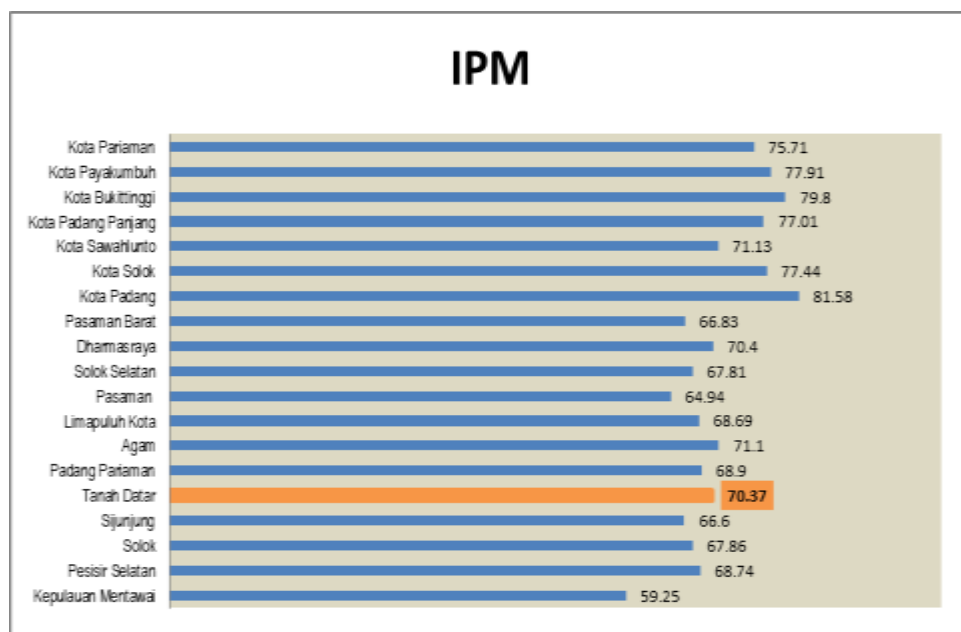
IPM Kabupaten Tanah Datar	2013		2014		2015		2016		2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	68	68,12	68,30	68,51	69,35	69,49	69,42	70,11	69,82	70,37

Kategori *Human Development Index reduction short fall* :

1. Sangat lambat jika $< 1,3$
2. Lambat jika $1,3 - 1,5$
3. Menengah jika $1,5 - 1,7$
4. Cepat jika $> 1,7$

Pertumbuhan IPM tahun 2016 – 2017 adalah 0,27 atau masuk kategori sangat lambat. Perbandingan IPM Tahun 2017 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat IPM dapat dilihat pada grafik 2.15 ini :

Grafik 2.19
IPM Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat



3.1.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Peranan pemuda sebagai aset untuk percepatan pembangunan, sangat tergantung pada kualitas sumber daya pemuda. Generasi muda yang memiliki kualitas, dedikasi, kapabilitas dan kredibilitas merupakan faktor dominan bagi

pembangunan di Kabupaten Tanah Datar, sebaliknya kualitas yang rendah dan tidak memiliki kreatifitas, dan daya saing akan menjadi beban bagi pembangunan. Dengan dasar pemikiran tersebut maka diperlukan usaha – usaha dari berbagai pihak dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya generasi muda, termasuk didalamnya kebijakan dan program pemerintah yang mengarah pada pemberdayaan generasi muda dan organisasi kepemudaan.

Kepeloporan di bidang kepemudaan adalah suatu karya nyata bagi unsur pemuda untuk mengatasi permasalahan kualitas sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya adalah pengembangan teknologi, metodologi, dan managerial yang bermanfaat bagi masyarakat. Kepeloporan pemuda dituntut untuk dapat melakukan terobosan-terobosan yang dapat memberikan kontribusi sebagai upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pemuda itu sendiri dan negaranya.

Fokus Seni Budaya dan Olahraga dapat dilihat dari indikator Kebudayaan dan Indikator Pemuda dan Olahraga.

a. Perkembangan Seni dan Budaya

Pembinaan terhadap perkembangan seni budaya dan olahraga dapat dilihat dari jumlah grup kesenian dan jumlah sarana olah raga sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.33 :

Tabel 2.33

Jumlah dan Jenis Grup Kesenian Yang Aktif, 2013 – 2017

No	Grup Kesenian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tradisional	146	146	150	150	150
	- Randai	39	39	42	42	42
	- Talempong	39	39	40	40	40
	- Pencak Silat	7	7	7	7	7
	- Tari Rakyat	22	22	22	22	22
	- Saluang Rabab	39	39	39	39	39
2	Non Tradisional	120	120	120	120	120
	- Band	8	8	8	8	8
	- Rebana	47	47	47	47	47
	- Drama	1	1	1	1	1
	- Salawat Dulang	64	64	64	64	64
	Jumlah	266	266	270	270	270

Sumber : Dinas Budparpora Kabupaten Tanah Datar (2017)

Dari tabel di atas terlihat bahwa perkembangan jumlah grup kesenian tradisional pada tahun 2017 tidak mengalami peningkatan begitu juga dengan jumlah grup kesenian non tradisional tidak mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari aktif tidaknya grup kesenian tersebut mengikuti lomba kesenian tradisional yang diadakan di tingkat kabupaten. Disamping itu belum semua grup kesenian yang ada di Kabupaten Tanah Datar terpublikasi.

b. Perkembangan Olahraga

Jumlah sarana dan prasarana olahraga sebagai penunjang kegiatan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada table 2.34 :

Tabel 2.34
Jumlah Sarana Olah Raga, 2013 – 2017

No	Sarana Olahraga	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sepak Bola	100	100	101	101	101
2	Bola Volley	200	200	209	209	209
3	Bulutangkis	88	88	88	88	88
4	Sepak Takraw	117	117	117	117	117
5	Tenis Lapangan	5	5	5	5	5
6	Bola basket	37	37	37	37	37
7	Panjat Tebing	1	2	2	2	2
8	Kolam Renang	3	3	3	3	3
	Jumlah	551	552	562	562	562

Sumber : Dinas Budparpora Kabupaten Tanah Datar (2017)

Dari tabel di atas terlihat jumlah sarana olah raga di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013 mengalami peningkatan terutama sarana olahraga sepak bola dan bola volley. Pelaksanaan turnamen sepak bola dan bola volley antar nagari yang rutin menjadi agenda Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan beberapa turnamen bersifat non-reguler. Hal ini menjadi salah satu pendorong meningkatnya jumlah sarana olahraga tersebut, disamping minat masyarakat untuk memanfaatkan sarana olahraga dari tahun ke tahun sudah optimal.



3.1.2. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran kondisi Kabupaten Tanah Datar pada aspek pelayanan umum dijabarkan dalam Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar dan Layanan Urusan Pilihan. Pemerintah sebagai aparat pelayanan masyarakat wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat berwujud pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada urusan wajib dan urusan pilihan sebagai bentuk profesionalisme.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Pasal 409 UU No. 23 Tahun 2014) hal ini berdampak pada pembagian pengurusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk bidang kehutanan.

3.1.2.1. Layanan Urusan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan *Layanan Urusan Wajib* meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2017 yang menyangkut urusan wajib, maka telah dialokasikan pembiayaannya melalui APBD Tahun Anggaran 2017.

Kebijakan Umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada satu Tahun Anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kabupaten Tanah Datar.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan beserta anggaran belanja langsung urusan, baik wajib maupun pilihan (tidak termasuk belanja langsung program umum/rutin Perangkat Daerah) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2018, akan diuraikan berdasarkan pembagian urusan dimana beberapa urusan yang ditangani oleh beberapa Perangkat Daerah.

Program umum/rutin Perangkat Daerah merupakan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kewenangan Perangkat Daerah, baik urusan wajib ataupun pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

a. Urusan Pendidikan

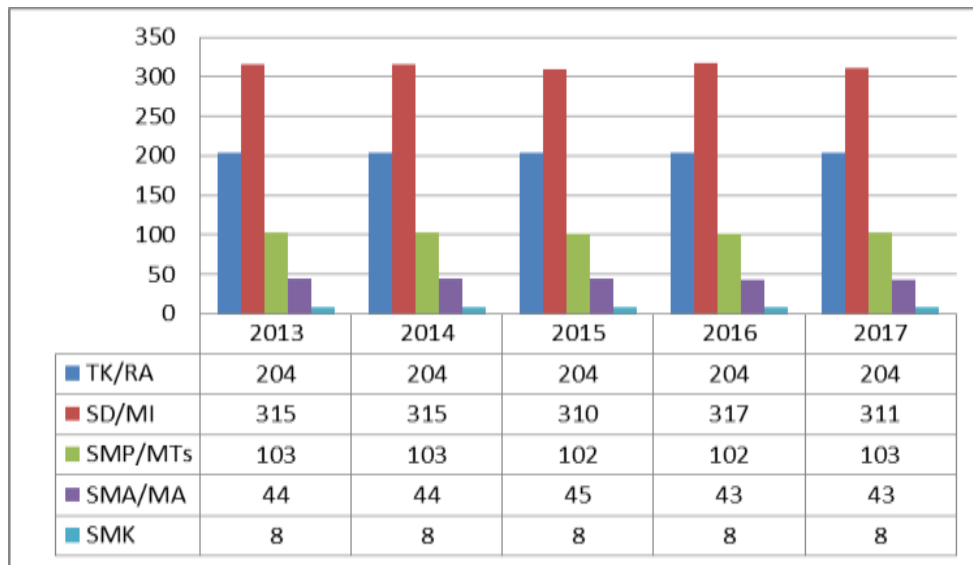
Penyelenggaraan Urusan Pendidikan ditujukan untuk meningkatnya perilaku positif *stakeholder* dibidang pendidikan, meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan dan meningkatnya mutu layanan dan lulusan serta tata kelola pendidikan. Pelaksanaan program dibidang pendidikan diharapkan juga mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanah datar cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan nilai - nilai kearifan lokal.

Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Tanah Datar, dukungan sumberdaya manusia menjadi bagian yang sangat penting, maka tuntutan dan tanggung jawab untuk terus memajukan kondisi pendidikan di Kabupaten Tanah Datar semakin meningkat.

1) Fasilitas Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tanah Datar perlu didukung dengan fasilitas yang memadai, dapat dilihat pada grafik 2.20 :

Grafik 2.20
Perkembangan Jumlah Sekolah, 2013 – 2017



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar (2017)

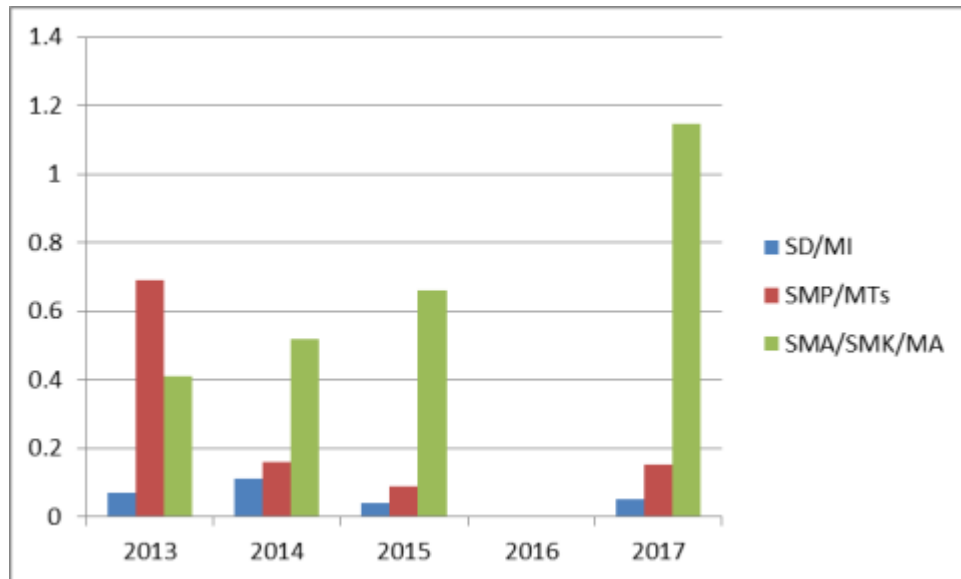
Dari Grafik 2.15 terlihat bahwa jumlah TK/RA yang terjadi pada tahun 2013 – 2017 tetap atau tidak terjadi penambahan maupun pengurangan. Perkembangan jumlah fasilitas pendidikan untuk jenjang pendidikan SD/MI dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah sekolah SD/MI. Sedangkan jumlah SMP/MTs pada tahun 2013 – 2017, terjadi penurunan 1 (satu) unit sekolah pada tahun 2013, namun pada tahun 2017 jumlah SMP/MTs kembali menjadi 103 unit.

Jumlah SMA/MA pada tahun 2013 - 2017 mengalami penurunan menjadi 43 unit tahun 2016. Sedangkan jumlah SMK pada tahun 2013-2014 tidak mengalami perubahan.

2) Angka Putus Sekolah

Salah satu indikator untuk menilai kinerja pendidikan yaitu angka putus sekolah adalah jumlah siswa yang drop out dibandingkan dengan seluruh siswa yang ada di sekolah.

Grafik 2.21
Angka Putus Sekolah, 2013 – 2017



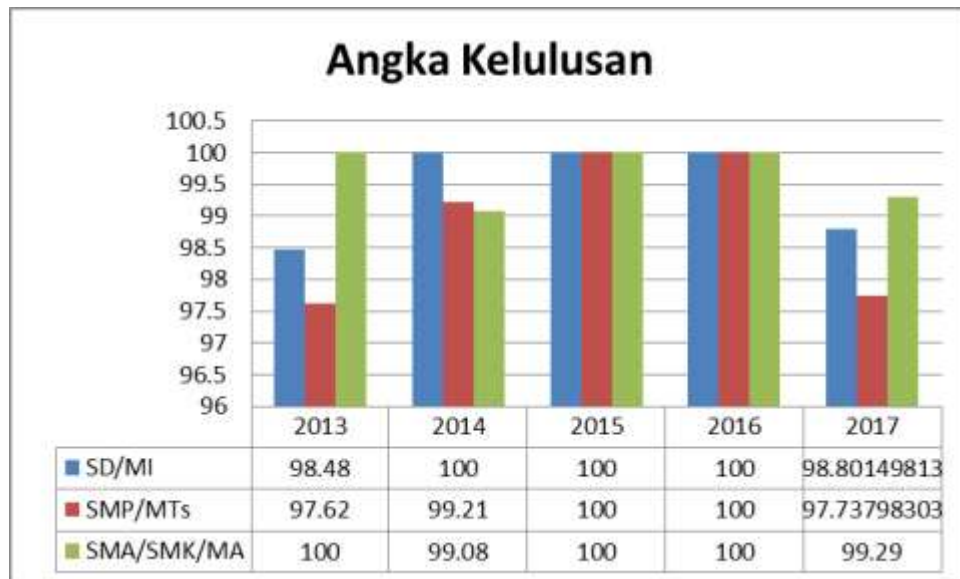
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2017)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan mengalami fluktuasi, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA menjadi 0% pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 berturut-turut menjadi 0,05% untuk SD/MI, 0,15% untuk SMP/MTS dan 1,14% untuk SMA/MA/SMK. Angka putus sekolah paling tinggi untuk tingkat SMP/MTs terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 0,69%. Sementara untuk jenjang SMA/SMK/MA, angka putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang angkanya mencapai 1,14%.

3) Angka Kelulusan

Persentase siswa lulus ujian nasional tahun 2016 untuk seluruh jenjang pendidikan telah menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu seluruh siswa mampu lulus ujian nasional 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanah Datar cukup berhasil dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Hal ini terbukti dengan Kabupaten Tanah Datar menjadi pengelola pendidikan terbaik selama 4 tahun berturut-turut. Namun pada tahun 2017 terdapat siswa yang tidak lulus ujian nasional meskipun tidak banyak.

Grafik 2.22
Angka Kelulusan, 2013 – 2017



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar (2017)

Adapun jumlah siswa yang diterima di Perguruan Tinggi meningkat dari tahun 2015 dari 51,36% menjadi 54,24% tahun 2016. Hal ini sebanding dengan prestasi yang diterima Kabupaten Tanah Datar sebagai pengelola pendidikan terbaik di Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel 2.35 :

Tabel 2.35

Persentase Siswa SMA/SMK/MA Diterima di Perguruan Tinggi Negeri,
2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1	Jumlah siswa lulus SMA/SMK/MA	3.912	4.081	4.081	4.272	4.269
2	Jumlah siswa yang diterima di PTN	2.129	2.096	2.096	2.317	2.317
3	Persentase	54,44	51,36	51,36	54.24	54.24

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, 2017

*angka sementara

4) Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah SD/MI ke SMP/MTs kabupaten Tanah Datar lebih tinggi dari Angka melanjutkan sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah



untuk membuat terobosan agar Angka melanjutkan sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK menjadi lebih tinggi.

Tabel 2.36

Angka Melanjutkan Sekolah 2013 – 2017

No	Angka Melanjutkan Sekolah	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI ke SMP/MTs	106.97	106.51	104.89	103,51	102,44
2	SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	91.05	83.77	89.03	87,70	84,33

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, 2017

5) Rasio Guru/Murid

Jumlah Rasio Guru/Murid di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada Tabel 2.37 :

Tabel 2.37

Rasio Guru/Murid 2013 – 2017

No	Rasio Guru/Murid	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	0.08	0.08	0.07	0,8	0,07
2	SMP/MTs	0.13	0.11	0.11	0,11	0,11
3	SMA/SMK/MA	0.13	0.11	0.21	n/a	n/a

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, 2017

n/a=data tidak tersedia

6) Rasio Guru/ Murid per kelas rata-rata

Tabel 2.38

Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata 2013 – 2017

No	Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	0.04	0.04	0.03	0,037	0,04
2	SMP/MTs	0.19	0.17	0.21	0,12	0,11
3	SMA/SMK/MA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, 2017

n/a=data tidak tersedia

7) Guru yang memenuhi kualifikasi D-IV/S1

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru bahwa seorang guru harus memiliki ijazah atau kualifikasi akademik S1 atau D4. Untuk menyikapi undang-undang tersebut pemerintah Kabupaten Tanah Datar setiap tahun memprogramkan peningkatan kualitas guru sehingga diharapkan secara bertahap, guru-guru di Kabupaten Tanah Datar telah memiliki kualifikasi pendidikan sarjana.

Jumlah guru yang berkualifikasi S1 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum dapat memenuhi harapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru yaitu paling lambat pada tahun 2015 semua guru sudah berkualifikasi S1. Hal ini disebabkan antara lain karena jika semua guru yang belum berpendidikan S1 direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan S1, maka akan menghambat proses belajar mengajar dan sekolah-sekolah akan kekurangan guru. Selain itu masih banyak guru yang belum berpendidikan S1 akan memasuki masa pensiun sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti S1. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kemampuan guru dan kualifikasi pendidikan guru dalam mengajar sehingga diharapkan setiap tingkat memiliki guru yang layak mengajar.

Grafik 2.23

Kualifikasi Guru D-IV/S1, 2013-2017



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2017)

b. Kesehatan

Penyelenggaraan urusan kesehatan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

secara optimal. Sehat selain sebagai salah satu hak dasar manusia, juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang bersama faktor pendidikan dan ekonomi menjadi ukuran untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di pihak lain, sehat mulai dari janin dalam kandungan, anak balita, remaja, dewasa dan usia lanjut juga perlu diupayakan dan diperjuangkan. Upaya pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan diantaranya dengan peningkatan upaya Promosi Kesehatan, Budaya hidup bersih dan sehat, penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial lainnya serta peningkatan SDM bidang kesehatan yang trampil dan professional dibidangnya.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: perilaku, lingkungan, sosial budaya, dan fasilitas kesehatan serta peran serta masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelayanan urusan kesehatan pada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya meningkatkan capaian derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2016-2021 tolok ukur pencapaian target kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Tanah Datar dapat dicermati dalam indikator yang telah ditetapkan, dengan target pencapaian sebagai berikut:

Diantara beberapa ukuran kesehatan yang ada, indikator yang digunakan untuk melihat taraf kesehatan penduduk adalah:

1) Angka Kematian (mortalitas)

Indikator untuk menilai derajat kesehatan antara lain angka kematian ibu (AKI), angka kematian neonatal, angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA).

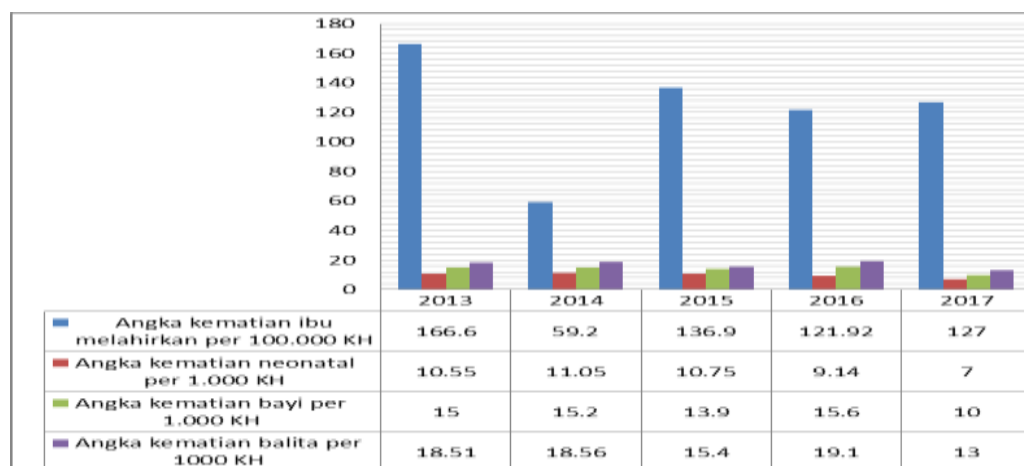
Angka Kematian Ibu Melahirkan pada tahun 2016 terjadi penurunan bila dibandingkan tahun 2015 namun ditahun 2017 mengalami kenaikan. Angka Kematian Neonatal adalah angka kematian yang terjadi dari hari pertama melahirkan sampai rentang waktu 28 hari sejak kelahiran. Angka Kematian Neonatal dan Angka Kematian Bayi dari tahun 2013-2017 berfluktuasi. Demikian juga halnya dengan angka kematian balita yang angkanya juga berfluktuasi setiap tahun.

Hal ini dipengaruhi oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, seperti peningkatan keterampilan petugas dalam bentuk asuhan persalinan normal (APN) yang wajib diikuti oleh setiap petugas kesehatan yang menolong persalinan, pemasangan stiker (P4K) pada rumah ibu hamil untuk mendeteksi resiko dan akses ibu hamil ke fasilitas kesehatan serta penggunaan buku KIA secara tepat dan benar untuk memberikan informasi tentang kehamilan dan balita.

Perkembangan indikator-indikator tersebut di atas dapat dilihat pada grafik 2.24 :

Grafik 2.24

Angka Kematian (Mortalitas), 2013-2017

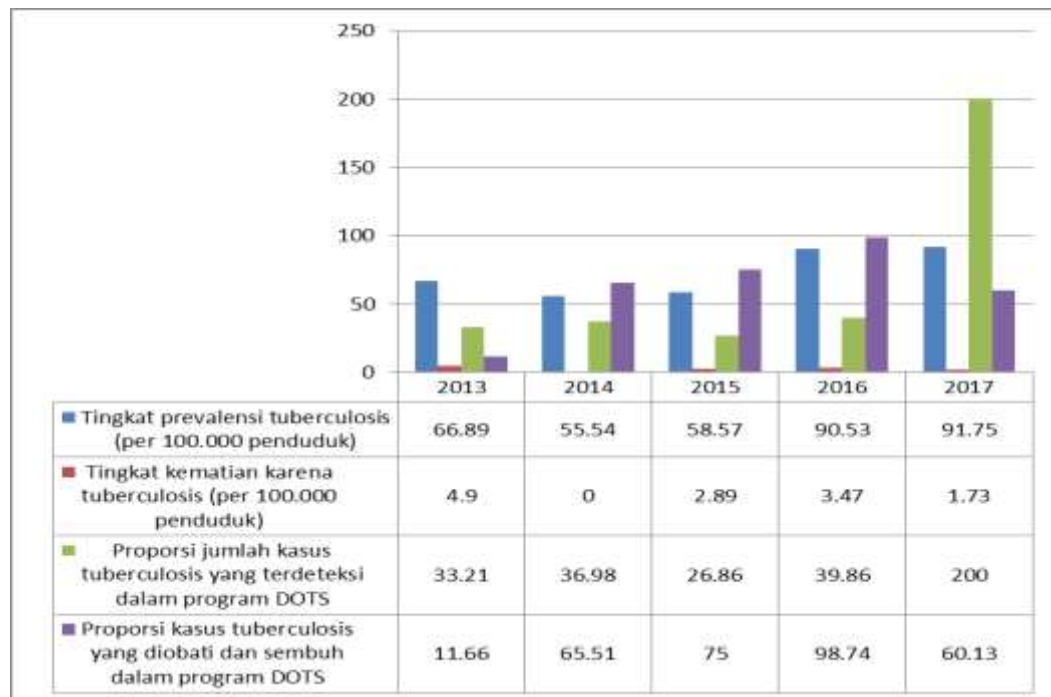


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar (2017)

2) Angka Kesakitan (morbiditas)

Adapun indikator lain untuk menilai derajat kesehatan yaitu angka kesakitan yang dilihat dari kejadian penyakit menular yang dapat dilihat pada grafik 2.25 :

Grafik 2.25
Angka Kesakitan (Morbiditas), 2013-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar (2017)

Penyakit Tuberculosis merupakan penyakit menular yang apabila tidak diobati beresiko 50% berakibat pada kematian. Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) pada tahun 2017 mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 91,75% dengan tingkat kematian sebesar 1,73%. Strategi penanggulangan penyakit Tuberculosis dilakukan melalui pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung (*Directly Observed Treatment Short-course/DOTS*). Adanya peningkatan proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi Program DOTS pada tahun 2017, juga mempengaruhi peningkatan jumlah pasien yang dapat disembuhkan dan diobati dalam Program DOTS.

3) Status Gizi

Adapun indikator lain yang dipakai untuk menilai derajat kesehatan masyarakat yaitu status gizi dengan indikator output cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan, dapat dilihat pada tabel 2.39 :



Tabel 2.39

Cakupan Gizi Balita Buruk Mendapat Perawatan, 2013 - 2017

KEGIATAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar (2017)

Dari tabel diatas terlihat bahwa sudah semua balita gizi buruk mendapat perawatan. Hal ini menunjukkan bahwa semua balita gizi buruk sudah ditangani oleh dinas kesehatan dan jajarannya.

1) Rekapitulasi Indikator Layanan Wajib Bidang Kesehatan

Tabel 2.40

Indikator Layanan Wajib Bidang Kesehatan, 2013 – 2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	15	15.2	13.9	8.1	6.1
2.	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	18.51	18.56	15.4	10.7	9.3
3.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	9	11	11	6.5	5.1
4.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	166.6	59.2	136.9	93.3	9.3
5.	Rasio posyandu per satuan balita	49.54	18.17	22.40	23.00	23.68
6.	Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per satuan penduduk	2.75	2.74	2.73	2.73	2.72
7.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0.067	0.067	0.067	0.067	0.066
8.	Rasio Pustu per satuan penduduk	0.195	0.195	0.194	0.194	0.193
9.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	2.488	2.481	2.474	2.470	2.461
10.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
11.	Rasio Dokter per satuan penduduk	0.260	0.259	0.223	0.223	0.222
12.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1.353	1.387	1.412	1.410	1.405
13.	Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani	106.4	100	100	73.9	82.83
14.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	96.8	84.2	73	71.8	82.25



No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	kebidanan					
15.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	85.6	85.75	82	64.3	73.4
16.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
17.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar Indonesia 2.100 kkal/perkapita/hari)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
18.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	89,0	87.9	76.3	63.5	62.9
19.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	33%	67%	33%	67%	100%
20.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	24,7	26,7	29,7	22,8	22.9
21.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	47.79	37	100	41,8	48,78
22.	Tingkat prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk	160	160	160	160	467
23.	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	6,7	5,5	5	0.8	1.73
24.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100%	100%	100%	100%	100%
25.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	60%	58%	70%	70%	56.96
26.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	100	100	100	69	91.75
27.	Penderita diare yang ditangani	100	100	100	100	100
28.	Angka kejadian malaria	10	21	40	22	0
29.	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0
30.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
31.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
32.	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003
33.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
34.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS					
35.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	98.78	37.6	4.9	5.58
36.	Cakupan kunjungan bayi	103.6	92.8	79.4	73,2	90.4
37.	Cakupan puskesmas	164.29	164.29	164.29	164.29	164.29
38.	Cakupan pembantu puskesmas	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33
39.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	78	82.7	72.4	70,6	79,7
40.	Cakupan pelayanan nifas	86	83	71.4	71.2	85,25
41.	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	106.4	100	100	100	100
42.	Cakupan pelayanan anak balita	67	90.8	48.64	47.7	51.4
43.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100	100
44.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	97.6	97.3	100	100	100
45.	Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100
46.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	95.46	115.38
47.	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar (2017)

n/a=data tidak tersedia

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada dasarnya Urusan Pekerjaan Umum dengan tolok ukur dukungan infrastruktur berupa sarana dan prasarana fasilitas jalan/jembatan turut berperan dalam keberhasilan pembangunan bidang ekonomi di suatu daerah. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar permukiman merupakan modal penting masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. Sedangkan pengembangan prasarana irigasi ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan air untuk kepentingan persawahan.

Indikator pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya sebagaimana tergambar pada tabel 2.41:

Tabel 2.41
Indikator Fokus Layanan Wajib Bidang Pekerjaan Umum

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	53,01	50,14	52,85	42,73	57,41
2.	Panjang jalan dilalui Roda 4	0,0036	0,0037	0,0038	0,0037	0,0041
3.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	100	100	100	100	100
4.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	706,31	670,38	744,10	642,3	862,95
5.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	45,8	62,62	75,44	76,30	76,30
6.	Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak	59,1	65,56	70	78,6	78,6
7.	Jumlah irigasi dalam kondisi baik (DI)	950	993	1.051	415	65,00
8.	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk per 1.000 penduduk	n/a	0,003	0,0027	0,0025	0,0025
9.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	4,43	4,42	4,51	4,67	4,67

Sumber : Dinas PUPRP, Dinas Perkim LH

n/a=data tidak tersedia

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jalan merupakan salah satu elemen perhubungan yang dominan digunakan dan dimanfaatkan oleh penduduk, keberadaan jalan memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah dimana fungsinya sebagai penghubung dan memberikan akses dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian, industri, pariwisata, pendidikan dan kesehatan.

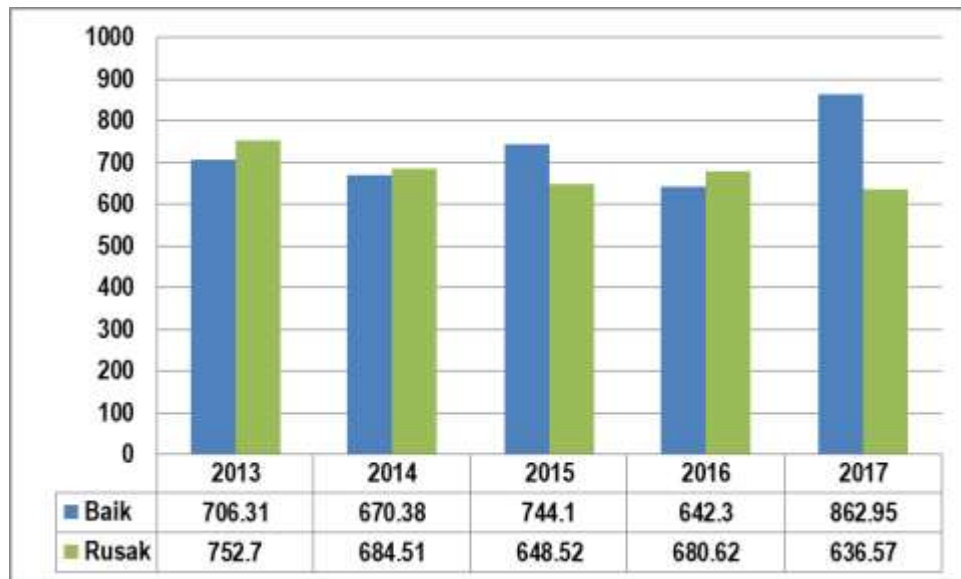
Secara keseluruhan panjang jalan yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah 1.695,60 Km yang terdiri dari :

- Jalan Nasional sepanjang 42,2 Km
- Jalan Provinsi sepanjang 153,88 Km
- Jalan Kabupaten sepanjang 1.499,52 Km

Untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi umumnya memiliki kondisi cukup baik hanya jalan kabupaten yang memiliki kondisi yang bervariasi yaitu rusak dan baik.

Grafik 2.26

Perkembangan Kondisi Jalan, 2013 – 2017



Sumber: Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Datar, 2017

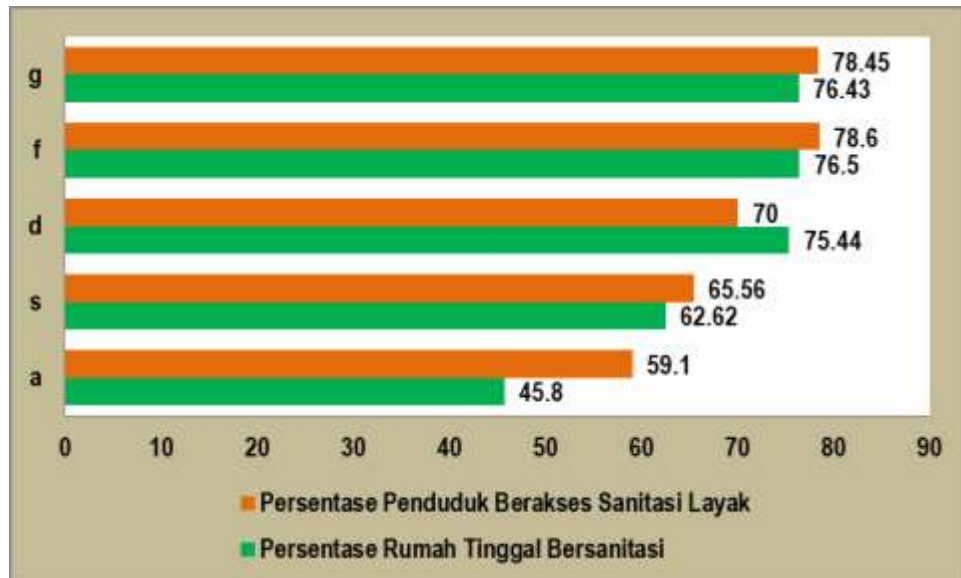
Jalan dengan kondisi baik (> 40 Km/Jam) pada tahun 2013 adalah 706,31 Km dan meningkat menjadi 862,95 Km pada tahun 2017. Jalan dengan kondisi rusak (> 40 Km/Jam) pada tahun 2017 adalah 636,57 Km mengalami penurunan dari 752,7 Km pada tahun 2016.

2) Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Salah satu yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah rumah berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi sebagai berikut ; 1) fasilitas air bersih, 2) pembuangan air besar/tinja, 3) pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah. Persentase rumah tangga bersanitasi sebagaimana terlihat pada Grafik 2.27 :

Grafik 2.27

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak, 2013 – 2017



Sumber : Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Datar, 2017

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa sampai tahun 2017 persentase rumah tinggal bersanitasi dan persentase penduduk berakses sanitasi layak di Kabupaten Tanah Datar terus meningkat.

3) Jaringan Irigasi Kabupaten

Pembangunan irigasi ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi hasil pertanian. Saat ini jumlah Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Tanah Datar adalah sebanyak 1.512 DI yang terdiri dari 1 (satu) DI merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yaitu Irigasi Batang Sinamar, 2 (dua) DI merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu Irigasi Batang Selo dan Galo Gandang, 9 (sembilan) DI merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi lintas kabupaten dan 1.500 DI yang merupakan kewenangan kabupaten, dari 1500 DI tersebut 635 DI sudah masuk dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Tabel 2.42

Aspek Pelayanan Umum Bidang Pekerjaan Umum – Irigasi, 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017
1	Irigasi berkondisi baik	950	993	1051	380	412
2	Irigasi kondisi rusak	562	519	461	255	223
3	Persentase Irigasi berkondisi baik	62,83	65,67	41,42	59,84	65,00

Sumber: Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Datar, 2017

*) Data berdasarkan Keputusan Menteri PUPR

Secara umum DI dengan kondisi baik setiap tahunnya terus meningkat disebabkan karena meningkatnya alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dari tahun ke tahun seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) bersama GP3A dalam pemeliharaan jaringan irigasi. Khusus pada tahun 2017, irigasi yang menjadi kewenangan Dinas PUPR adalah irigasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR, yaitu berjumlah 635 DI; yang berkondisi baik adalah 412 DI, sisanya sebanyak 223 DI dalam kondisi rusak.

4) Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Penduduk Kabupaten Tanah Datar adalah mayoritas beragama islam, sehingga tempat ibadah untuk agama non muslim secara resmi tidak ada. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 2.43 :

Tabel 2.43

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk, 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Tempat Ibadah	1.519	1.519	1.666	1.695	1.695*
2.	Jumlah Penduduk	342.684	343.875	344.828	345.706	346.578
3.	Rasio per 1.000 penduduk	4,43	4,42	4,59	4,67	4,67*

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka, BPS



**data sementara*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio untuk 1.000 penduduk Kabupaten Tanah Datar dapat ditampung pada 4 - 5 tempat ibadah atau satu tempat ibadah dapat menampung kurang lebih 214 orang penduduk.

5) Penataan Ruang

Penataan ruang di Kabupaten Tanah Datar diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031 dengan tujuan “Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang serasi, selaras dan seimbang antara lingkungan alam dan lingkungan binaan melalui pengaturan, pengendalian serta pemanfaatan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten, yang berbasis pertanian dan pariwisata untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang dilandasi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.

Berdasarkan rencana struktur ruang, dengan mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Sumatera Barat maka Kota Batusangkar diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Tanah Datar.

Disamping Kota Batusangkar sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) juga terdapat Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Pariangan dengan pusat di Nagari Simabur, Kecamatan Tanjung Emas dengan pusat di Nagari Saruaso, Kecamatan Salimpaung dengan pusat di Nagari Tabek Patah dan Kecamatan Sungai Tarab di Nagari Sungai Tarab dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan X Koto dengan pusat di Nagari Koto Baru, Kecamatan Batipuh Selatan dengan pusat di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh dengan pusat di Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Rambatan dengan pusat di Nagari Rambatan, Kecamatan Sungai Tarab dengan pusat di Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungayang dengan pusat di Nagari Sungayang, Kecamatan Padang Ganting dengan pusat di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Lintau Buo dengan pusat di Nagari Buo, dan Kecamatan Tanjung Baru dengan pusat di Nagari Tanjung Alam. Pusat-pusat ini berfungsi sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar nagari.

Berdasarkan rencana pola ruang, peruntukan ruang Kabupaten Tanah Datar terdiri atas Kawasan Lindung seluas 46.883 Ha (35.09%) dan Kawasan Budidaya seluas 86.717 Ha (64.91%). Kawasan lindung meliputi Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sedangkan Kawasan Budidaya meliputi Kawasan Hutan Produksi, Kawasan

Hutan yang dapat dikonversi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan dan kawasan permukiman.

Disamping PPL, di Kabupaten Tanah Datar juga terdapat kawasan perdesaan. Permasalahan dalam pemanfaatan ruang kawasan perdesaan antara lain belum tersedianya perencanaan tata ruang kawasan perdesaan.

Dalam impementasi pemanfaatan ruang, perizinan pemanfaatan ruang merupakan salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Perizinan merupakan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan penetapan lokasi, kualitas ruang dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.

Capaian kinerja penataan ruang dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

- a) Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan per Satuan Luas Wilayah Perkotaan
Ruang terbuka hijau merupakan area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Adapun kriteria ruang terbuka hijau kota adalah sebagai berikut:
 1. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 m²
 2. Merupakan suatu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur
 3. Terdapat komunitas tumbuhan.

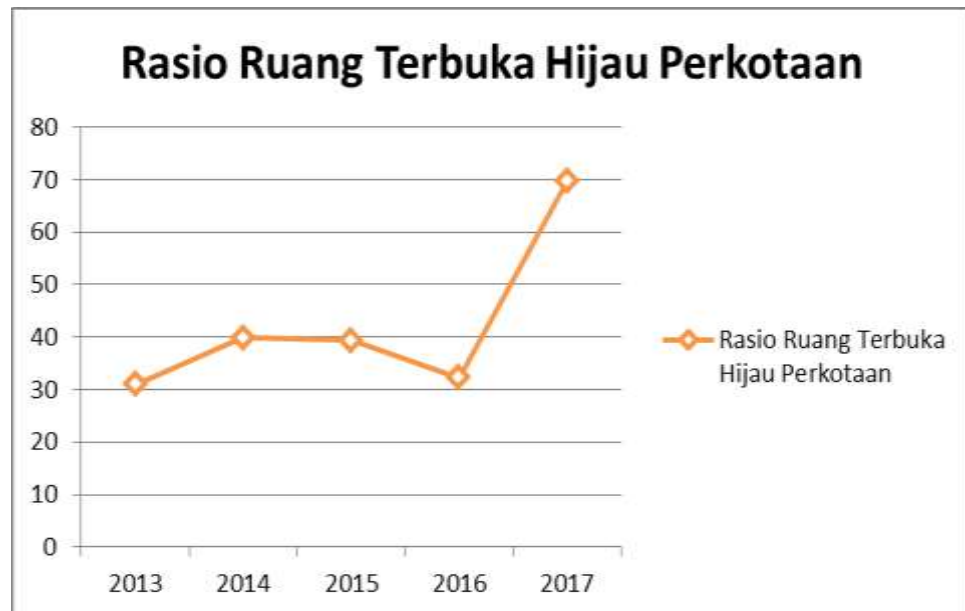
Tabel 2.44
Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan per Satuan Luas Wilayah, 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Ha)	4.050	4.050	5.150	4.232,75	4.232,75
2	Luas wilayah perkotaan (Ha)	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3	Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	30,92	30,92	39,31	32,30	69,70

Sumber : Dokumen RAKH Kabupaten Tanah Datar

Luas RTH hanya dihitung dari RTH perkotaan. Rasio perhitungannya didasarkan pada luas RTH perkotaan dibagi luas seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Tanah Datar.

Grafik 2.28
Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan



Sumber : Dinas Perkim LH

b) Jumlah IMB yang Diterbitkan

Pelayanan urusan penataan ruang dapat dilihat dari jumlah bangunan yang memiliki izin di Kabupaten Tanah Datar. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Jumlah IMB yang diterbitkan periode tahun 2013 – 2017 tergambar dalam grafik 2.29 :

Grafik 2.29
Jumlah IMB yang Diterbitkan, 2013 – 2017



Sumber : Data diolah

1) Rekapitulasi Indikator Layanan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Tabel 2.44
Indikator Layanan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Pekerjaan Umum					
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	53,01	50,14	52,85	42,73	57,41
2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	n/a	n/a	n/a	n/a	40,87
3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	n/a	n/a	n/a	n/a	0
4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	50,16	47,61	52,85	n/a	50,41
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam)	706,31	670,38	744,10	642,3	862,95
5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	n/a	n/a	n/a	n/a	0,87
6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	45,8	62,62	75,44	76,50	76,43
	Rumah tangga ber-Sanitasi	38,550	59,517	54,840	n/a	n/a
	Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak	59,1	65,56	70	78,6	78,45
8.	Persentase Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
10.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11.	Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Jumlah irigasi dalam kondisi baik (DI)	950	993	1.051	415	n/a
13.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	n/a	n/a	41.42	n/a	n/a
14.	Rasio Jaringan Irigasi	950	993	1.051	n/a	n/a
15.	Persentase Penduduk berakses air minum (air bersih)	64,30	68,87	76,84	70,90	n/a
16.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17.	Persentase areal kawasan kumuh	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
18.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
19.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	-	0.000003	0.0027	n/a	n/a
20.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	4.43	4.42	4.42	n/a	n/a
	Panjang jalan dilalui Roda 4	0,0036	0,0037	0,0038	0,0037	n/a
	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	100	100	100	100	100
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	45,8	62,62	75,44	76,50	76,43
	Penataan Ruang :					
21.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	30.92	30.92	39.31	n/a	n/a
22.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
23.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
24.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
25.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan					
26.	Ketaatan terhadap RTRW	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas PUPRP, Dinas Perkim LH

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Tempat tinggal/perumahan merupakan salah satu kebutuhan yang cukup penting dalam kehidupan manusia disamping kebutuhan makanan, pakaian maupun kesehatan. Tempat tinggal bukan hanya diperlukan sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai tempat untuk istirahat, beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, sosialisasi dengan lingkungan, serta tempat untuk mendidik anak-anak.

Untuk itu kondisi rumah yang ideal adalah rumah yang dalam kondisi baik, cukup luas untuk suatu keluarga, dan terbuat dari bahan bangunan yang baik dan memiliki fasilitas tempat tinggal yang memadai, sehingga akan mendukung keadaan rumah yang nyaman, aman, serta berada dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Karena keadaan perumahan akan mempengaruhi derajat kesehatan penduduk.

Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bagi kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumahtangga yang menempati rumahtangga tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumahtangga dan juga tempat penampungan kotoran akhir.

1) Rumah Tidak Layak Huni

Kinerja pembangunan pelayanan bidang perumahan di Kabupaten Tanah Datar tahun 2013-2017 dapat dilihat dari menurunnya jumlah rumah tidak layak huni, dimana pada tahun 2013 terdapat 2.762 unit rumah tidak layak huni dan pada tahun 2017 menjadi 7.192 unit angka sementara sebagaimana terlihat pada grafik 2.25 :

Grafik 2.30
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni, 2013 – 2017



Sumber : Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar

*data sementara

Untuk meningkatkan kualitas perumahan, telah dilaksanakan pembangunan atau rehab rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah antara lain melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 2.45
Indikator Fokus Layanan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio rumah layak huni	n/a	n/a	0,12	0,14	0,17
2.	Rasio permukiman layak huni	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	n/a	n/a	76	76	94,38
4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	n/a	n/a	n/a	n/a	11,9
5.	Persentase Luas permukiman yang tertata	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	n/a	n/a	n/a	0,75	0,70
7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	n/a	n/a	n/a	5,78	4,92
8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	n/a	n/a	n/a	n/a	80



No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar

n/a=data tidak tersedia

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus melakukan upaya untuk menjaga stabilitas ketertiban dan kemanaan lingkungan, termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di masyarakat dan kerawanan politik. Beberapa hal yang menjadi perhatian serius di antaranya adalah perkembangan kasus narkoba yang cenderung menunjukkan peningkatan.

Data dan indikator yang terkait dengan kegiatan stabilisasi dan keamanan lingkungan dapat dilihat pada tabel 2.46 :

Tabel 2.46
Indikator Stabilitas dan Keamanan Lingkungan

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	54	54	12	5	3
2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	2	2	1
3.	Kasus Kriminalitas	354	416	495	147	633
4.	Kasus Narkoba	14	23	18	41	28

Sumber : Kesbangpol

Kondisi pelayanan keamanan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada indikator layanan wajib ketertban Umum yang dapat dilihat pada tabel 2.47 :



Tabel 2.47
Indikator Layanan Wajib Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat, 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1	1	1,24	1,24	1,24
	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	8	7	20	20	20
	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	n/a	n/a	4	4	4
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	n/a	n/a	25	25	25
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	20	20	20	20	20
4.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20	20	20	20	20
5.	Persentase penegakan Perda					
	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	n/a	n/a	1,06	1,06	1,06
	Cakupan patroli petugas Satpol PP	n/a	n/a	15	15	15
	Sistim Informasi Manajemen Pemda	3	3	6	6	6
	Nilai Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat	70,08	72,38	71,58	n/a	n/a

Sumber : Kesbangpol

*angka sementara

n/a=data tidak tersedia

Pada tabel tersebut di atas kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan tergambar dari rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk yaitu 1,24 % pada tahun 2016 hal ini masih belum terjadi peningkatan dari tahun 2015 hal ini disebabkan masih kurangnya aparatur pada Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Jumlah Linmas per 10.000 penduduk. Sampai dengan tahun 2016, berjumlah 20 sedangkan petugas Linmas di kabupaten Tanah Datar berjumlah 4 rasio jumlah Pol – PP masih sangat rendah, yaitu 1,24 per 10.000 penduduk; rasio jumlah Linmas juga masih rendah, yaitu 22 per 10.000 penduduk. Hal ini berakibat pada kemampuan Pol PP dalam melakukan patroli harian.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten juga baru mencapai 20% karena dari 5 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang seharusnya ada, baru satu yang berfungsi dengan baik. Sehingga, response time rate-nya juga baru mencapai 20%.

Berdasarkan data pada tersebut, pada tahun 2013 – 2017 telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana, bidang pemerintah nagari, bidang ketahanan pangan, dan bidang pelayanan langsung. Nilai capaian masing-masing bidang yang disurvei berada di atas 70 dan masuk kategori “Baik”. Apabila dihitung rata-ratanya, maka nilai kinerja unit pelayanan selama periode 4 (empat) tahun tersebut mencapai 73,30 sehingga masuk dalam kategori “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah telah mampu memenuhi harapan masyarakat, meskipun belum seluruhnya.

f. Kriminalitas (Angka Kriminalitas Yang Ditangani)

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menanggulangi kriminalitas. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama satu tahun.

Tabel 2.48 menyajikan tindak pidana yang dapat ditangani di Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 2.48

Tindak Pidana Yang Ditangani, 2013 – 2017

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pencurian dengan pemberatan	24	17	113	151	50
2	Pencurian dengan kekerasan	4	5	18	18	3
3	Curanmor	8	8	61	73	39
4	Pencurian biasa	16	20	46	64	28
5	Penipuan	19	18	44	37	27
6	Percobaan curas	0	0	0	0	0
7	Ancam dengan senjata tajam	0	0	0	0	0



No	Jenis Kasus	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
8	Perampasan/pemerasan	2	0	2	1	1
9	Membawa BBM subsidi tanpa surat	4	6	2	0	0
10	Pembunuhan	0	0	1	1	1
11	Penganiayaan berat/pengeroyokan	14	18	22	0	10
12	Penganiayaan biasa	57	62	18	62	33
13	Penganiayaan ringan	53	61	38	37	23
14	Penggelapan	12	13	26	30	6
15	Pemalsuan surat	7	9	7	2	3
16	Perjudian	15	21	12	12	9
17	Pemeriksaan	1	1	1	2	1
18	Perbuatan cabul	27	30	20	32	21
19	Poligami/Kawin liar	8	9	3	2	0
20	Kebakaran	18	20	14	15	9
21	Pengancaman	0	0	0	0	1
22	Penyerobotan tanah	13	17	20	8	7
23	Kekerasan di depan umum	0	0	0	0	0
24	Pengrusakan	19	22	9	21	3
25	Narkoba (orang)	14	23	18	41	28
26	Pertambangan tanpa izin (PETI)	0	0	0	0	0
27	Percobaan perkosaan	0	0	0	0	0
28	Perkosaan di bawah umur	0	0	0	0	0
29	Membuat perasaan tidak senang	29	36	0	16	12
	Jumlah	354	416	495	676	327
	Rasio Angka Kriminalitas yang ditangani	10,32%	12,00%	13,64%	19,60%	8,96%

Sumber : Kesbangpol

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rasio angka kriminalitas pada tahun 2017 terjadi penurunan yaitu sebesar 8,96% dari tahun 2016 yaitu sebesar 19,60% hal ini menunjukkan adanya keseriusan dalam

menangani kasus kriminalitas. Kasus pemakai narkoba menurun pada tahun 2017 yaitu sebesar 28 dibanding tahun 2016 sebesar 41. Dari data yang ada masih terdapat kasus kriminalitas ditengah masyarakat. Upaya penurunan kasus kriminalitas ini disebabkan karena meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait (Kepolisian dan Kejaksaan) sehingga semua laporan masyarakat terhadap kriminalitas dapat ditangani dalam waktu singkat. Untuk menurunkan kasus kriminalitas, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggalakkan pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan budaya, diantaranya melalui Program Magrib Mengaji, Didikan Subuh, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Pembinaan lembaga adat nagari dan sosialisasi adat dan budaya kepada generasi muda.

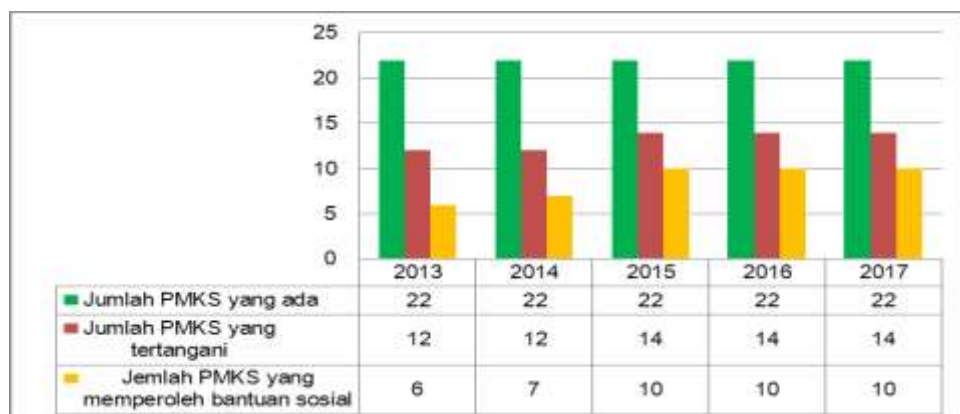
g. Sosial

1) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada grafik 2.31 :

Grafik 2.31

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), 2013-2017



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016

Jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 22 jenis PMKS dari 28 jenis PMKS yang ada, yang ditangani masih 14 jenis PMKS

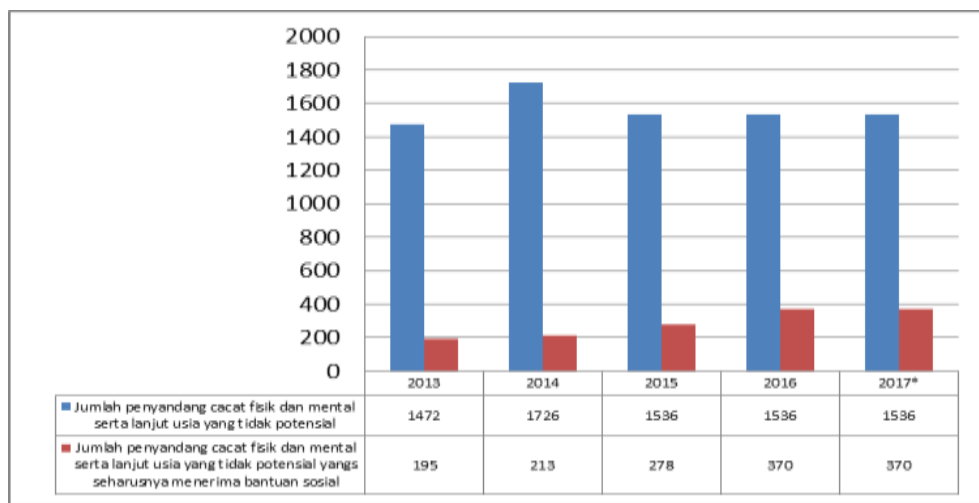
sampai tahun 2017 serta yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 10 jenis PMKS.

2) Penyandang Cacat

Penyandang cacat adalah orang dengan cacat mental dan fisik. Cacat mental yaitu psikotik (gila) dan keterbelakangan mental. Adapun perkembangan penyandang cacat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 – 2017 sebagai 2.32:

Grafik 2.32

Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Tidak Potensial, 2013-2017



Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

*data sementara

jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial setiap tahun meningkat dari 1.472 orang tahun 2013 menjadi 1.536 tahun 2017 data sementara dan yang mendapat bantuan sosial terus meningkat dari tahun 195 orang tahun 2013 menjadi 370 orang tahun 2017 data sementara.

Tabel 2.49

Indikator Layanan Wajib Bidang Sosial

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	57,7	57	54	93.97	93.97
	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	n/a	n/a	22.009	n/a	19,982
2.	Persentase PMKS yang tertangani	60	60	60	60	60



No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	n/a	n/a	n/a	100	135
4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	125	100	83	40	32,43
5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100	100	100	100	100
6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	n/a	n/a	50	5.76	3
7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100
9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	50,25	38,50	34,53	37,84	18.53

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

*data sementara

n/a=data tidak tersedia

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a. Tenaga Kerja

Pada Urusan Ketenagakerjaan, penduduk sebagai pelaksana dan sasaran pembangunan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu perkembangan penduduk perlu diarahkan agar mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan untuk pembangunan seperti terkendalinya pertumbuhan penduduk dan terarahnya mobilitas penduduk.

Salah satu aspek kependudukan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia adalah tenaga kerja, karena mencakup dari segi ekonomi dan sosial. Bagi individu-individu, dimensi ekonomi berkaitan dengan pemenuhan hidup sehari-hari sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Setiap upaya pembangunan bidang tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para pencari kerja sehingga nantinya mampu bersaing di dunia pasar kerja dan dunia usaha sebagai tenaga kerja yang siap pakai.

Selain itu dikenal juga istilah kesempatan kerja yang merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Penambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap penambahan angkatan kerja.

Angkatan kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja atau mencari pekerjaan atau penduduk yang sudah memasuki usia kerja yakni minimal berusia 15 tahun sampai 65 tahun. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja.

Tabel 2.50

Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Usia Kerja	240.066	245.168	246.737	249.882	249.882
2	Angkatan Kerja	172.722	167.911	164.485	153.984	153.984
	- Bekerja	164.359	162.375	157.144	147.874	147.874
	- Pengangguran	8.363	5.536	7.341	6.189	6.189
3	Bukan Angkatan Kerja	67.344	77.257	82.252	95.898	95.898
	- Sekolah	10.874	24.595	24.384	24.384	24.384
	- Mengurus Rumah Tangga	35.619	42.375	44.852	44.852	44.852
	- Lainnya	20.851	10.287	13.016	13.016	13.016
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	71.95	68.49	66.66	61.64	61.64
5	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)/Rasio penduduk yang bekerja	95.16	96.70	95.54	96.00	96.00
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4.84	3.30	4.46	4.02	3.72

Sumber: Dinas PMPTSP, 2017



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas cenderung meningkat, sementara angkatan kerja jumlahnya justru menurun di tahun 2016. Tingkat kesempatan kerja (rasio penduduk yang bekerja) cukup tinggi yaitu sebesar 95% sedangkan tingkat pengangguran terbuka hanya 4,46%, ini berarti angkatan kerja yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan yang masih mencari pekerjaan atau menganggur.

Pemerintah daerah selalu berupaya mengurangi jumlah pengangguran melalui peningkatan SDM pencari kerja (*job training*) dan mengundang pemilik usaha untuk membuka bursa lapangan kerja (*job fair*).

Tabel 2.51

Indikator Layanan Wajib Bidang Tenaga Kerja

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	12	18	16	21	15
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	8	15	13	11	10
3.	Besaran pencari kerja yang ditempatkan	132	120	135	n/a	n/a
4.	Pencari kerja yang ditempatkan	22	224	135	120	135
5.	Keselamatan dan perlindungan	36	40	48	48	42
6.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	1305	1283	2524	2532	2572
7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	20	25	40	40	40
9.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	4	5	20	5	4
10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	30	30	80	128	96
11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	45	45	45	45	45
12.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	30	30	30	30	30
13.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0.52	0.03	0.03	0.48	0.48*

Sumber: Dinas PMPTSP, 2017

n/a=data tidak tersedia



b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan menuntut suatu negara untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Agar pembangunan yang berkelanjutan terwujud dibutuhkan langkah-langkah konkrit. Salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat.

Dalam praktiknya program pemberdayaan seringkali mengalami permasalahan, salah satunya adalah tidak meratanya program pemberdayaan yang diterima oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu perbedaan jenis kelamin yang sering kali menghambat masyarakat dengan jenis kelamin tertentu (misal perempuan) untuk berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya.

Urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan urusan Perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan kepada anak (mulai dari masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun) sehingga proses tumbuh kembang anak berjalan dengan baik. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak.

1) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan pengarusutamaan gender, Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan perlindungan anak melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

(P2TP2A). Hal ini dapat meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan dan meminimalisir tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Adapun rasio KDRT dapat dilihat pada tabel 2.55:

Tabel 2.52

Rasio KDRT, 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Kasus KDRT yang ditangani	5	19	16	55	55
2.	Jumlah Rumah Tangga	87.712	84.170	85.118	85.302	85.302
3.	Rasio KDRT	0,01	0,02	0,02	0,08	0,08

Sumber : Dinas Sosial P3A

*data sementara

2) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon II-IV. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dalam tabel 2.56 :

Tabel 2.53

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	5	5	5	5	3
2.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	17	16	17	17	17
3.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	200	204	204	204	204
4.	Pekerja perempuan di pemerintah	4.797	4.698	4.598	4.742	4.742
5.	Jumlah PNS (Laki-Laki dan Perempuan)	7.380	7.208	7.356	7.182	7.182
6.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	65,00	65,18	72,08	74,75	74,75

Sumber : Dinas Sosial P3A

*data sementara

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah cukup tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun dimana dari tahun 2013 sebesar 65,00% dan pada tahun 2017 sebesar 74,75% data sementara. Hal ini menunjukkan meningkatnya peran perempuan di sektor publik, sebagaimana tergambar dalam grafik 2.33 :

Grafik 2.33

Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah



Sumber : Dinas Sosial P3A

*data sementara

Tabel 2.54

Indikator Layanan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	65	65.18	72.08	n/a	n/a
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	60	62	45.04	n/a	n/a
4.	Rasio KDRT	0.02	0.02	0.85	n/a	n/a
5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	2207	2680	n/a	n/a	n/a
7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
15.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
16.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
18.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
19.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Sosial P3A

n/a=data tidak tersedia

c. Pangan

Ketahanan pangan secara umum sangat terkait dengan ketersediaan pangan, yaitu kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Secara umum, berdasarkan tabel di bawah ini, ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tanah Datar telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini tampak dari persentase ketersediaan pangan utama yang lebih dari 100%, artinya terdapat surplus ketersediaan pangan utama.



Tabel 2.55

Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ketersediaan pangan utama	244,35	230,33	237,02	280,77	280,77
2.	Rata-rata Ketersediaan Pangan Utama (%)	401	402	419	372	452
3.	Ketersediaan energi dan protein per kapita					
	- Energi	5679	5679	5820	5354	5334
	- Protein	148,72	148,72	145,49	136,4	158
4.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	n/a	75	80	60	78

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan

n/a=data tidak tersedia

d. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai tempat kelangsungan makhluk hidup yang di dalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus selalu dijaga kondisinya agar selalu bersih dan layak, serta berada pada ambang batas minimal pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan masyarakat. Secara umum, kondisi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Datar tergambar dalam tabel 2.56 :

Tabel 2.56

Indikator Layanan Wajib Bidang Lingkungan Hidup, 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah propinsi	n/a	n/a	n/a	1	n/a
4.	Hasil pengukuran indeks kualitas air	n/a	n/a	91,67	89,29	81,94
5.	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	n/a	n/a	89,46	87,61	94,11
6.	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	n/a	n/a	53,15	53,15	53,15



No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
7.	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	n/a	n/a	n/a	n/a	40 Kegiatan
8.	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di kabupaten/kota	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9.	Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11.	Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12.	Penetapan hak MHA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
13.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
14.	Terfasilitasinya penyediaan sarana/prasarana	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Paket
15.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	9 Kali
16.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	ada	ada	Ada
17.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
18.	Timbulan sampah yang ditangani	n/a	n/a	n/a	n/a	59,692,95
19.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	n/a	n/a	n/a	n/a	3,62
20.	Persentase cakupan area pelayanan	n/a	n/a	n/a	15	18,97
21.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	n/a	n/a	n/a	n/a	20,14

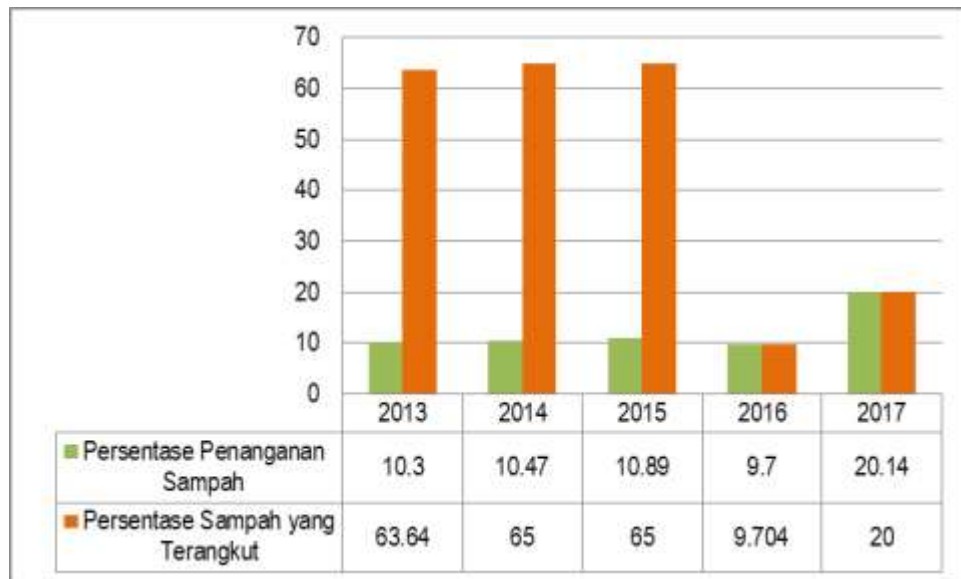
No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
22.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	n/a	n/a	n/a	71	69
23.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	3	-	3	1	-
24.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	-
	Persentase penanganan sampah	10,3	10,47	10,89	9,70	20,14
	Cakupan pelayanan persampahan (orang)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase sampah yang terangkut (%)	63,64	65,00	65,00	9,704	20
	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	40	40	40	2,5	2,5*
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal/UKL-UPL	15,79	15,79	23,26	20,00	25
	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,050	0,063	0,051	0,01	0,02
	Penegakan hukum lingkungan	100	100	88,89	87,5	100

Sumber : Dinas Perkim LH
n/a=data tidak tersedia

a) Persentase Penanganan Sampah

Secara umum pelayanan Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Datar tahun 2013-2017 berdasarkan data sementara sudah mengalami peningkatan terutama di bidang persampahan. Hal ini terlihat dengan meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Di samping bidang persampahan, pengelolaan kualitas lingkungan juga menjadi prioritas, ini terlihat dari penerbitan rekomendasi izin pengelolaan lingkungan yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup. Perkembangan pelayanan umum bidang lingkungan hidup selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada Grafik 2.34:

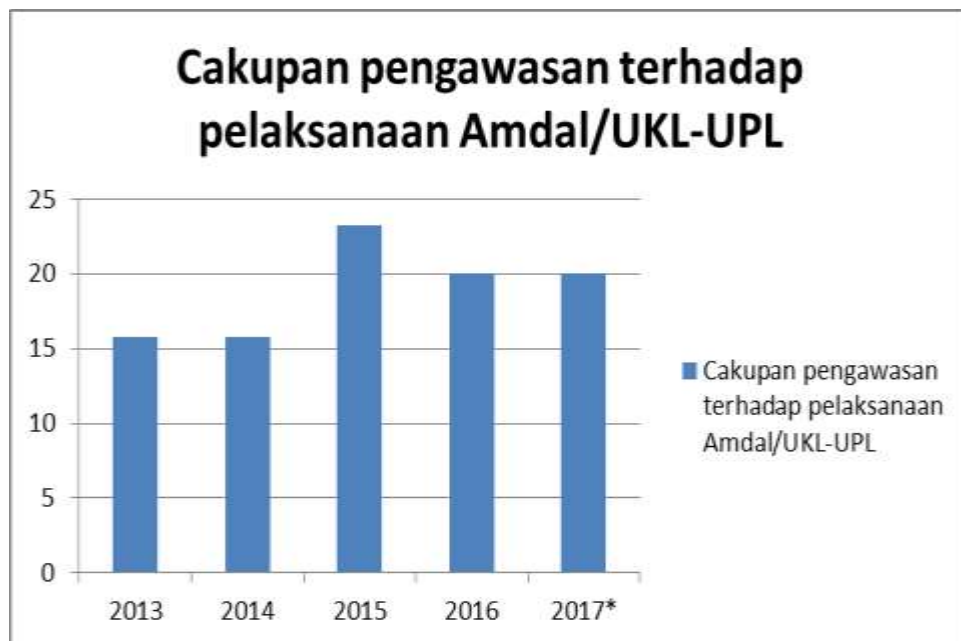
Grafik 2.34
Perkembangan Pelayanan Persampahan, 2013–2017



Grafik 2.35
Persentase Penduduk Berakses Air Minum (Air Bersih),
2013–2017



Grafik 2.36
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal/UKL-UPL,
2013–2017



Sumber: Dinas Perkim LH

*data sementara

b) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Penurunan jumlah TPS pada tahun 201 yang hanya berjumlah 43 unit berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa yang termasuk tempat pembuangan sampah adalah TPS permanen dan kontainer, sedangkan tempat sampah di fasilitas umum tidak termasuk kategori TPS.

Tabel 2.57

Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk, 2013 – 2017

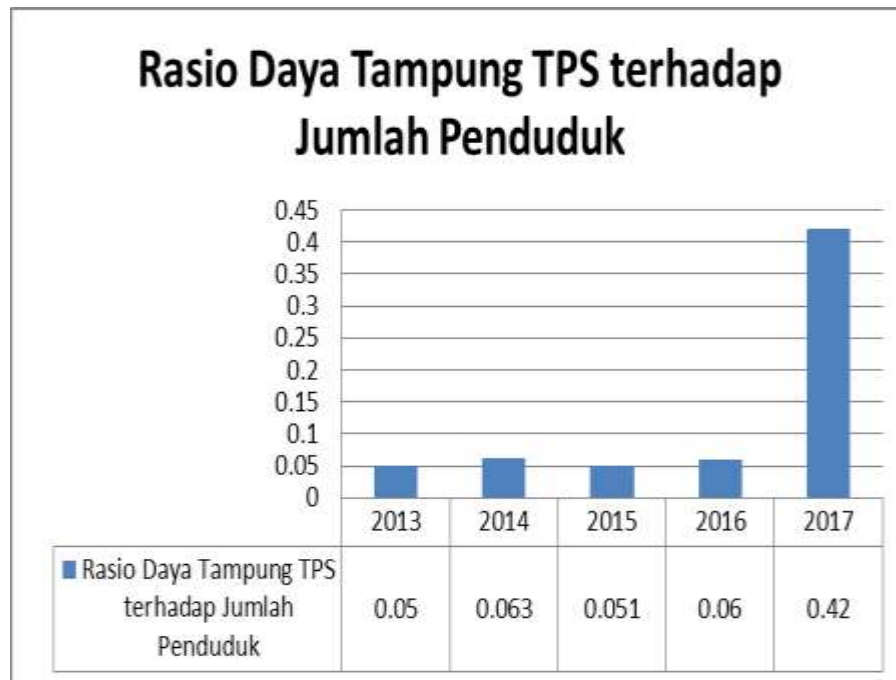
No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah TPS	216	279	177	55*	43
2	Jumlah Daya Tampung TPS	171,3	216,05	185	211,40	172
3	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,050	0,063	0,051	0,060	0,42

Sumber : Dinas Perkim LH

* Berdasarkan dokumen PTMP (+) pengadaan tahun 2017

Grafik 2.37

Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk



Grafik di atas memperlihatkan bahwa rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk pada tahun 2015 mengalami penurunan namun pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan.

c) Persentase Penduduk Berakses Air Bersih

Persentase penduduk berakses air bersih di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013-2017 cenderung meningkat dari 64,00% menjadi 70,90%.

Tabel 2.58

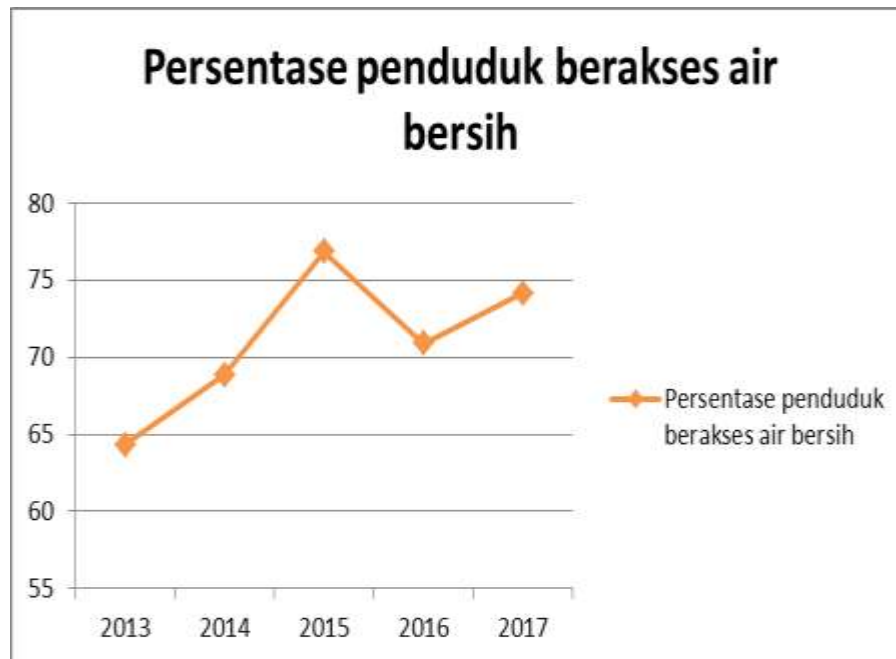
Persentase Penduduk Berakses Air Bersih, 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih	220.461	236.826	278.744	258.813	272.763
2.	Jumlah penduduk	342.864	343.875	362.759	365.040	367.754
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	64,30	68,87	76,84	70,90	74,17

Sumber : Dinas Perkim LH

Grafik 2.38

Persentase Penduduk Berakses Air Bersih



Sumber : Dinas Perkim LH

Selama tahun 2013-2017 telah dilaksanakan pembangunan prasarana air bersih pada 61 lokasi di Kabupaten Tanah Datar melalui program pamsimas dan 23 lokasi program air bersih perdesaan.

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan, akan menjamin stabilitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan, dan pemerintah menetapkan kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.



Tabel 2.59
Indikator Layanan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	81.73	87.61	85.06	n/a	n/a
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	n/a	n/a	70.54	n/a	n/a
3.	Rasio pasangan berakte nikah	n/a	n/a	23.44	n/a	n/a
4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	Ada
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

n/a=data tidak tersedia

a) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Tabel 2.60

Rasio Perpindahan Penduduk Imigrasi Dan Emigrasi, 2013 - 2017

No	Indikator	Tahun				
		2013 ^{*)}	2014 ^{*)}	2015 ^{*)}	2016	2017*
1	Jumlah Penduduk	342.864	343.875	362.759	267.328	367.754
2	Penduduk Masuk					
	- Migrasi	829	879	5.092	1.822	1.822
	- Rasio	0,00242	0,00256	0,000396	0,00682	0,00682
3	Penduduk Keluar					
	- Migrasi	1.251	1.465	6.361	1.225	1.225
	- Rasio	0,00365	0,00426	0,0175	0,00458	0,00458

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar

*data sementara

Tabel 2.61

Jumlah Penerbitan Akta Lahir, Akta Mati, KTP-E dan KK, 2013 - 2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Akta Lahir	9.561	17.065	12.956	108.968	108.968
2.	Akta Mati	14	160	3.023	2.289	2.289
3.	KTP-el	7.846	3.804	242.185	364.925	364.925
4.	Kartu Keluarga (KK)	5.438	4.029	75.983	75.620	75.620

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar

*data sementara

Dari tabel 2.61 di atas dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat khusus untuk memiliki dokumen kependudukan sudah semakin baik.

b) Pengelompokan Penduduk

1. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah banyaknya penduduk laki-laki per seratus penduduk perempuan sebagaimana terlihat pada 2.62 :

Tabel 2.62

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2013 - 2017

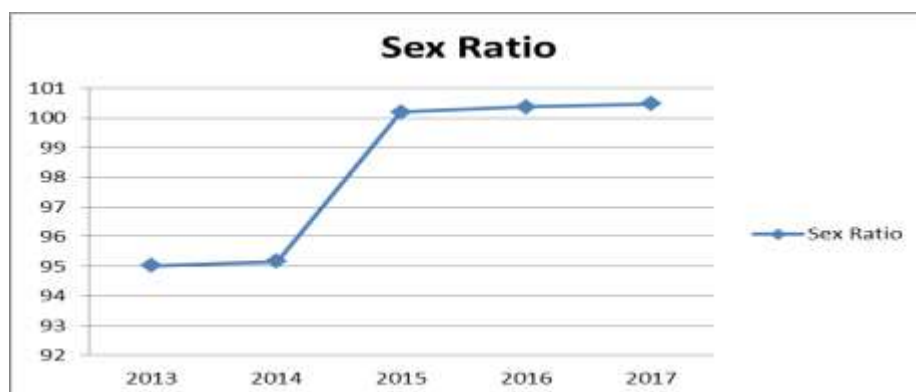
No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}
1.	Jumlah Penduduk	342.864	343.875	362.579	364.925	367.754
2.	Laki – laki	167.051	167.677	181.557	182.796	184.306
3.	Perempuan	175.813	176.198	181.202	182.129	183.448
	Rasio	95,02	95,16	100,20	100.37	100

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka, BPS

^{*)} Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Grafik 2.38

Sex ratio, 2013 – 2017



Grafik di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2017, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, *sex ratio* tercatat sebesar 100,47. Hal ini menandakan bahwa penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dari penduduk perempuan.

2. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan persebaran penduduk/geografis

Pengelompokan penduduk berdasarkan persebaran penduduk/geografis di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel 2.63:

Tabel 2.63

Jumlah Penduduk Menurut Sebaran Penduduk/Geografis, 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{*)}	2017
1.	X Koto	42,989	43,116	42,116	42.222	43,038
2.	Batipuh	30,050	30,138	32,644	32.218	31,908
3.	Batipuh Selatan	10,542	10,573	10,846	11.324	37,960
4.	Pariangan	19,603	19,661	20,602	20.730	37,890
5.	Rambatan	33,458	33,557	38,300	37.794	24,133
6.	Lima Kaum	36,352	36,459	37,683	37.498	19,055
7.	Tanjung Emas	22,040	22,105	23,573	23.880	18,779
8.	Padang Ganting	13,767	13,807	14,661	14.675	32,413
9.	Lintau Buo	18,091	18,145	19,065	19.057	20,933
10.	Lintau Buo Utara	35,420	35,525	36,346	37.526	23,351
11.	Sungayang	17,087	17,137	18,510	18.814	14,752
12.	Sungai Tarab	29,600	29,687	31,710	31.788	14,239
13.	Salimpaung	20,990	21,052	22,987	23.231	37,809
14.	Tanjung Baru	12,875	12,913	13,716	14.168	11,494
	Total	342,864	343,875	362,759	364.925	367,754

^{*)} Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Dari tabel tersebut di atas tergambar bahwa persebaran penduduk Kabupaten Tanah Datar belum merata ke seluruh wilayah. Pada umumnya konsentrasi penduduk terbesar masih di wilayah perkotaan atau wilayah yang dekat dengan perkotaan, seperti X Koto, Lima Kaum, Sungai Tarab, Rambatan, Batipuh, dan Lintau Buo Utara.

Selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Gambar 2.6

Tampilan awal Sistem Informasi Administrasi Kependudukan



f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat desa diupayakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilaksanakan meliputi pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat, pembinaan PKK, LSM, dan Posyandu. Selama kurun waktu 5 tahun, jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengalami peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa keaktifan masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah terus menunjukkan peningkatan. Kondisi pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari tabel 2.64 :



Tabel 2.64
Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	9	9	15	n/a	n/a
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	14	14	14	14	14
4.	Persentase LSM aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5.	Persentase LPM berprestasi	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
6.	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100
7.	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100
8.	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	100	100
9.	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas PMDPPKB Kab. Tanah Datar

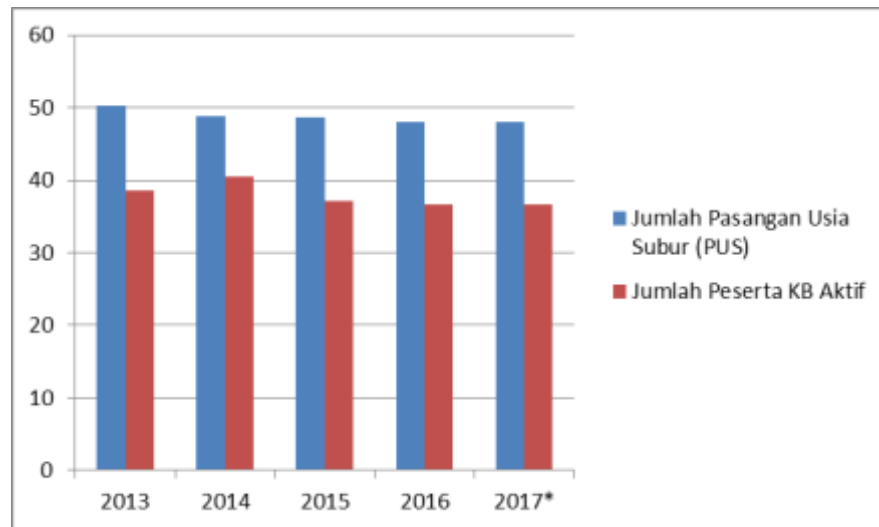
n/a=data tidak tersedia

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada grafik dibawah ini dapat dilihat jumlah pasangan Usia Subur, peserta KB Aktif dan Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2013 – 2017:

Grafik 2.39
Peserta Keluarga Berencana, 2013-2017



Sumber : Dinas PMD PPKB

*data sementara

Grafik 2.40
Cakupan Peserta KB Aktif, 2013-2017



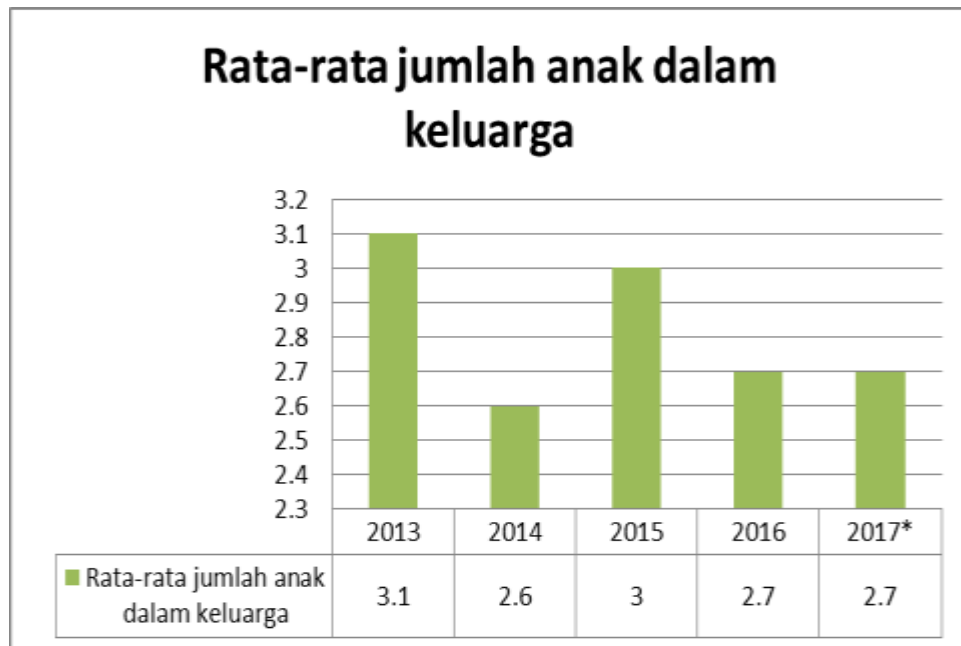
Sumber : Dinas PMD PPKB

*data sementara



Grafik 2.41

Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga, 2013- 2017



Sumber : Dinas PMD PPKB

Tabel 2.65

Indikator Layanan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,28	0,29	0,28	0,59	0,33
2.	Total Fertility Rate (TFR)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Dokumen rancangan induk pengendalian penduduk dengan 5 aspek	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembangunan berwawasan kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
7.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.47	2.6	3	2.9	2.7
11.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	63.6	62.5	65.64	63.71	73.87
12.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
13.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	0.62	0.53	0.42	0.41	0.39
14.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	10.42	11.33	11.07	13.2	14.27
15.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	21.17	22.6	26.5	27.78	28.29
16.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	79.3	82.65	70.54	71.56	73.87
17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75.92	80.64	81.73	76.71	79.77
18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	71.6	72.52	74.67	75.29	76.58
19.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	78.42	80.65	81.96	84.01	83.09
20.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	0	0	0	1	1
21.	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	35	45	60	65	75
22.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	100	100	100	100	100



No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk					
23.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	67.06	83.6	75.82	74.1	84.81
24.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
25.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang kabupaten/kota	81	163	100	98	99
26.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	100	100	100	100	100
27.	Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKE sesuai dengan standarisasi pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
28.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	100	100	100	100	100
29.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual					
30.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	100	100
31.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100	100	100	100	100
32.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
33.	Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes					

Sumber : Dinas PMD PPKB

n/a=data tidak tersedia

h. Perhubungan

Pelayanan Urusan Perhubungan belum optimal karena sistem transportasi barang dan orang belum terkoneksi dengan pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Berdasarkan data sarana dan prasarana penunjang bidang perhubungan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, *traffic light* dan



warning light tahun 2013-2017, pada tahun 2017 jumlah rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, demikian juga dengan jumlah kendaraan wajib uji mengalami peningkatan.

Tabel 2.66
Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	342.864	343.875	342.762	332.635	340.813
2.	Angkutan darat	6.376	6.700	6.079	6.069	6.069
3.	Kepemilikan KIR angkutan umum (unit)	6.115	6.485	6.495	6.765	5.721
4.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum/KIR (hari)	30	30	30	30	30
5.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (rupiah):					
	- Bus	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- Mobil Penumpang	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Pemasangan Rambu-rambu (unit)	98	95	79	86	68

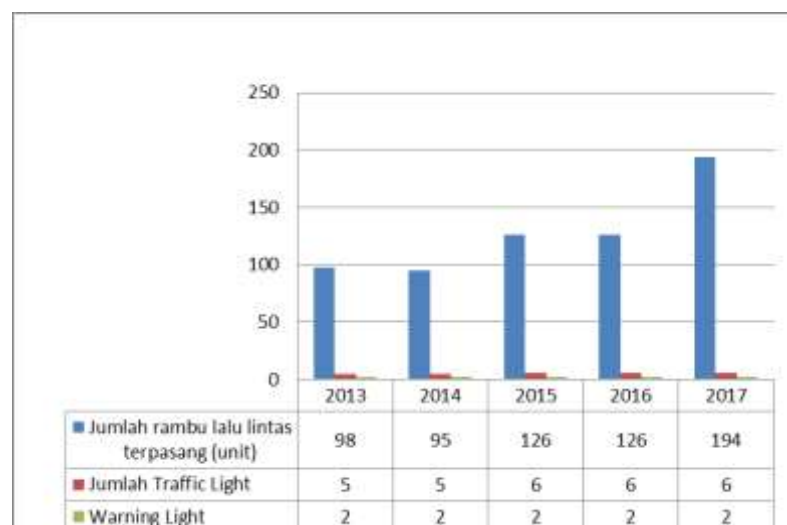
Sumber : Dinas Perhubungan

*data sementara

Perkembangan pelayanan umum bidang perhubungan selama periode 2013 – 2017 dapat dilihat pada grafik 2.42 :

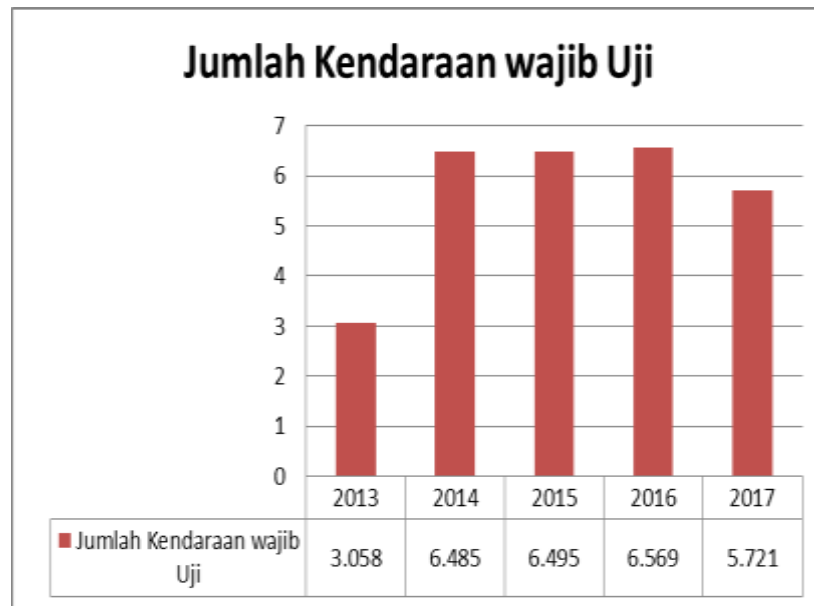
Grafik 2.42

Aspek Pelayanan Bidang Perhubungan, 2013 – 2017



Sumber : Dinas Perhubungan, 2017

Grafik 2.43
Jumlah Kendaraan Wajib Uji



Sumber : Dinas Perhubungan, 2017

Grafik 2.44
Jumlah Marka Tersedia (m²)



Sumber: Dinas Perhubungan

1. Rasio Izin Trayek

Izin trayek merupakan izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek sebagaimana tergambar dalam tabel 2.70 di bawah ini. Izin trayek diberikan dalam

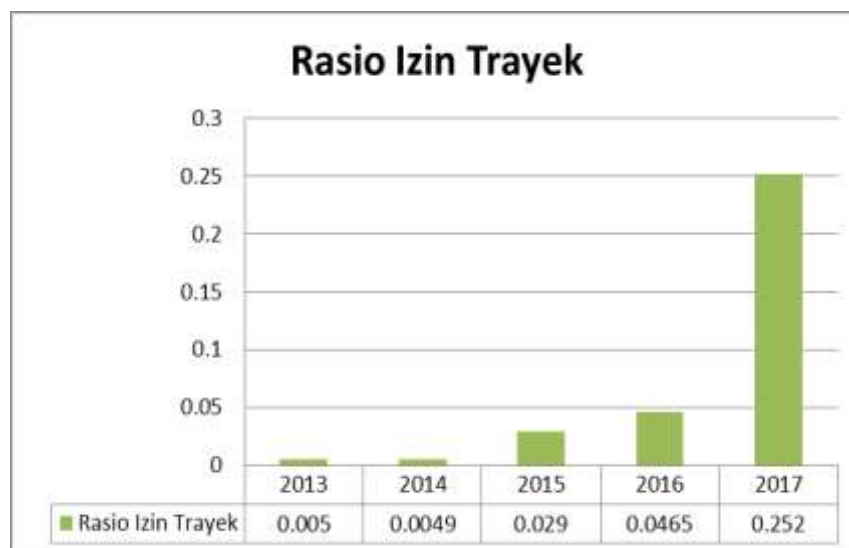
bentuk rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.67
Rasio Izin Trayek, 2013 – 2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Izin Trayek Perkotaan	1	1	17	17	18
2.	Izin Trayek Perdesaan	16	16	104	80	96
3.	Jumlah Izin Trayek	17	17	121	97	114
4.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	342.864	343.875	362.759	332.635	340.813
	Rasio Izin Trayek	0,005	0,0049	0,029	0,0465	0,0252

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanah Datar

Grafik 2.45
Rasio Izin Trayek, 2013 – 2017



Sumber : Dinas Perhubungan

2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

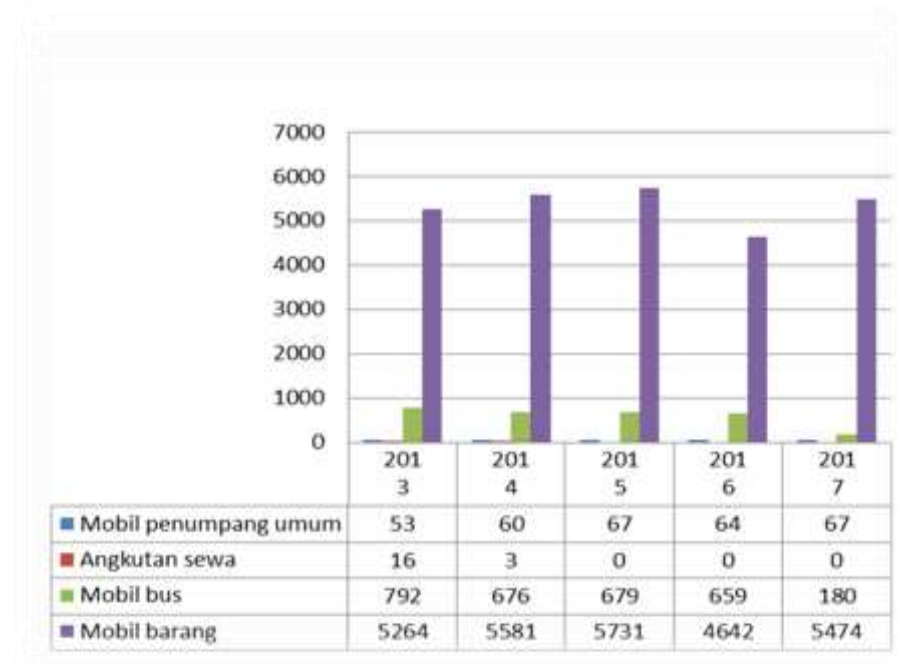
Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang akan dioperasikan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi :

- Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.

- b. Uji berkala, yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, penumpang bus, mobil barang yang meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Grafik 2.46

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum, 2013 – 2017



Sumber : BPS, Tanah Datar Dalam Angka

Perhubungan merupakan urat nadi perekonomian suatu daerah, jika dilihat dari tabel diatas terdapat peningkatan jumlah uji KIR kendaraan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang. Hal ini membuktikan adanya peningkatan jumlah kendaraan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian laik jalan kendaraan bermotor yang dimilikinya.

3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan jalan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.



Tabel 2.68

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus, 2013 - 2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-	-
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bus	1	1	3	3	3
	Jumlah	1	1	3	3	3

Sumber: Dinas Perhubungan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Tanah Datar terdapat 3 (tiga) terminal bis yang melayani Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Tabel 2.69

Rekapitulasi Indikator Layanan Wajib Bidang Perhubungan

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	342,864	343,875	342,762	340,200	340,813
2.	Rasio izin trayek	0.0012	0.0012	0.0465	0.0252	0.0252
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	6,115	6,485	6,495	749	1032
4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	3	3	3	3
5.	Persentase layanan angkutan darat	12.77	12.74	12.7	12.53	12.53
6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	88.57	79.35	93.17	77.96	108.86
7.	Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	6,115	6,485	6495	375	516
8.	Pemasangan rambu-rambu	76.56	72.52	67.52	-	48.92
		98	95	79	-	68
9.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.49	0.47	0.45	0.43	0.41
10.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	43.800	43.800	43.800	43.200	43.200
11.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	342.884	343.875	342.762	340.200	340.813

Sumber: Dinas Perhubungan

i. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat cepat telah mendorong kemudahan akses informasi dan komunikasi, bahkan hingga ke daerah yang dulunya tidak terjangkau sekalipun. Hal ini tampak dari perkembangan jumlah jaringan komunikasi (tower penyedia jasa komunikasi



seluler) yang terus meningkat setiap tahun. Rasio wartel/warnet, meskipun cenderung turun angkanya, tetap menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan keberadaan wartel/warnet untuk berkomunikasi. Keberadaan wartel, secara khusus, memang telah tergerus oleh kemudahan komunikasi yang ditawarkan oleh perangkat seluler. Sementara warnet, masih punya segmen pasar tersendiri, khususnya masyarakat yang memerlukan akses internet dengan biaya terjangkau. Perkembangan pembangunan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel 2.70 :

Tabel 2.70
Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib
Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah jaringan komunikasi (tower)	88	98	106	108	118
2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,04	0,03	0,02	0,03	0,03
3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	18	18	18	18	18
4.	Jumlah penyiaran radio	4	5	7	7	7
5.	Web site milik pemerintah daerah	Ada	ada	Ada	ada	Ada
6.	Pameran/Expo	-	-	1	1	1

Sumber : Dinas Kominfo

Tabel 2.71
Rekapitulasi Indikator Layanan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	0	0	0	5	8
2.	Cakupan layanan telekomunikasi	62	65	68	70	82
	Jumlah jaringan komunikasi	88	98	106	108	118
3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	0	0	57,6	57,6	78,22
4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0	0	22,19	22,19	19,00
5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Kominfo



j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan UMKM mempunyai peranan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat, dalam bentuk penyerapan tenaga kerja serta membuka lapangan usaha baru. Upaya peningkatan UMKM dilakukan melalui pembinaan SDM pengelola dan penambahan modal usaha, serta mempromosikan produk-produk UMKM. Perkembangan koperasi dan UMKM selama tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel 2.72 :

Tabel 2.72

Indikator Layanan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Persentase koperasi aktif	89,68	89,77	89,95	89,91	89,91
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	1.603	1.722	1.846	2.351	2.351
3.	Jumlah BPR/LKM	21	21	21	21	21
4.	Usaha Mikro dan Kecil	3.484	3.583	3.596	2.351	2.351
5.	Perusahaan kecil	355	313	265	268	268
6.	Perusahaan mikro	144	79	78	70	70

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perindag

*data sementara

a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang yang kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Dari tabel 2.73 di bawah dapat digambarkan persentase koperasi aktif di Kabupaten Tanah Datar tahun 2013-2017.

Tabel 2.73

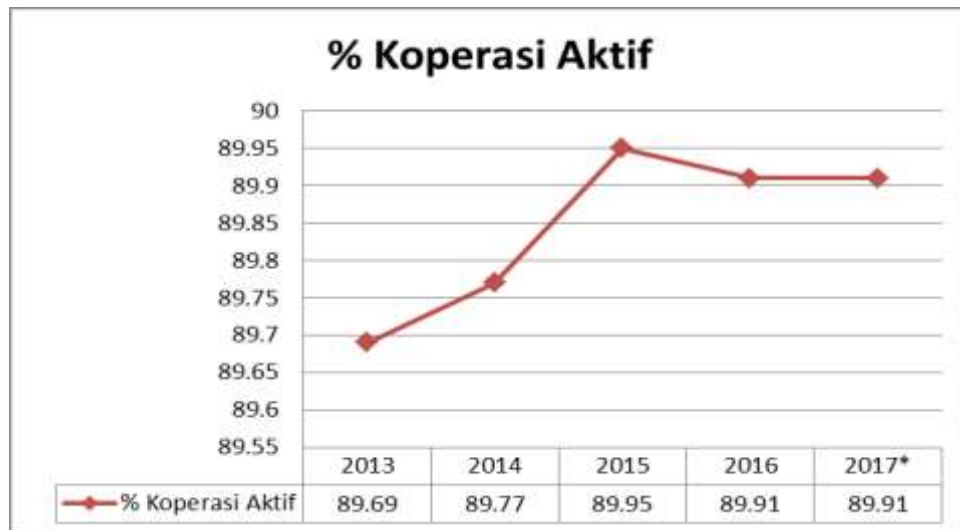
Persentase Koperasi Aktif, 2013 - 2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Jumlah koperasi aktif	200	202	206	205	205
2.	Jumlah koperasi	223	225	229	228	228
3.	Persentase koperasi aktif	89,68	89,77	89,95	89,91	89,91

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perindag

*data sementara

Grafik 2.47
Persentase Koperasi Aktif, 2013 – 2017



Sumber : Dinas Koperasi UKM Perindag

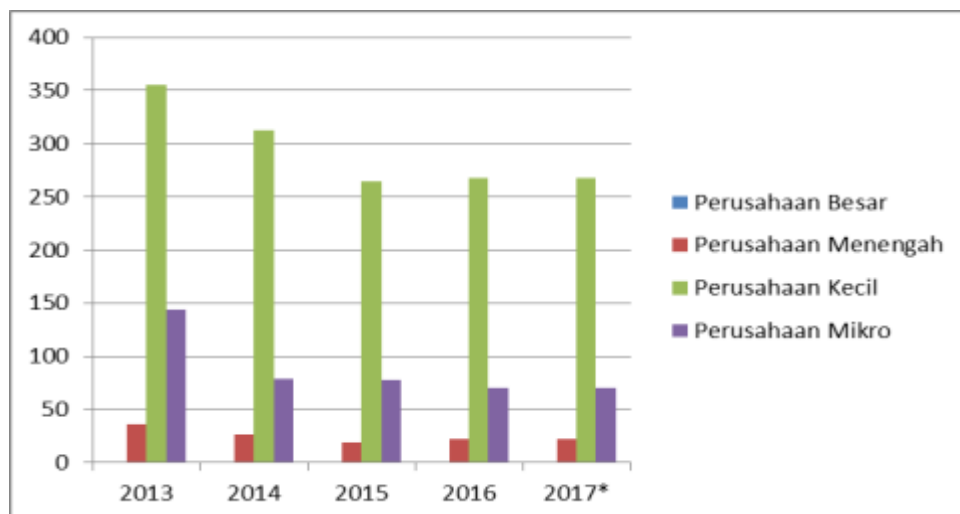
*data sementara

Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Tanah Datar mengalami fluktuasi. Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah koperasi aktif pada tahun 2017 mengalami penurunan dari 206 unit menjadi 205 unit koperasi yang aktif pada data sementara.

b. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM

Upaya peningkatan UMKM dilakukan melalui pembinaan SDM pengelola UMKM dan penambahan modal usaha. Perkembangan UMKM selama tahun 2013 – 2017 dapat dilihat melalui grafik 2.48 :

Grafik 2.48
Penerbitan SIUP, 2013 - 2017



Sumber : Dinas Koperasi UKM Perindag

*data sementara



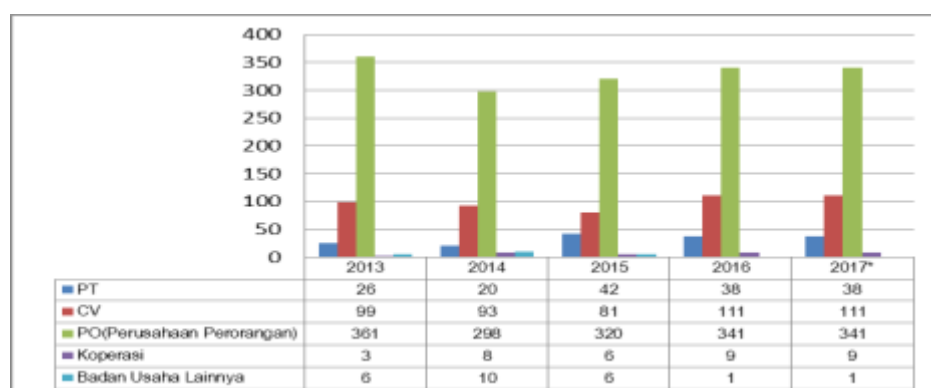
Sumber: Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker

*Data Sementara

Berdasarkan grafik di atas terlihat adanya penurunan penerbitan SIUP baru pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 yaitu dari 362 menjadi 360, hal ini terjadi akibat adanya penurunan penerbitan SIUP untuk perusahaan mikro, sedangkan penerbitan SIUP untuk perusahaan menengah dan kecil tetap mengalami peningkatan. Penerbitan SIUP sekali lima tahun mempengaruhi terhadap pengurusan SIUP baru dan adanya perusahaan yang tidak melanjutkan usahanya lagi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya penerbitan SIUP. Sedangkan Pada tahun 2017 berdasarkan data sementara penerbitan SIUP 360.

Data pada Grafik 2.49 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pendaftaran perusahaan pada tahun 2017 pada data sementara dibandingkan tahun 2015 yaitu dari 455 perusahaan menjadi 500 perusahaan kenaikan terbesar terdapat pada pendaftaran CV yaitu dari 81 CV menjadi 111 CV atau bertambah 30 CV.

Grafik 2.49
Pendaftaran Perusahaan, 2013 – 2017



Sumber: Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker Kab. Tanah Datar



Tabel 2.74
Rekapitulasi Indikator Layanan Wajib Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase koperasi aktif	89,70	89,77	89.95	89.91	91.52
2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	1.603	1.722	1.846	2.351	2.351
4.	Persentase BPR/LKM aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5.	Jumlah BPR/LKM	21	21	21	21	21
6.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.	Usaha Mikro dan Kecil	3.484	3.583	3.596	2.351	2.351

Sumber: Dinas Koperasi UKM Perindag

n/a=data tidak tersedia

k. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka memperhatikan tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan prima serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

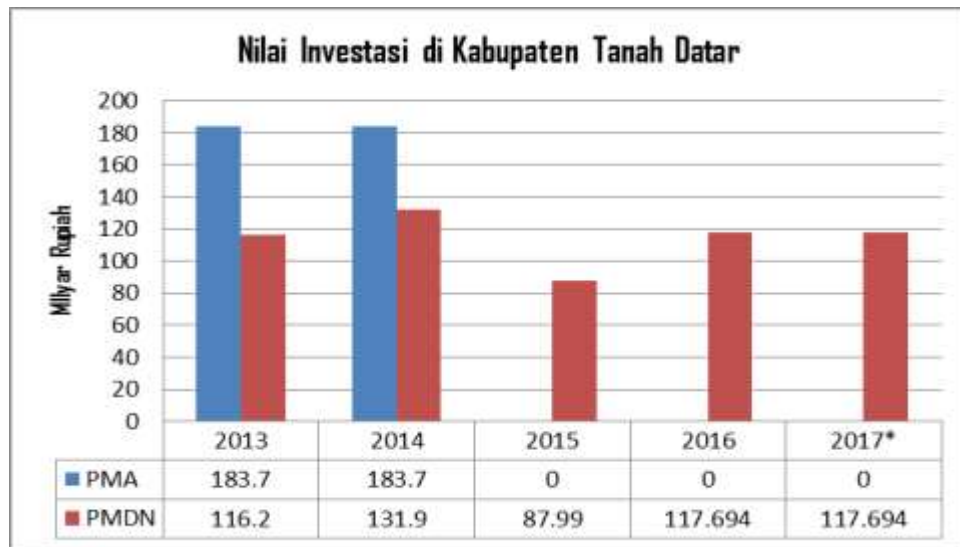
Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang penanaman modal memiliki potensi daerah yang beragam yang dapat menjadi peluang bagi penanaman modal terutama sektor pariwisata, konstruksi, pertanian organik, industri olahan makanan dan ekonomi kreatif pendukung sektor jasa dan pariwisata.

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Grafik berikut ini menyajikan jumlah investasi PMDN dan PMA.

Grafik 2.50

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA), 2013 – 2017



Sumber: Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker Kab. Tanah Datar

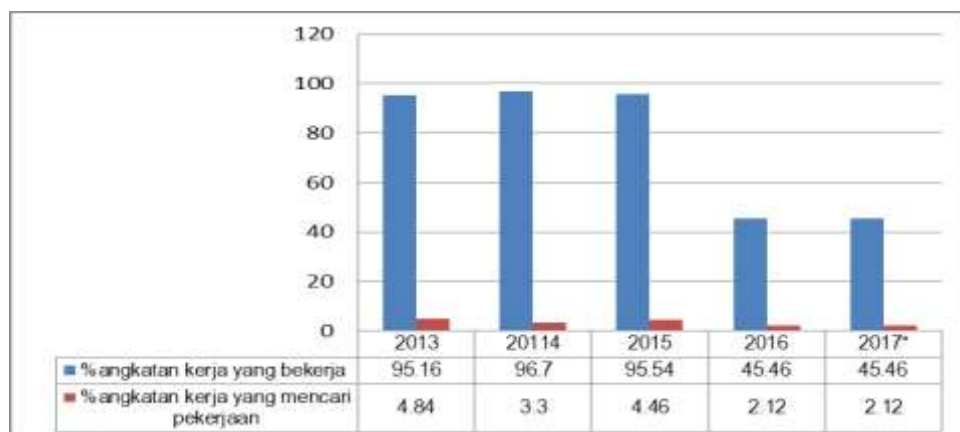
Berdasarkan grafik di atas, nilai investasi PMDN pada Tahun 2017 dari hasil data sementara terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2015. Sedangkan PMA belum terealisasi sejak tahun 2014. Hal ini menjadi tantangan bagi SOPD yang menangani Urusan Penanaman Modal agar lebih meningkatkan upaya promosi potensi investasi yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Datar.

2. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Kondisi angkatan kerja di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2013-2017 dapat dilihat dari angkatan kerja yang bekerja dan yang mencari pekerjaan sebagaimana yang tergambar pada grafik 2.51 :

Grafik 2.51

Perkembangan Angkatan Kerja, 2013 – 2017



Sumber: Tanah Datar Dalam Angka (2017)



Dilihat dari grafik di atas persentase angkatan kerja yang mencari pekerjaan pada tahun 2013 sebesar 4.84% dan turun pada tahun 2017 berdasarkan angka sementara menjadi 2.12%.

Tabel 2.75

Rekapitulasi Indikator Layanan Wajib Bidang Penanaman Modal

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	n/a	n/a	42	12	10
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	328,900	345,600	87,990	65,989	60,843
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	n/a	n/a	87,990.00	n/a	n/a

Sumber: Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker Kab. Tanah Datar

n/a=data tidak tersedia

1. Pemuda dan Olahraga

Pemuda merupakan aset pembangunan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu bentuk perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah selama ini adalah fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga. Tabel 2.76 menggambarkan kondisi pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga:

Tabel 2.76

Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah organisasi pemuda	5	7	6	176	283
2.	Jumlah organisasi olahraga	28	30	30	30	30*
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	7	6	9	11
4.	Jumlah kegiatan olahraga	13	5	9	9	9*
5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	11	11	11	11	75
6.	Sarana olahraga *):	551	552	562	552	552*
	- Sepak Bola	100	100	101	101	101*
	- Bola Volley	200	200	209	209	209*
	- Bulutangkis	88	88	88	88	88*
	- Sepak Takraw	117	117	117	117	117*
	- Tennis Lapangan	5	5	5	5	5*
	- Bola basket	37	37	37	37	37*
	- Panjat Tebing	1	2	2	-	-



No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	- Kolam Renang	3	3	3	3	3*
	- Lapangan futsal	n/a	n/a	4	4	4*

Sumber : Data diolah

*data sementara

Berdasarkan data di atas, perkembangan jumlah organisasi pemuda tidak begitu signifikan, bahkan dalam periode 3 tahun terakhir cenderung menurun jumlahnya. Jumlah organisasi olah raga sesuai dengan jumlah cabang olahraga yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yaitu 30 cabang olahraga. Sarana olahraga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir juga tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, jumlahnya cenderung tidak berubah, kecuali bola volley dan sepak bola.

Tabel 2.77

Rekapitulasi Indikator Layanan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100	100	100	100	100
	Jumlah organisasi pemuda	5	7	6	176	283
2.	Persentase wirausaha muda	n/a	n/a	n/a	14	50
3.	Cakupan pembinaan olahraga	n/a	n/a	n/a	100	100
4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	n/a	20	25	33	33
5.	Cakupan pembinaan atlet muda	n/a	20	20	25	30
6.	Jumlah atlet berprestasi	n/a	75	20	100	33
7.	Jumlah prestasi olahraga	n/a	12	12	16	16

Sumber: Dinas Parpora Kab. Tanah Datar

n/a=data tidak tersedia

m. Kebudayaan

Sebagai daerah yang dikenal sebagai asal usul orang minang, Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi yang sangat besar di bidang budaya. Sampai dengan tahun 2015, upaya pemerintah untuk melestarikan budaya lokal ditandai dengan banyaknya festival seni budaya yang diselenggarakan, baik skala kecil maupun skala yang cukup besar, baik yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan Festival Pacu Jawi yang telah menjadi agenda rutin daerah dan dilaksanakan beberapa kali dalam satu tahun.



Kinerja pemerintah dalam pelestarian seni dan budaya lokal tergambar dalam tabel 2.78 :

Tabel 2.78
Rekapitulasi Indikator Layanan Wajib Bidang Kebudayaan

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	45	26	65	33	51
2.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	67	67	67	67	67
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

n/a=data tidak tersedia

n. Perpustakaan

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia karena keberadaannya disamping sebagai sumber informasi dan pengetahuan, juga menjadi salah satu alat untuk mengukur minat baca masyarakat. Guna menunjang hal tersebut, pemerintah setiap tahun selalu berupa untuk meningkatkan kualitas perpustakaan, baik melalui penambahan koleksi wisata, maupun peningkatan pelayanan lainnya, seperti layanan perpustakaan keliling. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke perpustakaan. tabel 2.79 menggambarkan perkembangan pengelolaan perpustakaan daerah :

Tabel 2.79
Rekapitulasi Indikator Layanan Wajib Bidang Perpustakaan

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	5,338	6.953	7.706	6.340	37.994
2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	11.877	12.226	30.830	12.68	14,304
3.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	309.603	263.565	295.714	284.016	284.016
4.	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1
4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	444	579	642	528	3.166
5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	11.877	12.226	30.830	1.268	14.304



No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	1	1

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

o. Statistik

Tabel 2.80

Indikator Layanan Wajib Bidang Statistik

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	Ada
2.	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	Ada	Ada
3.	Buku "PDRB"	ada	ada	ada	ada	Ada

Sumber : BPS Kab. Tanah Datar, 2017

p. Persandian

Tabel 2.81

Rekapitulasi Indikator Layanan Wajib Bidang Persandian

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

q. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan terutama untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan, di antaranya melalui bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Sampai dengan tahun 2017 data sementara, sudah 38 SKPD yang diberikannya bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Namun hal ini belum menggambarkan secara lebih akurat apakah sistem pengelolaan arsip secara baku sudah benar-benar dilaksanakan oleh SKPD.

Dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan telah diupayakan peningkatan kapasitas, meskipun selama kurun waktu 5 tahun terakhir baru dilaksanakan satu kali. Hasil-hasil pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel 2.82 :



Tabel 2.82

Indikator Layanan Wajib Bidang Kearsipan

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Pengelolaan arsip secara baku	14	14	37	38	39
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	1	0	0	2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

*data sementara

Tabel 2.83

Rekapitulasi Indikator Layanan Wajib Bidang Kearsipan

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	35	35	94	97	100
2.	Pengelolaan arsip secara baku	14	14	37	38	39
3.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	1	0	0	2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

a. Pariwisata

Perkembangan pariwisata masih sangat tergantung pada keberadaan Istano Basa Pagaruyung, yang sampai saat ini masih belum tergantikan posisinya sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Tanah Datar, bahkan di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, bukan berarti pengembangan pariwisata hanya difokuskan pada Istano Basa Pagaruyung. Event-event budaya dan tradisi lokal yang telah rutin dilaksanakan juga turut membantu meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya adalah event reguler Pacu Jawi yang banyak menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung. Tabel 2.89 menggambarkan perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Tanah Datar.



Tabel 2.84
Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kunjungan wisata	275.935	926.300	984.929	1.189.173	1.276.879
	- Jumlah wisatawan asing	29.503	101.245	115.444	142.424	53,152
	- Jumlah wisatawan domestik	246.432	825.055	869.485	1.046.749	1.223.727
2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Lama kunjungan wisata	-	-	-	-	-
4.	PAD sektor pariwisata	330,652	2,533,018	2,853,436	3,497,059	4,092,915

Sumber : Dinas Parpora

n/a=data tidak tersedia

Berdasarkan Tabel 2.83, jika dilihat dari tahun 2017 kunjungan wisatawan mengalami peningkatan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini tidak lepas dari promosi dan Event Pariwisata yang dilakukan seperti : *Tour De Singkarak*, Pameran foto, Festival Pagaruyung, Pacu Jawi dan lain-lain.

b. Pertanian

Produktivitas padi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir secara umum menunjukkan penurunan, dari 5,63 ton/ha pada tahun 2013 menjadi 5,19 ton/ha pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena musim kemarau dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Beberapa upaya Pemerintah Daerah telah dilakukan untuk meningkatkan produksi padi antara lain : intensifikasi, penerapan teknologi Padi Salibu dan pengendalian OPT. Perkembangan indikator pertanian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.85 :



Tabel 2.85
Indikator Layanan Pilihan Bidang Pertanian

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Produktivitas padi (ton/ha)	5,63	5,34	5,31	5,19	5,19
2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	33,24	33,84	33,88	33,88	33,88
3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	3,5	3,3	3,4	3,4	3,4
4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras/perkebunan tahunan) terhadap PDRB (%)	9,3	9,1	9,03	9,03	9,03
5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	33,24	33,84	33,88	33,88	33,88
6.	Cakupan bina kelompok petani (%)	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Tanah Datar, data diolah

*data sementara

c. Energi dan Sumber Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat dari ketersediaan energi untuk kebutuhan masyarakat sudah dinikmati oleh masyarakat, tetapi pemanfaatan daya listrik oleh masyarakat belum 100%. Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di masa yang akan datang, telah dikembangkan pembangkit listrik mikro hidro yang memanfaatkan potensi sumber daya air.

Disamping itu sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pembentukan PDRB. Permasalahan yang dihadapi pada sektor pertambangan saat ini adalah keterbatasan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi karena terkendala permasalahan kepemilikan lahan, skala eksploitasi yang masih rendah dan peruntukan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). serta belum bersatunya pelaku usaha ekonomi sejenis.

Adapun kontribusi sektor pertambangan dan ketersediaan energi dapat dilihat pada tabel 2.86 :



Tabel 2.86
Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Pertambangan tanpa ijin (ha)	6	6	2	6,5	6,5
2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	2.98	3.34	4.44	4,38	4,38
3.	Rasio ketersediaan daya listrik	100	100	100	100	100
4.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	86,78	88,63	77,21	91,48	91,48
	- Rumah Tangga menggunakan listrik	73.047	75.444	79.957	83,677	83,677
	- Jumlah Rumah Tangga	84.170	85.118	103.561	91.470	91.470

Sumber : BPS Tanah Datar (diolah)

*data sementara

d. Perdagangan

Urusan perdagangan dapat dilihat dari kontribusi sektor Perdagangan (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) terhadap PDRB mengalami fluktuasi terlihat pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 12% dan turun pada tahun 2014 menjadi 11,96%, akan tetapi terjadi penurunan antara tahun 2015 dan 2017 berdasarkan data sementara, seperti tabel 2.87 berikut :

Tabel 2.87
Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kontribusi sektor Perdagangan (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) terhadap PDRB	12	11,95	11,83	11,56	11,56*
2.	Ekspor Bersih Perdagangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	1.030	955	434	453	n/a
4.	Ekspor bersih perdagangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (&)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
6.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (kelompok)	1.030	955	434	360	191

Sumber : BPS Tanah Datar (diolah)

*data sementara

n/a=data tidak tersedia

e. Perindustrian

Industri yang berkembang di Kabupaten Tanah Datar masih didominasi oleh industri kecil menengah (IKM). Kontribusi IKM terhadap pembentukan PDRB masih relatif kecil. Perkembangan industri dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB tergambar pada tabel 2.88 berikut :

Tabel 2.88

Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kontribusi sektor Industri (industri pengolahan) terhadap PDRB	12,84	12,28	12,16	11,16	11,16*
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Pertumbuhan Industri	n/a	7,42	7,20	25,46	25,46*
4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	12	12	12	10	20

Sumber : BPS Tanah Datar (diolah)

*data sementara

n/a=data tidak tersedia

Dari table diatas terlihat pada tahun 2017 berdasarkan data sementara kontribusi sector industry terhadap PDRB di Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan.

f. Kelautan dan Perikanan

Perkembangan pembangunan bidang perikanan selama kurun waktu tahun 2013–2017 telah menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini tampak pada produksi perikanan yang menunjukkan peningkatan setiap tahun. Kondisi yang sama juga terlihat pada konsumsi ikan yang juga meningkat setiap tahun, dari 30,2 kg per kapita/tahun pada tahun 2013, meningkat menjadi 32,00 kg



per kapita/tahun pada tahun 2017. Tabel 2.89 menggambarkan perkembangan pembangunan bidang perikanan di Kabupaten Tanah Datar:

Tabel 2.89

Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produksi perikanan (%)					
	Produksi perikanan (ton)	3.785,2	3.903,1	4.398,9	5.524,8	7177,6
2.	Konsumsi ikan	30,6	31,6	33,1	35
3.	Cakupan bina kelompok nelayan (%)					
	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	31	33	34	35	35*
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	1.826,90	1.805,60	1.936,3	1.860,7	1.860,7*
5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.	Nilai tukar nelayan	19,484	14,871	18,028	14,871	14,871*

Sumber : BPS Tanah Datar (diolah)

*data sementara

n/a=data tidak tersedia

2.1.3.4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

a. Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 – 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 tahun. Ketersediaan masing-masing dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel 2.89 :

Tabel 2.90

Indikator Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	ada	ada
2.	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	ada	ada
3.	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	ada	ada
4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	ada	ada

Sumber : Baperlitbang



Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar telah mengadopsi prinsip perencanaan partisipatif yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Namun demikian, konsep perencanaan pembangunan partisipatif yang berbasis budaya Minangkabau dan berwawasan lingkungan dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum semua lapisan masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan (Musrenbang).

b. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021. Keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk mencapai/mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, disamping faktor sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan persentase peningkatan PAD, sebagaimana tergambar dalam tabel 2.91 berikut :

Tabel 2.91
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase SILPA terhadap APBD	0,105	0.109	0,126	0.064	0.074
3.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0	0	0	0	0
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	50,65	40,16	45,72	42,07	36,69
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	8,81	9,68	12,19	12,58	15,61



6.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	49,00	47,44	41,90	50,72	61,76
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	19,182,046,086	31,155,335,940	35,793,142,696	39,509,220,496	42,098,735,730
8.	Penetapan APBD (tepat waktu/tidak tepat waktu)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber : Badan Keuangan Daerah

n/a=data tidak tersedia

c. Kepegawaian

Selama kurun waktu tahun 2013 – 2017, jumlah PNS menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan moratorium penerimaan PNS yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Penerimaan pegawai baru sangat dibatasi hanya untuk bidang tertentu, seperti kesehatan dan pendidikan.

Pada tahun 2017, berdasarkan data jumlah PNS mencapai 6.154 orang, dengan komposisi 65,6 % adalah PNS perempuan dan sisanya 34,4 % adalah PNS laki-laki. Dari sisi tingkat pendidikan, terbanyak adalah PNS dengan pendidikan D-4/S-1, yaitu 51,5%; sementara jumlah PNS dengan pendidikan S-2 baru mencapai 2,71% dan belum ada PNS dengan pendidikan S-3. PNS dengan pendidikan SLTA atau di bawahnya mencapai 18,19 %. Tabel 2.92 menggambarkan jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

Tabel 2.92

PNS berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan, 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah PNS	7.380	7.226	7.356	6.154	5.989
	a. Laki-laki	2.583	2.517	2.532	2.056	1.928
	b. Perempuan	4.797	4.709	4.824	4.098	4.061
2.	Tingkat pendidikan PNS					
	a. SD	80	75	74	64	60
	b. SMP	112	109	110	97	88
	c. SMA	1.140	1.071	1.154	959	871
	d. D-1/D-2	1.444	1.315	1.194	913	818
	e. D-3	797	771	857	757	789
	f. D-4/S-1	3.630	3.710	3.788	3.222	3.209
	g. S-2	177	175	199	142	154
	h. S-3	-	-	-	-	-

Sumber :BKPSDM



No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017

Tabel 2.93

Indikator Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	n/a	n/a	n/a	n/a	10
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	n/a	n/a	n/a	n/a	12
3.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	n/a	n/a	n/a	n/a	17.57
4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi	23	22	22	21	27
5.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	5362	5194	5132	4132	3950

Sumber :BKPSDM

n/a=data tidak tersedia

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik dan mampu meningkatkan daya saing daerah.

a. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor.

Tabel 2.94

PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha, 2013 – 2017

No	Lapangan Usaha	Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2013	2014	2015 ¹⁾	2016	2017 ^{***)}
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.713.538,1	3.108.811,4	3.326.388,3	3.489.171,2	3.800.979,4
2.	Pertambangan dan Penggalan	243.599,8	307.029,3	353.094,4	377.552,0	437.920,7
3.	Industri Pengolahan	1.048.553,8	1.128.220,5	1.180.503,9	1.273.491,5	1.358.936,4
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.332,9	1.551,1	2.196,6	2.927,7	3.816,9



No	Lapangan Usaha	Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2013	2014	2015 ¹⁾	2016	2017 ^{***)}
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.927,1	9.563,8	10.907,8	12.149,5	13.468,5
6.	Konstruksi	751.182,3	834.939	924.985,0	1.008.058,9	1.112.176,4
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	979.992,4	1.097.672,4	1.125.480,6	1.379.667,8	1.546.302,3
8.	Transportasi dan Pergudangan	656.914,6	742.336,6	808.191,6	888.984,4	983.428,8
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50.492,2	56.587,1	64.384,8	74.490,5	84.806,0
10.	Informasi dan Komunikasi	354.923,8	400.443,8	399.978,7	444.681,4	480.086,1
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	211.309,9	233.621,9	252.122,6	279.153,8	306.324,2
12.	Real Estat	128.657,5	146.885,2	163.139,6	177.777,9	198.048,5
13.	Jasa Perusahaan	3.048,8	3.350,9	3.687,7	4.063,3	4.471,7
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	536.659,7	583.866,9	576.188,6	651.538,3	695.623,2
15.	Jasa Pendidikan	230.998,2	261.859,6	292.786,6	336.304,5	381.183,2
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107.157,6	119.554	128.063,6	138.910,5	151.484,8
17.	Jasa lainnya	136.623,9	151.465,8	163.879,8	188.107,7	209.288,5
	Total	8.163.912,6	9.187.759,4	9.875.980,55	10.727.031,2	11.768.345,6

Sumber : BPS Tanah Datar Tahun 2017

¹⁾ Angka sementara

^{**)} Data diolah

^{***)} Angka sangat sementara

Pada tahun 2017 nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih dominan dibandingkan dengan nilai tambah lapangan usaha lainnya dengan kontribusi sebesar 3,8 triliun rupiah atau 32,29% dari total PDRB Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor kedua terbesar dalam memberikan sumbangannya terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar. Selama tahun 2017 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menghasilkan nilai tambah sebesar 1,54 triliun rupiah atau sekitar 13,13% terhadap total PDRB

Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas merupakan lapangan usaha yang paling kecil memberikan sumbangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar yang hanya menghasilkan nilai tambah sebesar 3,81 milyar rupiah atau sekitar 0,03% terhadap total PDRB Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2017.

Pada tahun 2017, PDRB-ADHB Kabupaten Tanah Datar nilainya 11,768 triliun rupiah dan pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 12,44 triliun rupiah.

Tabel 2.95
Jumlah Tenaga Kerja per Sektor, 2013 - 2017

No	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian	70.166	72.465	64.469	n/a	n/a
2.	Pertambangan dan Penggalan	3.297	1.389	1.389	n/a	n/a
3.	Industri Pengolahan	9.749	14.771	17.451	n/a	n/a
4.	Listrik dan air	575	420	420	n/a	n/a
5.	Bangunan	5.611	5.910	4.955	n/a	n/a
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	38.976	34.035	33.380	n/a	n/a
7.	Angkutan dan komunikasi	9.501	6.045	8.321	n/a	n/a
8.	Keuangan, persewaan dan jasa pemerintahan	3.090	3.710	1.411	n/a	n/a
9.	Jasa-jasa	26.028	23.630	27.157	n/a	n/a
	Total	166.995	162.375	157.144	-	-

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka, BPS

Dari tabel di atas pada tahun 2015 dapat dijelaskan bahwa jumlah tenaga kerja terbesar diserap pada sektor pertanian (64,46%) yang diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (33,38%) dan sektor jasa-jasa (27,15%). Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 data tidak tersedia.



2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1. Fasilitas Bank dan Non Bank

a. Jenis Dan Jumlah Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tabel 2.96

Jenis dan Jumlah Bank, 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Bank Umum					
	- Konvensional	3	3	3	3	3
	- Syariah	-	1	1	1	1
2.	BPR					
	- Konvensional	21	21	21	21	21
	- Syariah	-	-	-	-	-
	Jumlah	24	25	25	25	25

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka, BPS

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Tanah Datar sudah difasilitasi oleh lembaga keuangan berupa bank umum dan BPR.

b. Ketersediaan Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Tabel 2.97 berikut ini menyajikan jumlah dan jenis restoran di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.97

Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran, 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Restoran/Rumah makan/ Warung makan/Cafe	220	220	220	220	220

Sumber : BPS, Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada peningkatan jumlah Restoran/Rumah makan/Warung makan/Café.

c. Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013-2017 berdasarkan data sementara sebagaimana dilihat pada tabel 2.98 :

Tabel 2.978
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan, 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun														
		2013			2014			2015			2016			2017*		
		Hotel	kamar	tempat tidur	hotel	kamar	tempat tidur	hotel	kamar	tempat tidur	hotel	kamar	tempat tidur	hotel	kamar	tempat tidur
1.	Hotel Bintang 1	2	78	164	2	78	164	2	78	164	2	78	164	2	78	164
2.	Melati	4	79	168	4	79	168	4	79	168	4	79	168	4	79	168
3.	Wisma	2	18	25	2	18	25	2	18	25	2	18	25	2	18	25
4.	Cottage	1	20	30	1	20	30	1	20	30	1	20	30	1	20	30
5.	Home stay	3	12	23	3	12	23	3	12	23	3	12	23	3	12	23

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka

*data sementara

Dari tabel di atas terlihat bahwa perkembangan hotel dan penginapan lainnya semakin meningkat hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari luar daerah ke Kabupaten Tanah Datar.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Kemudahan Perizinan

Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari).



Tabel 2.99
Proses Perizinan, 2013 – 2017

Tahun	Uraian	SIUP	TDP	IUI	TDUH	IMB	HO
2013	Lama Mengurus (hari)	3	3	5	5	7	15
	Jumlah Persyaratan (dokumen)	6	4	6	4	7	10
	Biaya resmi	-	-	-	-	-	-
2014	Lama Mengurus (hari)	3	3	5	5	7	15
	Jumlah Persyaratan (dokumen)	6	4	6	4	7	10
	Biaya resmi	-	-	-	-	-	-
2015	Lama Mengurus (hari)	3	3	3	4	7	10
	Jumlah Persyaratan (dokumen)	6	4	6	4	7	10
	Biaya resmi	-	-	-	-	-	-
2016	Lama Mengurus (hari)	2	2	3	3	5	5
	Jumlah Persyaratan (dokumen)	6	4	6	4	7	10
	Biaya resmi	-	-	-	-	-	-
2017*	Lama Mengurus (hari)	2	2	3	3	5	5
	Jumlah Persyaratan (dokumen)	6	4	6	4	7	10
	Biaya resmi	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas PM PTSP Naker

*data sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perizinan di Kabupaten Tanah Datar semakin singkat, hal ini disebabkan karena meningkatnya pelayanan perizinan seperti sarana dan prasarana perizinan serta sumber daya manusia.

b. Peraturan Bupati yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Bupati (Perbup) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perbup inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perbup yang mendukung iklim usaha dapat terlihat pada tabel 2.100 :



Tabel 2.101

Jumlah Perbup yang Mendukung Iklim Usaha, 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Jumlah Perbup terkait perizinan	25	34	44	48	48

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Tanah Datar

*data sementara

Dari tabel di atas dapat dijelaskan jumlah Perbup yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Tanah Datar tahun 2013-2017 berdasarkan data sementara sebanyak 48 Perbup.

2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan D1/D2/D3 sampai dengan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.102

Rasio Kualitas Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Penduduk, 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Lulusan DI/DII/DIII	4,587	4.790	3.225	3.225	3.225*
2.	Jumlah Lulusan DIV/S1/S2/S3	14,110	12.834	15.539	15.539	15.539*
3.	Jumlah	18,697	17.624	18.764	18.764	18.764*
4.	Jumlah Penduduk	342,864	343.864	344.428	344.428	346.578
5.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	0,52	0,03	0,03	0,48	0,48

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka (2017)

*) Angka sementara

Sedangkan rasio kualitas tenaga kerja menurut PNS dan lulusan perguruan tinggi dapat dilihat pada tabel 2.103 :



Tabel 2.103

Rasio Kualitas Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Pegawai, 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Jumlah Lulusan S1	3,618	3.710	3.788	3.222	3.209
2.	Jumlah Lulusan S2/S3	191	175	199	142	154
3.	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	3,809	3.885	3.987	3.364	3.363
4.	Jumlah Pegawai	7,381	7.226	7.356	6.154	5.989
5.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	0.52	0,53	0,54	0,54	0,56

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka 2017

*BKPSDM

b. Tingkat Ketergantungan (*dependency ratio*)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.104 :

Tabel 2.104

Rasio Ketergantungan, 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Jumlah Penduduk usia < 15 tahun	99.319	101.068	98.890	80.420	80.420
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	27.862	28.048	27.997	32.996	32.996
3.	Jumlah Penduduk usia tdk produktif (1) & (2)	127.181	129.116	126.887	114.473	114.473
4.	Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun	215.683	217.120	216.988	251.624	251.624
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4)*100	58,97	59,47	58,47	45,71	45,71

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka 2017

*data sementara

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Tanah Datar cukup tinggi yang berarti bahwa tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Namun angka rasio ketergantungan cenderung menurun dari tahun 2013 sebesar 58,97% menjadi 45,71% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan semakin

berkurangnya beban yang ditanggung oleh penduduk produktif karena berkurangnya jumlah penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan dan kegiatan RKPD tahun 2017 dan realisasi RPJMD Tahun 2016 – 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp.553.698.988.272,50 dengan realisasi sebesar Rp.478.714.064.245,58 atau 86,46% yang dijabarkan kedalam 23 urusan wajib 6 urusan pilihan dan 5 urusan fungsi penunjang pemerintahan yang dilaksanakan oleh 39 Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan uraian sebagai berikut :

2.2.1.1. Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Pendidikan. Jumlah program urusan pendidikan sebanyak 9 program dengan 92 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan pendidikan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.74.621.980.595,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.68.085.396.709,00 atau tercapai sebesar 91,24%.

Dari 92 kegiatan yang ada pada urusan pendidikan terdapat 3 kegiatan yang realisasi fisiknya tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu :

- Kegiatan pembinaan Dewan Pendidikan realisasi fisiknya sebesar 25% karena belum terlaksananya musyawarah daerah dewan pendidikan.
- Kegiatan Penerapan Sistem dan informasi manajemen pendidikan realisasi fisiknya 75% karena tidak terlaksananya bimbingan teknis aplikasi pendataan pendidikan dasar.

Kegiatan Peningkatan kapasitas PGRI realisasi fisiknya 0% karena tidak adanya usulan RAB dari pengurus PGRI. Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya meningkatnya sarana dan prasarana beberapa sekolah seperti pembangunan RKB, terlaksananya program wajib belajar 9 tahun dan

pembinaan kepada guru, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan implementasi pendidikan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah pada SD/MI dan SMP/MTs.



Pembangunan RKB di SMP Negeri 1 Sungayang

2. Urusan Kesehatan

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan kesehatan di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat Daerah dan seluruh Kecamatan. Jumlah program urusan kesehatan sebanyak 45 program dengan 186 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.150.687.007.105,50 dengan realisasi Rp.128.569.691.513,00 atau 85,32%.

Dari 186 kegiatan yang ada pada urusan Kesehatan terdapat 13 kegiatan yang realisasi fisiknya tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu :

- Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan realisasi fisiknya 80% karena tidak teralisasinya kegiatan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut.
- Kegiatan Penyediaan Biaya operasional dan Puskesmas Batipuh I realisasi fisik 40% karena tidak trealisasinya beberapa pemeliharaan bangunan, peralatan kantor dan peralatan kedokteran.
- Kegiatan Penyediaan Operasional batipuh III realisasi fisik 75 % karena realisasi sesuai jumlah tagihan.

- Kegiatan penyelenggaraan Pelayanan krisis Kesehatan realisasi fisik 90% karena tidak teralisasinya manajemen penanggulanagn krisis kegiatan.
- Kegiatan Jaminan Persalinan realisasi fisik 50% karena rendahnya persentase ibu hamil dengan resiko tinggi yang tidak mempunyai jaminan kesehatan dan cukup dekatnya jarak pemukiman penduduk dengan sarana rujukan, sehingga tidak semua puskesmas mengusulkan rumah tunggu kelahiran, dari 5 RTK yang diusulkan 2 RTK yang terbentuk yaitu diwilayah kerja puskesmas lintau Buo I dan Lintau Buo III.
- Kegiatan Penanggulangan dan pencegahan factor resiko realisasi fisik 83% karena tidak terlaksananya beberapa sosialisasi peningkatan petugas dan evaluasi program dan pengadaan Posbindu.
- Kegiatan Pengembangan media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat realisasi fisik 50% karena pengadaan vidiotrone tidak terealisasi.
- Kegiatan peningkatan Pemanfaatan sarana Kesehatan realisasi fisik sebesar 30% karena pembentukan Forum Nagari siaga aktif belum terlaksana disebabkan oleh belum adanya wali nagari definitive.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas realisasi fisik 0% karena adanya kesalahan rekening.
- Kegiatan Rehabilitasi sedang/Berat puskesmas realisasi fisik 76% karena sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
- Kegiatan pengawasan dan pengendalian Keamanan dan kesehatan Makanan restoran realisasi fisik 80% karena realisasi sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
- Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan anak realisasi fisik 72% karena tidak terealisasinya beberapa kegiatan SHK pada 800 bayi baru lahir.
- Kegiatan pembinaan BOK UPT Puskesmas realisasi fisik 75% karena pengangkatan tenaga promkes tidak terealisasi.

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan, pengadaan kendaraan dinas (Ambulance), rehabilitasi gedung farmasi, pengadaan obat dan bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan dasar serta meningkatnya layanan kesehatan masyarakat.

Salah satu prestasi yang diperoleh Kabupaten Tanah Datar dibidang kesehatan pada Tahun 2017 yaitu menerima Piagam Penghargaan Swastisaba (Kabupaten Sehat tahun 2017) dari Menteri Kesehatan).



**Penerimaan
Penghargaan
Kabupaten Sehat oleh
Menteri Kesehatan
Kepada Kabupaten
Tanah Datar yang
diwakili Sekretaris
Daerah kabupaten
Tanah datar**

3. Urusan Pekerjaan Umum

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan pekerjaan umum di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pertanian. Jumlah program urusan pekerjaan umum sebanyak 28 program dengan 79 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan pekerjaan umum pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.139.011.625.381,00 dengan realisasi Rp.121.420.202.982,00 atau 87,35%.

Dari 79 kegiatan yang ada pada urusan Pekerjaan umum terdapat 3 kegiatan yang realisasi fisiknya tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu :

- Kegiatan rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran Pembawa realisasi fisik 37% karena penyedia jasa tidak bias menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan membuat surat pernyataan akan menyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu pelaksanaan 50 hari kerja dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
- Kegiatan pembangunan/peningkatan Infrastruktur realisasi fisik 36% karena pengadaan jaringan distribusi listrik tidak terlaksanan karena telah 4 kali gagal lelang.

- Kegiatan survey pemetaan realisasi fisik 65% karena penyedia jasa belum memperoleh berita acara pemeriksaan peta dasar dari badan informasi Geospasial.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya pembangunan gedung kantor, penyusunan DED jalan dua jalur, pembangunan drainase dan trotoar, pembangunan infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan dan jaringan irigasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kesejahteraan.

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan Penataan Penguasaan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah pada Kecamatan X Koto, dianggarkan sebesar Rp. 1.397.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.726.400 atau capaian kinerja 0,41%, hal ini disebabkan tanah yang akan dibeli masih berstatus tanah pertanian.



Salah satu kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Satpol PP dan

Pemadam Kebakaran. Jumlah program urusan perumahan sebanyak 9 program dengan 33 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan perumahan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.3.511.541.700,00 dengan realisasi Rp.3.118.958.375,00 atau 88,82%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya fasilitasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan Fasilitasi kegiatan Gapura Mantap.



Pemberian
Bantuan Gapura
Mantap

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Satpol PP dan Damkar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesbangpol, BPBD, Sekretariat Daerah dan seluruh Kecamatan. Jumlah program urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebanyak 65 program dengan 143 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.21.470.469.183,00 dengan realisasi Rp.18.564.590.761,00 atau 86,47%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya pembangunan gedung unit pos jaga pemadam kebakaran, pemberian pendidikan dan pelatihan, pengendalian keamanan lingkungan dan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), pelaksanaan kegiatan Waqaf 1000 Hafizh II tingkat kabupaten fasilitasi pelantikan wali nagari dan pelatihan satgas siaga nagari .

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat umumnya sudah tercapai dengan realisasi kinerja sudah mencapai 100 %, hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja yaitu menurunnya rasio kasus kriminalitas dari tahun 2016 sebesar 19,60 menjadi 8,96 pada tahun 2017.



Kegiatan penyuluhan untuk memberantas penyakit masyarakat

6. Urusan Sosial

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan sosial di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Daerah. Jumlah program urusan sosial sebanyak 11 program dengan 39 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan sosial pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.2.256.503.703,00 dengan realisasi Rp.2.130.212.809,00 atau 94,40%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya pemberdayaan masyarakat berupa pemberian bimbingan dan pelatihan, fasilitasi penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) kepada 18.634 KK masyarakat berpenghasilan rendah, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan pengelolaan bantuan sosial.

Pembagian Beras Rastra



7. Urusan Tenaga Kerja

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Jumlah program urusan tenaga kerja sebanyak 3 program dengan 14 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan tenaga kerja pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.908.620.200,00 dengan realisasi Rp.572.431.747,00 atau 63%.

Dari 14 kegiatan yang ada pada urusan Tenaga Kerja terdapat 1 kegiatan yang realisasi fisiknya tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu Kegiatan Pembangunan Balai Latihan kerja realisasi fisik 20% karena belum terlaksananya pengadaan tanah.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya pelaksanaan bimbingan dan pelatihan manajemen wirausaha, Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai dan pelatihan bagi para pencari kerja.



Kegiatan seleksi untuk pemagangan ke Jepang

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Baperlitbang. Jumlah program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 5 program dengan 9 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.1.214.537.400,00 dengan realisasi Rp.1.057.163.520,00 atau 87,04%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, koordinasi percepatan Kota Layak Anak, pembinaan organisasi perempuan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Kabupaten Tanah Datar untuk Tahun 2017 menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2017 yang diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise.



Kabupaten Tanah Datar menerima Penghargaan Kabupaten Layak Anak untuk Tahun 2017

9. Urusan Pangan

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan pangan di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Pangan dan Perikanan dan Dinas Pertanian. Jumlah program urusan penataan ruang sebanyak 6 program dengan 35 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan pangan pada tahun

anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.2.797.061.400,00 dengan realisasi Rp.2.575.052.214,00 atau 92,06%.

Dari 35 kegiatan yang ada pada urusan Pangan terdapat 1 kegiatan yang realisasi fisiknya tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu Kegiatan Analisis dan penyusunan pola Konsumsi dan Suplai Pangan realisasi fisik 75%

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya pemberian susu formula kepada keluarga miskin, pengadaan sarana produksi pemanfaatan pekarangan dan Peningkatan Produksi, Sekolah Lapang Pengembangan Teknologi Padi Salibu, peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Tanaman Pangan dan pelatihan pengolahan pangan lokal bagi Kelompok Wanita Tani.



Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serius dalam mewujudkan swasembada pangan

10. Urusan Pertanahan

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan pertanahan di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Koperindag, Dinas Parpora dan Kecamatan X Koto. Jumlah program urusan pertanahan sebanyak 4 program dengan 4 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan pertanahan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.3.551.407.500,00 dengan realisasi Rp.694.064.384,00 atau 19,54%.

Dari 4 kegiatan yang ada pada urusan pertanahan terdapat 2 kegiatan yang realisasi fisiknya tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu Kegiatan Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah realisasi fisik 55% karena semula direncanakan untuk pengadaan tanah seluas 2,5 Ha untuk pengembangan kawasan istano basa pagaruyung yang terealisasi seluas 1.500 m², pada Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga.

Kegiatan Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah realisasi fisik 0% karena semula direncanakan untuk pengadaan tanah kantor camat X Koto namun tidak terlaksana karena lokasi tidak cocok dengan peruntukan RTRW, pada Kecamatan X Koto.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya adanya pengadaan tanah untuk pengembangan Istano Basa Pagaruyung dan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan, Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Pemda, pendaftaran hak atas tanah dan koordinasi pengadaan tanah oleh pemerintah.

11. Urusan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Perkim LH, Dinas Pertanian, Baperlitbang, Dinas Pangan dan Perikanan dan Sekretariat Daerah. Jumlah program urusan lingkungan hidup sebanyak 11 program dengan 22 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan lingkungan hidup pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.5.308.816.440,00 dengan realisasi Rp.4.443.506.093,00 atau 83,70%.

Dari 22 kegiatan yang ada pada urusan lingkungan hidup terdapat 1 kegiatan yang realisasi fisiknya tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan realisasi fisik 80% karena belum terlaksananya pengadaan 1 (satu) unit Amroll truck.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya adanya penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, koordinasi dan pembinaan ke seluruh titik pantau penilaian Adipura serta tersedianya data dan informasi mengenai lingkungan.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seluruh Kecamatan. Jumlah program urusan kependudukan dan catatan sipil sebanyak 19 program dengan 44 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.4.065.606.200,00 dengan realisasi Rp.3.426.489.440,00 atau 84,28%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan keliling, penyusunan data base individu penduduk pada tiap-tiap nagari dalam kecamatan, pelayanan penerbitan dokumen adminduk adanya pengembangan data base kependudukan disetiap kecamatan dan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.

Permasalahan pada urusan ini yaitu kegiatan pembangunan gedung kantor Catatan Sipil fisik hanya terealisasi 10%, disebabkan karena gagal tender dana yang dianggarkan Rp. 500.000.000,- realisasi keuangan Rp. 20.950.000,- (4,19%) dengan fisik 10%. Kegiatan ini akan direalisasikan pada tahun 2018.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Baperlitbang, Sekretariat Daerah dan seluruh Kecamatan. Jumlah program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebanyak 53 program dengan 121 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.7.997.537.550,00 dengan realisasi Rp.7.104.786.115,00 atau 88,84%.

Dari 121 kegiatan yang ada pada urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat 4 kegiatan yang realisasi fisiknya tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu :

- Kegiatan Pembinaan nagari percontohan realisasi fisik 25% karena output kegiatan ini sama dengan kegiatan Nagari berprestasi.

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan realisasi fisik 75% karena kegiatan tidak semuanya terealisasi.
- Kegiatan Penilaian kompetensi wali nagari realisasi fisik 0% karena sebagian besar wali nagari masih berstatus penjabat.
- Kegiatan Penilaian Kompetensi sekretaris Nagari realisasi fisik 0% karena penilaian tingkat provinsi tidak terlaksana.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat, koordinasi, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi dan mengikuti Bursa Inovasi Desa tingkat provinsi, pelaksanaan Musrenbang Nagari, pembinaan nagari percontohan serta pelatihan manajemen pemerintahan nagari untuk Wali Nagari.

Pada Tahun 2017 Nagari Sungayang di Kabupaten Tanah Datar menerima penghargaan Terbaik 1 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat



14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jumlah program urusan pengendalian penduduk sebanyak 5 program dengan 8 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan penataan ruang pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.2.576.996.035,00 dengan realisasi Rp.2.102.214.000,00 atau 81,58%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya pembinaan kader KB, sosialisasi pembentukan dan penancangan kampung KB, pengadaan 60 paket sarana kerja PPKBJ/Sub PPKBJ, sosialisasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi remaja di sekolah-sekolah dan masyarakat serta mengikuti Temu Kader Kreatifitas PIK Remaja/Mahasiswa.

15. Urusan Perhubungan

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan perhubungan di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Perhubungan dan Sekretariat Daerah. Jumlah program urusan perhubungan sebanyak 12 program dengan 42 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan perhubungan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.3.056.938.319,00 dengan realisasi Rp.2.591.185.905,00 atau 84,76%.

Dari 42 kegiatan yang ada pada urusan Perhubungan terdapat 1 kegiatan yang realisasi fisiknya tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu Kegiatan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan realisasi fisik 25% karena penysusnan dokumen DED rute Aman selamat sekolah (RASS) tidak terlaksana karena gagal tender.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya, pembangunan 2 Unit halte, berupa pengadaan 68 buah rambu lalu lintas, pengadaan dan pemasangan marka jalan dan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Jumlah program urusan komunikasi dan informatika sebanyak 9 program dengan 32 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.6.062.082.290,00 dengan realisasi Rp.5.449.814.952,00 atau 89,90%.



Kabupaten Tanah Datar menerima penghargaan peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, sosialisasi jurnalistik, Pengelolaan ICT Taining Center, pengadaan 1 (satu) unit media visualisasi Videotron serta pemasangan 4 (empat) unit baliho di BIM Padang, Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi.



Gambar 2.7

Tampilan Awal Website Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

17. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Koperasi UKM

Perindustrian dan Perdagangan dan Sekretariat Daerah. Jumlah program urusan koperasi dan usaha kecil menengah sebanyak 10 program dengan 32 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan koperasi dan usaha kecil menengah pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.1.195.243.999,00 dengan realisasi Rp.1.070.603.428,00 atau 89,57%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi, fasilitasi Pengembangan UMKM, sosialisasi pengembangan modal usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan promosi.

18. Urusan Penanaman Modal

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan penanaman modal di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah program urusan penanaman modal sebanyak 5 program dengan 21 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan penanaman modal pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp. 694.680.000,00 dengan realisasi Rp.676.557.320 atau 97,39%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya koordinasi kegiatan penanaman modal, sosialisasi kebijakan penanaman modal, keikutsertaan dalam Forum Investasi Sumbar, Batam Tourism Expo, Regional Investment Forum dan Nusantara Expo dan fasilitasi kemudahan pelayanan perizinan melalui pelayanan satu pintu.

Tampilan awal website siPintar yang merupakan salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah untuk mempermudah urusan masyarakat dalam hal pengurusan perizinan di Dinas PMTPSNaker Kab. Tanah Datar





19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah dan seluruh Kecamatan. Jumlah program urusan kepemudaan dan olahraga sebanyak 34 program dengan 41 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.6.011.736.600.000,00 dengan realisasi Rp.4.979.218.283,00 atau 82,82%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya seleksi, pembekalan dan reward personil Paskibraka dan marching band, pelaksanaan kegiatan POPDA, PEPARPELDA (Pekan Olahraga Paralimpic Pelajar Daerah), KEJURDA tinju, PORDIDA (Pekan Olahraga Bela Diri Daerah), seleksi sepakbola liga nusantara dan pemberian reward kepada atlet berprestasi tingkat propinsi dan nasional, pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan peningkatan peran serta kepemudaan.

20. Urusan Statistik

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan statistik di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Badan Keuangan Daerah dan seluruh kecamatan. Jumlah program urusan statistik sebanyak 15 program dengan 16 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan statistik pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.829.365.000,00 dengan realisasi Rp.196.524.833,00 atau 23,70%.

Dari 16 kegiatan yang ada pada urusan Statistik terdapat 1 kegiatan yang realisasi fisiknya tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu Kegiatan pendataan ulang/Verifikasi PBB dan BPHTB realisasi 2,37% karena kegiatan tidak terlaksana disebabkan gagal tender.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya Penyusunan dan Pengumpulan Data serta Statistik Daerah, pendataan dan pengawasan terhadap objek pajak dan retribusi daerah dan pendataan ulang dan verifikasi terhadap objek PBB dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

21. Urusan Kebudayaan

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan kebudayaan di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seluruh Kecamatan. Jumlah program urusan kebudayaan sebanyak 17 program dengan 20 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan kebudayaan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.1.008.674.900,00 dengan realisasi Rp.906.296.486,00 atau 89,85%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah, Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah.

Gambar 2.8

***Festival Budaya
Minangkabau di
Istana Basa
Pagaruyung***



Di Tahun 2017 dibidang kebudayaan Kabupaten Tanah Datar berhasil memecahkan Rekor Muri untuk makan Bajamba sebanyak 1111.

22. Urusan Perpustakaan

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan perpustakaan di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jumlah program urusan perpustakaan sebanyak 5 program dengan 28 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan perpustakaan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.3.615.703.518,00 dengan realisasi Rp.3.410.835.489,00 atau 94,33%

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya pembangunan gedung kantor, penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, pengembangan Minat dan Budaya Baca dan pengadaan buku. Salah satu bentuk inovasi pada urusan perpustakaan yaitu gerbang cerdas melalui gerobak baca.



Gambar 2.9

Gerobak Baca bertujuan untuk lebih mendekatkan buku kepada masyarakat

23. Urusan Kearsipan

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan kearsipan di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jumlah program urusan kearsipan sebanyak 2 program dengan 5 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan kearsipan pada tahun anggaran 2017

seluruhnya sebesar Rp.364.690.991,00 dengan realisasi Rp.321.564.700,00 atau 88,17%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip, pembinaan/penataan arsip dinamis aktif pada 2 (dua) OPD, 13 nagari, 1 (satu) BUMD, 2 (dua) perusahaan, 2 (dua) orpol dan 2 (dua) ormas serta pembinaan arsip in aktif, Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah serta Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip.

2.2.1.2. Urusan Pilihan

24. Urusan Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Pangan dan Perikanan. Jumlah program urusan kelautan dan perikanan sebanyak 4 program dengan 12 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.3.289.290.437,00 dengan realisasi Rp.2.547.422.614,00 atau 77,45%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya pelatihan pembudidaya dan petugas perikanan, sosialisasi hama dan penyakit ikan kepada 30 orang pembudidaya ikan serta uji sampel air kolam dan penyakit ikan, belanja pakan ikan sebanyak 8.600 kg, belanja benih ikan nila sebanyak 12.500 ekor, belanja benih ikan mas sebanyak 5.000 ekor, pembayaran kontrak lahan BBI 4 (empat) unit dan pembayaran honor petugas BBI 5 (lima) orang, Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan.



Gambar 2.10
Restocking perairan
umum

25. Urusan Pariwisata

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Sekretariat daerah. Jumlah program urusan pariwisata sebanyak 9 program dengan 34 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan pariwisata pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.10.005.589.000,00 dengan realisasi Rp.8.239.533.255,00 atau 82,35%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, mengikuti Pameran Inacraf, Apkasi, Pesona Wisata dan Budaya Tanah Datar dan Pameran Pesona Wisata dan Budaya Tanah Datar di Malaysia, Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu, dan mendukung pelaksanaan Tour De Singkarak, Pagaruyung Walk Heritage, Pesta Danau Singkarak, Festifal Lima Danau, Gowes Jelajah Budaya, Lomba Foto Wisata, Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan, pembangunan gedung TIC (Tourism Information Centre) di Istano Basa Pagaruyung, dan Festival Pesona Budaya Minangkabau serta Lomba Arakan Jamba.



Grand Opening Tour de Singkarak di Istano Basa Pagaruyung

26. Urusan Pertanian

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan pertanian di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah dan Dinas Pangan dan Perikanan. Jumlah program urusan pertanian sebanyak 15 program dengan 47 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan pertanian pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.11.422.124.461,00 dengan realisasi Rp.9.258.680.617,00 atau 81,06%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, Penyediaan Prasarana dan Sarana Budidaya dan Pasca Panen Tembakau, penilaian dan pemberian penghargaan kepada petani berprestasi, Pembangunan Pusat-pusat Etalase/Eksepsi/ Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.



Panen teknologi padi salibu

27. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah program urusan energi dan sumberdaya mineral sebanyak 3 program dengan 5 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan energi dan sumberdaya mineral pada tahun

anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.257.384.300,00 dengan realisasi Rp.255.749.172,00 atau 99,36%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah, pemetaan potensi air tanah dan Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG.

28. Urusan Perdagangan

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan perdagangan di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dan Sekretariat Daerah. Jumlah program urusan perdagangan sebanyak 5 program dengan 12 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan perdagangan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.2.579.584.800,00 dengan realisasi Rp.2.391.162.923,00 atau 92,70%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya pelaksanaan tera ulang timbangan dan tera ulang 3 (tiga) buah SPBU, sosialisasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), berupa mengikuti pasar lelang forward dan mengikuti pameran Sumbar Expo, Nusantara Expo dan Pagaruyung Expo, penataan administrasi dan pemungutan retribusi sewa toko, kios dan los pasar serikat C Batusangkar, penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemasangan 1 (satu) unit Hydran dan pembinaan administrasi pengelolaan 42 pasar nagari.

29. Urusan Perindustrian

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan perindustrian di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Jumlah program urusan perindustrian sebanyak 3 program dengan 6 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan perindustrian pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.3.313.808.600,00 dengan realisasi Rp.3.162.314.291,00 atau 95,43%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas, Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi, Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya, Pameran Inacraf, Kriya Nusa, APKASI, NES (Negeri Elok Sejahtera), Bhayangkara EXPO, SISCA, MTQ Tingkat Sumbar, festival Pesona Budaya Minangkabau dan mengikuti lomba baju pakaian

muslim kegiatan Dekranasda serta pengadaan 34 stel baju untuk pengurus Dekranasda dan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Daerah

2.2.1.3. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

30. Urusan Administrasi Pemerintahan

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan administrasi pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas PMPTSP, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan seluruh Kecamatan. Jumlah program urusan administrasi pemerintahan sebanyak 90 program dengan 415 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan kehutanan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.55.145.311.466,00 dengan realisasi Rp.47.563.115.355,00 atau 86,25%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya pemeriksaan lapangan terhadap izin usaha yang diajukan oleh pelaku usaha, Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa/Nagari, Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN, Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan, Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, pengadaan kendaraan dinas dan pengadaan sarana prasarana gedung kantor.

31. Urusan Pengawasan

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan pengawasan di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Inspektorat, Sekretariat Daerah, Baperlitbang dan Badan Keuangan Daerah. Jumlah program urusan pengawasan sebanyak 11 program dengan 33 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan kehutanan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.2.781.931.400,00 dengan realisasi Rp.2.533.404.985,00 atau 91,07%.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya peningkatan kapasitas apratur, pengawasan internal secara berkala, Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, pembentukan satgas, evaluasi pelaksanaan dan sosialisasi rencana tindak pengendalian SPIP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mampu mencapai level 3 dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat. Urusan Pengawasan kinerja sudah mencapai 100%. Dapat kita lihat dari pencapaian SPIP pada level 3.



Penerimaan
Penghargaan
SPIP Level 3

32. Urusan Perencanaan

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan perencanaan di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Kesehatan, Baperlitbang, Dinas PMD dan PPKB, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dan BKPSDM. Jumlah program urusan perencanaan dan pembangunan sebanyak 24 program dengan 56 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.6.462.935.152,00 dengan realisasi Rp.5.292.966.670,00 atau 81,90%.



Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya pengadaan peralatan gedung kantor, penyusunan data dan informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah melalui aplikasi Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten

Tanah Datar 2017, mengikuti Musrenbang Kecamatan dan pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, tersedianya dokumen perencanaan daerah serta data dan informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah atau RKPD Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerima Penghargaan Pembangunan Daerah terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan 14 Besar di Tingkat Nasional.



Penghargaan 14 Besar Perencanaan Terbaik di Tingkat Nasional

33. Urusan Keuangan

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan keuangan di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PMPTSP, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan seluruh Kecamatan. Jumlah program urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebanyak 38 program dengan 87 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.11.083.096.250,00 dengan realisasi Rp.10.248.288.165,00 atau 92,47%

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya penyusunan dokumen keuangan daerah, penilaian inventarisasi aset, operasional operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan implementasi aplikasi SIMDA Nagari (SIMNAG) bekerja



sama dengan BPKP Perwakilan Sumatera Barat. Selain itu juga menggunakan aplikasi *e-Budgeting* (Simda Keuangan).

Untuk pelaporan keuangan Kabupaten Tanah Datar telah menerima penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 6 kali berturut terakhir untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Dan untuk penetapan APBD setiap tahunnya ditetapkan tepat waktu sebelum tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.



34. Urusan Kepegawaian

Untuk mencapai indikator utama sasaran urusan kepegawaian di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekretariat Daerah. Jumlah program urusan kepegawaian sebanyak 9 program dengan 43 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan kepegawaian pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.4.539.106.397,00 dengan realisasi Rp.3.753.664.139,00 atau 82,70%

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya pengiriman 38 orang ASN mengikuti Diklat Pim II, III dan IV, penyelenggaraan diklat Pelayanan Publik sebanyak 40 orang dan Diklat Revolusi mental sebanyak 166 orang, penyusunan data informasi

kepegawaian, buku DUK, Buku Bezetting Kepegawaian dan Pembuatan buku profil pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, pelaksanaan diklat Penanggulangan Penderita Gawat Darurat Bencana (PPGDB), diklat Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Nagari dan Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pada masing – masing Misi dan Sasaran serta indikator kinerja yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 serta capaian terhadap indikator makro ekonomi maka dapat dirumuskan permasalahan dan isu strategis yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah seperti tabel 2.129 :

Tabel 2.129

Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Prioritas 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengalaman Nilai-Nilai Agama, Adat dan Budaya
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pemahaman nilai-nilai agama adat dan budaya 2. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi masyarakat, sosial dan keagamaan. 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma/aturan hukum yang berlaku yang diindikasikan dengan masih adanya sengketa sako dan pusako. 4. Sanggar seni dan Budaya belum berkembang dengan baik
Prioritas 2	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah yang diindikasikan dengan belum tuntasnya Wajib Belajar 9



	<p>Tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) semakin rendah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Masih tingginya tingkat kematian ibu saat melahirkan. Masih belum optimalnya penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat). Masih terdapatnya balita gizi buruk
Prioritas 3	Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan dan lembaga keuangan
	<ol style="list-style-type: none"> Walaupun lapangan usaha pertanian mendominasi dalam kontribusi PDRB tetapi belum mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Masih terjadinya ketimpangan ekonomi secara umum. Belum terpenuhinya standarisasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi daerah. Masih rendahnya daya saing produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Masih terbatasnya kesadaran penerapan pola konsumsi pangan yang aman, bergizi, seimbang, beragam, merata dan terjangkau. Belum terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Masih terbatasnya kualitas kelembagaan yang dikelola oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Rendahnya kemitrausahaan Belum optimalnya penerimaan pariwisata pemanfaatan potensi kepariwisataan, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun event pariwisata yang mendorong tingkat kunjungan ke objek wisata dan perekonomian di wilayah kawasan wisata.



	10. Masih rendahnya keterkaitan antar lapangan usaha
Prioritas 4	Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan
	1. Masih terdapatnya angkatan kerja yang menganggur serta penduduk yang miskin
Prioritas 5	Peningkatan Infrastruktur Daerah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur jalan belum memadai. 2. Belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan antar daerah dalam wilayah kabupaten. 3. Cakupan pelayanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan masih terbatas. 4. Kondisi kualitas dan kuantitas drainase belum memadai sehingga berpotensi terjadi genangan air yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. 5. Masih terbatasnya sarana prasarana sanitasi permukiman. 6. Masih adanya wilayah di Kabupaten Tanah Datar yang belum terlayani oleh jaringan Komunikasi dan Informatika.
Prioritas 6	Penanggulangan Bencana alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya cakupan layanan persampahan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup 4. Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana, lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam. 5. Terbatasnya Sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam
Prioritas 7	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap

	<p>pelaksanaan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Belum optimalnya penegakan Perda</p>
Prioritas 8	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	<p>1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, aspiratif dan partisipatif.</p> <p>2. Belum meratanya penyebaran sumber daya manusia (ASN) sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.</p> <p>3. Masih lemahnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan.</p> <p>4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>5. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan sehingga ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.</p>

2.3.2. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Pembangunan

Berdasarkan fakta dan potensi yang ada, dirumuskan permasalahan yang nantinya akan dianalisa dan ditetapkan menjadi isu-isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar dikelompokkan menjadi 6 (enam) aspek pembangunan yang mencakup :

a. Aspek Geografi dan Potensi SDA Daerah

Permasalahan yang terkait dengan aspek geografis dan potensi sumber daya alam di Kabupaten Tanah Datar antara lain adalah:

1. Secara geografis Kabupaten Tanah Datar terletak tepat di tengah Provinsi Sumatera Barat, namun posisi strategis tersebut belum diikuti oleh aksesibilitas yang memadai karena pengaruh topografi daerah yang cenderung berbukit-bukit dan lembah yang curam serta luasnya cakupan wilayah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan rencana tata ruang yang berwawasan lingkungan dalam perencanaan pembangunan.
3. Adanya potensi sumberdaya alam dan energi terbarukan yang belum terakomodasi dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031.
4. Sebagian besar daerah berada pada kawasan rawan bencana alam, sehingga memiliki resiko tinggi dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya di kawasan tersebut.

b. Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

Permasalahan makro yang terkait aspek demografi dan potensi SDM diantaranya adalah:

1. Masih dijumpai pengangguran tersembunyi.
2. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah yang diindikasikan dengan belum tuntasnya Wajib Belajar 9 Tahun.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) semakin rendah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
4. Masih tingginya tingkat kematian ibu saat melahirkan.
5. Belum terpenuhinya rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.
6. Masih belum optimalnya penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).
7. Masih terbatasnya kualitas dan daya saing pencari kerja.
8. Belum tersedianya kebijakan dalam menghadapi era bonus demografi di daerah.

c. Aspek Infrastruktur, Transportasi, Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang terkait dengan aspek infrastruktur, transportasi dan komunikasi di Kabupaten Tanah Datar antara lain adalah :

1. Kondisi Kabupaten Tanah Datar rawan bencana alam.
2. Infrastruktur jalan belum memadai.
3. Cakupan pelayanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan masih terbatas.
4. Masih terdapat sejumlah rumah tidak layak huni, yang disebabkan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat.
5. Kondisi kualitas dan kuantitas drainase belum memadai sehingga berpotensi terjadi genangan air yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
6. Masih terbatasnya sarana prasarana sanitasi permukiman.
7. Masih adanya wilayah di Kabupaten Tanah Datar yang belum terlayani oleh jaringan Komunikasi dan Informatika.

d. Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat

Permasalahan pembangunan pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan masalah sentral dalam peningkatan kegiatan ekonomi yang pada muaranya adalah meningkatkan kualitas

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, adapun masalah yang terakut dengan hal ini diantaranya adalah:

1. Lapangan usaha pertanian mendominasi dalam kontribusi PDRB tetapi belum mampu mendorong terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Masih terjadinya ketimpangan ekonomi secara umum.
3. Masih lemahnya keterkaitan antar lapangan usaha dalam perekonomian, sehingga masih terbatasnya kemampuan penciptaan nilai tambah dalam perekonomian lokal.
4. Belum terpenuhinya standarisasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi daerah.
5. Masih rendahnya daya saing produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
6. Masih terbatasnya kesadaran penerapan pola konsumsi pangan yang aman, bergizi, seimbang, beragam, merata dan terjangkau.
7. Belum terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
8. Belum optimalnya pemanfaatan potensi kepariwisataan, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun event pariwisata yang mendorong tingkat kunjungan ke objek wisata dan perekonomian di wilayah kawasan wisata.
9. Masih terbatasnya kualitas kelembagaan yang dikelola oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.
10. Masih terbatasnya kualitas SDM pengelola kelembagaan ekonomi dan sosial yang ada di dalam masyarakat.
11. Masih terbatasnya kualitas infrastruktur pasar nagari dan pasar di pusat kegiatan ekonomi daerah.
12. Masih adanya koperasi yang tidak aktif.

e. Aspek Pemerintahan dan Sosial Budaya

Masalah yang dihadapi dalam aspek pemerintahan dan sosial budaya antara lain:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, aspiratif dan partisipatif.
2. Belum meratanya sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Masih lemahnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan.

4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.
5. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan sehingga ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
6. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi masyarakat, sosial dan keagamaan.
7. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma/aturan hukum yang berlaku yang diindikasikan dengan masih adanya sengketa sako dan pusako.
8. Belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan lembaga adat dalam pembangunan daerah.
9. Masih terjadi kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

f. Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah

Aspek sistem inovasi dan teknologi merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Hal ini menjadi semakin penting karena keterbatasan sumberdaya alam akan mempersulit pencapaian tujuan pembangunan dan keberlanjutannya. Masalah utama yang dihadapi dalam aspek ini diantaranya adalah:

1. Masih terbatasnya kemampuan adopsi teknologi masyarakat dan kelompok usaha.
2. Masih terbatasnya fasilitas untuk pengembangan dan alih teknologi.
3. Belum adanya jaringan kerjasama untuk pengembangan inovasi dan teknologi.
4. Belum tersedianya lembaga khusus yang mendorong terwujudnya sistem inovasi dan alih teknologi di tingkat Kabupaten (system inovasi daerah).

2.4. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan di daerah secara umum adalah :

1. Masih rendahnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama, akhlak, budi pekerti dan tatanan kehidupan.
2. Belum optimalnya kualitas dan akses pendidikan
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan, kesadaran hidup bersih dan sehat, serta kesehatan lingkungan.
4. Masih adanya pengangguran dan penduduk miskin.

5. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan belum optimalnya penataan ruang dan kawasan strategis.
6. Peningkatan daya saing ekonomi daerah.
7. Belum optimalnya pelaksanaan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan santun).

Adapun isu strategis sesuai aspek pembangunan adalah sebagai berikut:

a. Aspek Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan identifikasi permasalahan aspek geografi dan potensi sumber daya alam yang telah diidentifikasi di atas, maka rumusan isu strategis untuk aspek ini adalah:

1. Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan daerah dengan mempertimbangkan potensi geografis kawasan strategis, konektivitas, kondisi rawan bencana alam serta konstelasi antar kawasan pengembangan di daerah.
2. Optimalisasi perencanaan tata ruang yang telah ada untuk dapat meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kawasan budi daya yang berwawasan lingkungan.
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan energy terbarukan dengan tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan, memperbesar skala ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang lebih potensial.
4. Perencanaan dan pengembangan ekonomi terpadu pada kawasan pengembangan ekonomi daerah dengan melakukan kajian peluang investasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

b. Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan kelompok usia belum atau tidak produktif (anak sekolah dan lansia) dengan rasio ketergantungan sebesar 59,47 %, tetapi tingkat pengangguran cenderung fluktuatif, kondisi ini dikhawatirkan akan mendorong terjadinya pengangguran tersembunyi jika peningkatan penciptaan lapangan kerja tidak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut.



2. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran maka diperlukan peningkatan koordinasi dan integrasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada masing-masing SKPD.
3. Dibutuhkan peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan nilai IPM dan daya saing SDM.
4. Dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja menghadapi era keterbukaan ekonomi dan persaingan bebas maka diperlukan pengembangan pendidikan vokasional berbasis komunitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja daerah.

c. Aspek Infrastruktur, Transportasi, Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan daftar permasalahan yang dapat diidentifikasi tersebut, maka dirumuskan isu strategisnya yaitu:

1. Untuk dapat mendorong mobilitas dan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan daerah, maka diperlukan peningkatan kualitas infrastuktur (jalan, jembatan, irigasi, drainase dan air bersih) dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana guna mengantisipasi berbagai kerawanan bencana alam di daerah.
2. Untuk meningkatkan intensitas dan konektivitas antar daerah dalam kabupaten dan antar kota/kabupaten diperlukan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan lalu lintas yang memenuhi standar kelayakan angkutan umum baik antar nagari maupun antar kota dalam provinsi termasuk penataan dan kepastian aturannya.
3. Dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan kewaspadaan terhadap berbagai bencana maka diperlukan penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang memenuhi persyaratan sanitasi, drainase, pelayanan air bersih dan daya terpasang listrik yang berbasis mitigasi bencana.
4. Untuk menciptakan wilayah administrasi yang memiliki kekuatan hukum maka diperlukan penetapan peraturan daerah tentang batas administrasi nagari, batas administrasi dengan daerah kota dan kabupaten tetangga dengan mempertimbangkan implikasi sosial budaya dan ekonominya di tengah masyarakat
5. Untuk mendorong percepatan perluasan pembangunan daerah maka perlu dilakukan percepatan pembangunan pada pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan cepat tumbuh daerah dengan mempertimbangkan potensi kawasan

strategis daerah dan konektivitas serta korelasi eksternal antar kawasan pengembangan.

6. Peningkatan dan pemerataan fasilitas serta akses informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan yang semakin meluas di tengah masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan daya saing baik sumberdaya manusia maupun komoditas lokal yang dihasilkan dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif.

d. Aspek ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Perlu upaya peningkatan keterkaitan antar dan intra lapangan usaha agar dapat mewujudkan penguatan fundamental makro ekonomi daerah, peningkatan daya dorong terhadap produktivitas, peningkatan nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi daerah.
2. Usaha Mikro Kecil dan industri non formal memiliki jumlah yang besar di dalam perekonomian daerah, untuk itu diperlukan pemberdayaan dan peningkatan status usaha menjadi usaha formal sesuai aturan berlaku guna meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai tambah perekonomian daerah
3. Kebijakan perluasan kesempatan usaha dan bekerja dengan peningkatan jiwa kewirausahaan dan pendidikan vokasional (kejuruan) berbasis komunitas dan sumber daya lokal serta pengembangan ekonomi berbasis kawasan, spesialisasi, kreativitas dan iptek diperlukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi.
4. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha, dan aparatur pelaksana berbasis iptek, imtak dan budaya serta kearifan lokal diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas, daya saing dan kekuatan moral sesuai nilai-nilai lokal, adat dan budaya Minangkabau.
5. Perlu peningkatan kualitas pengelolaan pasar nagari agar mampu menjadi wadah dan media pengembangan serta penguatan jaringan pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar.
6. Perlu penataan kelembagaan ekonomi dan petani serta kelembagaan lainnya untuk mendorong peningkatan aktivitas, kualitas dan produktivitas ekonomi masyarakat.

**e. Aspek Kelembagaan, Pemerintahan dan Sosial Budaya**

Isu strategis yang perlu diperhatikan dalam upaya perencanaan pemerintahan dan sosial budaya ke depan adalah:

1. Perlu peningkatan kuantitas, kualitas dan peran SDM aparatur pada Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, santun dan melayani sesuai nilai budaya adat Minangkabau melalui Reformasi Birokrasi dan revolusi mental.
2. Perlu optimalisasi peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
3. Diperlukan adanya regulasi dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat yang berbasis nilai filosofi budaya Minangkabau.
4. Peningkatan optimalisasi penanganan penanggulangan permasalahan sosial masyarakat dan peningkatan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Anak serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

f. Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah

Isu strategis yang dirumuskan terkait dengan masalah pembangunan dalam aspek ini adalah:

1. Diperlukan adanya pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga riset perguruan tinggi dan lembaga riset nasional untuk pengembangan inovasi daerah dalam mengembangkan ekonomi berbasis iptek dan sumberdaya lokal.
2. Diperlukan pembentukan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mendorong peningkatan kemampuan teknologi, daya inovasi dan kreativitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha dalam rangka menghadapi persaingan ekonomi di era globalisasi dan persaingan bebas.
3. Perlu adanya edukasi dan sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna, teknologi komunikasi dan informasi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau.



2.4.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.1.1. Isu Strategis Nasional

Tabel 2.130
Isu Strategis Nasional

No.	Bidang/Tema	Isu Strategis	
1	SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA	1.1	Kependudukan dan Keluarga Berencana
		1.1.1.	Pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
		1.1.2.	Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB (KKB);
		1.1.3.	Penguatan kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan KB;
		1.1.4.	Penguatan data dan informasi kependudukan dan KB.
		1.2	Kesehatan dan Gizi Masyarakat
		1.2.1.	Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia;
		1.2.2.	Percepatan perbaikan status gizi masyarakat;
		1.2.3.	Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
		1.2.4.	Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;
		1.2.5.	Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan;
		1.2.6.	Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan;
		1.2.7.	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
		1.2.8.	Peningkatan manajemen, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi kesehatan;
		1.2.9.	Pengembangan dan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan;
		1.2.10.	Pengembangan jaminan kesehatan nasional.
		1.3	Pendidikan
		1.3.1.	Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas;
		1.3.2.	Peningkatan kualitas pembelajaran;
		1.3.3.	Peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK);
		1.3.4.	Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi;
		1.3.5.	Peningkatan akses dan kualitas PAUD;
		1.3.6.	Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa;
		1.3.7.	Peningkatan pendidikan keagamaan;
		1.3.8.	Penguatan pendidikan agama, pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter untuk mendukung Revolusi Mental;
		1.3.9.	Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan;



No.	Bidang/Tema	Isu Strategis	
		1.3.10.	Penguatan tata kelola pendidikan.
		1.4	Perpustakaan
		1.4.1.	Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca.
		1.5	Pemuda dan Olahraga
		1.5.1.	Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
		1.5.2.	Peningkatan budaya dan prestasi olahraga.
		1.6	Kebudayaan
		1.6.1.	Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
		1.6.2.	Peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya;
		1.6.3.	Pelestarian warisan budaya;
		1.6.4.	Peningkatan promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya; dan
		1.6.5.	Pengembangan sumber daya kebudayaan.
		1.7	Agama
		1.7.1.	Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
		1.7.2.	Peningkatan kerukunan umat beragama;
		1.7.3.	Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
		1.7.4.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
		1.7.5.	Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.
		1.8	Kesejahteraan Sosial
		1.8.1.	Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lanjut usia;
		1.9	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		1.9.1.	Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
		1.10	Perlindungan Anak
		1.10.1.	Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal;
		1.10.2.	Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
		1.10.3.	Peningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.
2	EKONOMI	2.1	Perkembangan Ekonomi Makro
		2.2	Reformasi Keuangan Negara
		2.2.1.	Peningkatan penerimaan negara;
		2.2.2.	Peningkatan kualitas belanja negara melalui sinergitas perencanaan dan penganggaran baik di pusat maupun di daerah.
		2.3	Stabilitas Moneter
		2.3.1.	Menjaga stabilitas laju inflasi;
		2.3.2.	Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah;
		2.3.2.	Meningkatkan koordinasi kebijakan.
		2.4	Makroprudensial dan Keuangan yang Inklusif
		2.4.1.	Ketidakseimbangan likuiditas internasional, serta fragmentasi likuiditas di sistem keuangan domestik;



No.	Bidang/Tema	Isu Strategis	
		2.4.2.	Pasar keuangan yang belum mendalam (<i>financial deepening</i>) dan likuid;
		2.4.3.	Penguatan permodalan dan aset, likuiditas dan strategi keuangan
		2.4.4.	Masih terkendalanya fungsi intermediasi perbankan;
		2.4.5.	Peran lembaga keuangan non-bank (LKNB) seperti asuransi, dana pensiun, dan pasar modal masih relatif kecil dalam perekonomian;
		2.4.6.	Meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor keuangan dalam mendukung pembangunan/ pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
		2.5	Re-Industrialisasi yang Berkelanjutan
		2.5.1.	Deindustrialisasi;
		2.5.2.	Populasi dan struktur industri lemah;
		2.5.3.	Bahan mentah diekspor sementara bahan setengah jadi diimpor;
		2.5.4.	Ketergantungan pada impor tinggi;
		2.5.5.	Produktivitas rendah;
		2.5.6.	Industri terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera.
		2.6	Peningkatan Efisiensi, Produktivitas, dan Daya Saing BUMN
		2.6.1.	Peran BUMN sebagai pendukung penyedia bahan kebutuhan pokok/pangan, penunjang pertumbuhan ekonomi dan penyerap angkatan kerja yang masih belum optimal;
		2.6.2.	Beberapa BUMN masih belum menunjukkan kinerja yang baik.
		2.7	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
		2.7.1.	Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal (98,8%), dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah;
		2.7.2.	Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah (kurang dari 19,0%) dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan;
		2.7.3.	Koperasi masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.
		2.8	Peningkatan Pariwisata
		2.8.1.	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata;
		2.9	Peningkatan Ekonomi Kreatif
		2.9.1.	Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif;
		2.10	Penguatan Investasi
		2.10.1.	Sebaran investasi yang belum berimbang dimana pulau Jawa masih sebagai pusat investasi di Indonesia;
		2.10.2.	Investasi di sektor manufaktur meningkat, tetapi sebagian besar untuk pemenuhan pasar dalam Negri;
		2.10.3.	Proses perijinan masih belum efisien;
		2.10.4.	Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal;



No.	Bidang/Tema	Isu Strategis	
		2.10.5.	Ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih terbatas;
		2.10.6.	Proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi Hambatan
		2.10.7.	Masih banyaknya regulasi yang tidak harmonis dan peraturan daerah yang distortif;
		2.10.8.	Kurang harmonisnya peraturan pusat dan daerah, antar instansi, dan seringnya perubahan peraturan telah mengurangi kepastian berusaha bagi investor;
		2.10.9.	Kondisi bisnis di Indonesia dinilai masih belum cukup bersaing dibandingkan dengan negara-negara lain terutama dalam satu kawasan
		2.10.10.	Pasar tenaga kerja yang kurang kondusif;
		2.10.11.	Masih tingginya perilaku anti persaingan.
		2.11	Mendorong Perdagangan Dalam Negeri
		2.11.1.	Masih terdapatnya kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok yang tinggi;
		2.11.2.	Belum optimalnya aktivitas perdagangan dalam negeri;
		2.11.3.	Masih rendahnya minat masyarakat terhadap produk domestik;
		2.11.4.	Belum optimalnya upaya perlindungan konsumen.
		2.12	Peningkatan Daya Saing Ekspor
		2.12.1.	Sebagian besar ekspor merupakan komoditas primer;
		2.12.2.	Masih rendahnya tingkat diversifikasi pasar tujuan ekspor;
		2.12.2.	Masih rendahnya daya saing ekspor jasa;
		2.12.3.	Meningkatnya hambatan non tarif;
		2.12.4.	Fasilitasi ekspor yang belum optimal.
		2.13	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja
		2.13.1.	Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja sebanyak yang dibutuhkan dalam tiga tahun terakhir (2010-2013)
		2.13.2.	Tingkat pertumbuhan ekonomi belum mampu mengatasi tantangan demografis pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah penganggur;
		2.13.3.	Transformasi struktur pasar tenaga kerja lebih ke arah sektor jasa dengan produktivitas rendah;
		2.13.4.	Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas dan daya saing rendah;
		2.13.5.	Ketidaksihinggaan antara kebutuhan industri terhadap tenaga kerja dengan pendidikan dan pelatihan.
		2.13.6.	Pasar tenaga kerja diwarnai banyak pekerja rentan yang produktivitasnya rendah;
		2.13.7.	Kenaikan upah tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas;
		2.13.8.	Efisiensi pasar tenaga kerja dalam pilar daya saing melemah;
		2.13.9.	Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja.
		2.14	Perlindungan Pekerja Migran
		2.14.1.	Rendahnya kualifikasi tenaga kerja migran
		2.14.2.	Fasilitasi perlindungan tenaga migran
		2.15	Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
		2.15.1.	Perluasan kepesertaan;
		2.15.2.	Peningkatan manfaat dan kualitas pelayanan jaminan sosial;



No.	Bidang/Tema	Isu Strategis	
		2.15.3.	Kesinambungan finansial BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
		2.16	Kerjasama Ekonomi Internasional
		2.16.1.	Masih belum selarasnya antara diplomasi politik dan diplomasi ekonomi;
		2.16.2.	Belum optimalnya kualitas koordinasi lintas sektor dan seluruh pihak terkait dalam proses penyiapan dan implementasi hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional;
		2.16.3.	Belum optimalnya pemanfaatan kesepakatan kerjasama ekonomi internasional dalam mencapai kepentingan nasional;
		2.17	Data dan Informasi Statistik
		2.17.1.	Kebutuhan data dan informasi akibat pemekaran daerah dan desentralisasi;
		2.17.2.	Meningkatnya kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga;
		2.17.3.	Koordinasi antar instansi masih kurang;
		2.17.4.	Kurangnya jumlah SDM statistik profesional;
		2.17.5.	Beragamnya jenis pengguna data memerlukan perlakuan khusus pada masing masing pengguna
		2.17.6.	Keterbatasan pada ketersediaan dan penggunaan sistem TIK.
3	ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	3.1	Sumbangan Iptek untuk Perekonomian Nasional Minim
		3.1.1.	Meningkatkan dukungan nyata iptek terhadap peningkatan daya saing sektor-sektor produksi barang dan jasa;
		3.2	Kekayaan Sumber Daya Alam Makin Berkurang
		3.2.1.	Meningkatkan dukungan iptek untuk keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati maupun nir-hayati
		3.3	Globalisasi Kehidupan Sosial Budaya Semakin Kuat
			Meningkatkan dukungan iptek untuk penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern;
4	POLITIK	4.1	Politik Dalam Negeri
		4.1.1.	Penguatan peran lembaga demokrasi;
		4.1.2.	Jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat;
		4.1.3.	Keterbukaan informasi, komunikasi publik, dan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik;
		4.1.4.	Pemantapan wasbang dan karakter bangsa dalam rangkamenperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
		4.1.5.	Penanggulangan terorisme.
		4.2	Politik Luar Negeri
		4.2.1.	Penanganan perbatasan;
		4.2.2.	Pemantapan peran Indonesia di ASEAN;
		4.2.3.	Penguatan diplomasi ekonomi;
		4.2.4.	Peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri khususnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
		4.2.5.	Peran Indonesia dalam kerja sama bilateral, regional dan global.
5	PERTAHANAN DAN	5.1	Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional



No.	Bidang/Tema	Isu Strategis	
	KEAMANAN	5.1.1.	Alutsista TNI, almatsus-Polri dan pemberdayaan industri pertahanan;
		5.1.2.	Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit;
		5.1.3.	Profesionalisme Polri;
		5.1.4.	Intelijen dan kontra intelijen;
		5.1.5.	Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan darat;
		5.1.6.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba; dan
		5.1.7.	Sistem keamanan nasional yang integrative.
6	HUKUM DAN APARATUR	6.1	Sub Bidang Hukum
		6.1.1.	Kualitas penegakan hukum;
		6.1.2.	Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
		6.1.3.	Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
		6.2	Sub Bidang Aparatur
		6.2.1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
		6.2.2.	Birokrasi yang efektif dan efisien;
		6.2.3.	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
7	PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG	7.1	Informasi Geospasial
		7.1.1.	Koordinasi dalam penyelenggaraan informasi geospasial;
		7.1.2.	Produksi data dan informasi geospasial;
		7.1.3.	Jaringan distribusi data dan informasi geospasial;
		7.1.4.	Pemanfaatan data dan informasi geospasial;
		7.1.5.	SDM, kelembagaan, iptek dan industri informasi geospasial.
		7.2	Tata Ruang
		7.2.1.	Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
		7.2.2.	Kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang;
		7.2.3.	RTR sebagai acuan pembangunan berbagai sektor.
		7.3	Pertanahan
		7.3.1.	Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah;
		7.3.2.	Ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah (P4T) serta kesejahteraan rakyat.
		7.3.3.	Kinerja pelayanan pertanahan;
		7.3.4.	Ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
		7.4	Perkotaan
		7.4.1.	Kesenjangan yang tinggi antarkota dan pusat pertumbuhan antara; Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta antara kota-kota di Pulau Jawa-Bali dengan di luar Pulau Jawa-Bali;
		7.4.2.	Masih belum terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) di kota dan kawasan perkotaan, sehingga menjadi kurang layak huni;
		7.4.3.	Rendahnya daya saing kota serta ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan kota terhadap perubahan iklim dan bencana;
		7.4.4.	Belum optimalnya pengelolaan perkotaan, terutama di kawasan perkotaan



No.	Bidang/Tema	Isu Strategis	
			metropolitan dan kawasan perkotaan yang terletak di kabupaten.
		7.5	Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
		7.5.1.	Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah;
		7.5.2.	Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai;
		7.5.3.	Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi
		7.5.4.	Pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
		7.5.6.	Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang.
		7.6	Kawasan Transmigrasi
		7.6.1.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang mencakup pembangunan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk, fasilitasi penyediaan dan sertifikasi bidang tanah pada lokasi-lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Kawasan Perkotaan Baru (KPB);
		7.6.2.	Pembangunan sosial ekonomi, termasuk kemandirian pangan, yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta di Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
		7.7	Kawasan Strategis
		7.7.1.	Nilai tambah potensi unggulan daerah. Minimnya permodalan dan pelatihan terkait upaya peningkatan mutu kualitas komoditas daerah maupun peningkatan kapasitas produksi unggulan di daerah;
		7.7.2.	Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sumber daya manusia pelaku usaha pertanian, nelayan, peternak, industri di kawasan strategis masih rendah kapasitasnya, lemahnya peran dan fungsi kelembagaan pengelola kawasan, kualitas tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan kawasan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang masih belum optimal;
		7.7.3.	<i>Debottlenecking</i> regulasi untuk peningkatan iklim investasi dan iklim usaha. Belum harmonisnya hubungan industrial secara tripartit, belum dilaksanakannya pelimpahan kewenangan pusat dan daerah kepada pengelola kawasan sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan, serta masih terkendalanya status lahan dan hutan.
		7.8	Kawasan Perbatasan
		7.8.1.	Keterisolasian kawasan perbatasan negara;
		7.8.2.	Belum ada sistem untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan baik industri maupun perdagangan berbasis potensi sumber daya kawasan perbatasan, serta menjamin pemberdayaan masyarakat perbatasan;



No.	Bidang/Tema	Isu Strategis	
		7.8.3.	Terdapat overlapping claim areas segmen-segmen batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga;
		7.8.4.	Masih lemahnya pengamanan batas wilayah laut, darat, dan udara di kawasan perbatasan negara;
		7.8.5.	Integrasi pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan
		7.9	Daerah Tertinggal
		7.9.1.	Adanya regulasi yang tidak memihak/disharmonis terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal;
		7.9.2.	Masih lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan Pembangunan daerah tertinggal
		7.9.3.	Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal;
		7.9.4.	Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.
		7.9.5.	Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal;
		7.9.6.	Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal;
		7.9.7.	Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal;
		7.9.8.	Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
		7.9.9.	Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal.
		7.10	Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
		7.10.1.	Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
		7.10.2.	Penataan kewenangan antartingkat pemerintahan;
		7.10.3.	Penataan daerah;
		7.10.4.	Kerjasama daerah;
		7.10.5.	Harmonisasi peraturan perundangan;
		7.10.6.	Sinergi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah;
		7.10.7.	Akuntabilitas dan tata pemerintahan;
		7.10.8.	Peningkatan pelayanan publik;
		7.10.9.	Otonomi Khusus.
		7.11	Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
		7.11.1.	Manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah
		7.12	Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
		7.12.1.	Kemampuan fiskal daerah;
		7.12.2.	Kualitas perencanaan dan penganggaran daerah; dan
		7.12.3.	Kualitas belanja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.



No.	Bidang/Tema	Isu Strategis	
8	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA	8.1	Infrastruktur dan Ekonomi
		8.1.1.	Meningkatkan aksesibilitas akibat ketidaktersediaan prasarana dan sarana infrastruktur;
		8.1.2.	Kesiapan bidang infrastruktur dalam ASEAN, dan
		8.1.3.	Kesiapan bidang Infrastruktur dalam menghadapi globalisasi di bidang ekonomi.
		8.2	Infrastruktur, Kependudukan, dan Urbanisasi
		8.2.1.	Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan angkutan massal yang murah dan nyaman, terutama masyarakat perkotaan
		8.2.2.	Rendahnya aksesibilitas pelayanan infrastruktur di wilayah-wilayah terluar, tertinggal, dan terbatas;
		8.2.3.	Pembangunan infrastruktur terbentur dengan permasalahan ketersediaan lahan yang berkompetisi dengan sektor-sektor lain termasuk properti (perumahan dan permukiman);
		8.2.4.	Kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman; serta
		8.2.5.	Belum memadainya ketersediaan daya listrik serta masih banyaknya rakyat di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum memiliki akses terhadap daya listrik.
		8.3	Infrastruktur dan Peran Badan Usaha
		8.3.1.	Masih kurangnya informasi mengenai proyek baik dari sisi detail teknis maupun informasi keuangan serta analisis terhadap berbagai macam risiko dan jaminan pemerintah untuk pengelolaan risiko tersebut;
		8.3.2.	Masih sulitnya penerapan peraturan terkait dengan KPS oleh para Penanggung Jawab proyek kerja sama (PJPK);
		8.3.3.	Rendahnya kapasitas aparat dan kelembagaan dalam melaksanakan KPS;
		8.3.4.	Belum optimalnya kebijakan yang didukung kualitas perencanaan proyek KPS bidang infrastruktur yang mengakibatkan pilihan strategi pelaksanaan proyek yang kurang memihak pada KPS sehingga proyek infrastruktur yang seharusnya menarik bagi pihak swasta malah dilaksanakan melalui pembiayaan APBN/APBD, sementara proyek infrastruktur yang tidak menarik justru ditawarkan kepada pihak swasta;
		8.3.5.	Masih kurang memadainya peran pendanaan oleh BUMN/ lembaga keuangan seperti PT SMI dan anak perusahaannya PT IIF serta PT PII yang masing-masing sebagai instrument pembiayaan dan penjaminan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS;
		8.3.6.	Belum adanya mekanisme pemberian insentif bagi PJPK dalam melaksanakan KPS;
		8.3.7.	Belum meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah Timur;
		8.3.8.	Tingkat pendidikan yang masih rendah dibandingkan dengan wilayah Barat;
		8.3.9.	Rata-rata pendapatan perkapita yang masih rendah;
		8.3.10.	Masih banyak wilayah-wilayah di Timur Indonesia yang belum tersedia fasilitas infrastruktur yang memadai;
		8.3.11.	Belum memadainya peran infrastruktur dalam mengurangi kesenjangan wilayah



No.	Bidang/Tema	Isu Strategis	
		8.3.12.	Barat dan Timur;
		8.3.13.	Belum optimalnya konektivitas baik di dalam koridor ekonomi utama maupun aksesibilitas ke wilayah terpencil, perbatasan, dan pedalaman; serta
		8.4	Belum meratanya distribusi pelayanan infrastruktur dasar di wilayah timur.
		8.4	Infrastruktur, Energi, dan Lingkungan
		8.4.1.	Diversifikasi, konservasi energi, dan sistem multimoda yang belum optimal;
		8.4.2.	Kemacetan di kota-kota besar dan menengah serta rusaknya banyak jaringan jalan di daerah menambah parah dan buruknya emisi gas buang dan di sisi lain infrastruktur juga rentan terhadap dampak perubahan iklim sehingga perlu adanya adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim;
		8.4.3.	Polusi yang tinggi penyebab utama dari Gas Rumah Kaca (GRK); serta
		8.4.4.	Belum memadainya penyediaan infrastruktur yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrim.
		8.5	Infrastruktur dan Globalisasi
		8.5.1.	Percepatan pembangunan perumahan;
		8.5.2.	Pembangunan infrastruktur/prasarana dasar kawasan permukiman serta energi dan ketenagalistrikan;
		8.5.3.	Menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional;
		8.5.4.	Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan;
		8.5.5.	Pembangunan transportasi massal perkotaan, dan
		8.5.6.	Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur.
		8.6	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan dalam Penyediaan Infrastruktur
		8.6.1.	Percepatan dan penguatan pengambilan keputusan pada tingkat tertinggi pemerintahan (<i>Championship at the top</i>);
		8.6.2.	Koordinasi dan integrasi dalam perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur KPS;
		8.6.3.	Optimalisasi pendanaan dan pembiayaan yang berkelanjutan;
		8.6.4.	Daftar Proyek Prioritas dan Kualitas Penyiapan Proyek.
9	PENGLOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	9.1	Pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan;
		9.2	Pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani;
		9.3	Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan / pengolah dan pemasaran hasil perikanan / petambak garam
		9.4	Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan kelanjutan;
		9.5	Peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan;
		9.6	Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS;
		9.7	Penguatan pasokan, bauran dan efisiensi konsumsi energi;
		9.8	Peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan;



No.	Bidang/Tema	Isu Strategis	
		9.9	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian kehati;
		9.10	Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; dan
		9.11	Penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.
10	TEMA PEMBANGUNAN WILAYAH PULAU SUMATERA	10.1	Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional;
		10.2	Lumbung energi nasional, termasuk pengembangan energi terbarukan biomassa;
		10.3	Pengembangan hilirisasi komoditas batubara;
		10.4	Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin;
		10.5	Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018

2.4.1.2. Isu Strategis Provinsi Sumatera Barat

Isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Barat :

- Pembangunan mental dan peningkatan pengamalan nilai-nilai adat dan agama.
- Pelaksanaan otonomi daerah
- Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Peningkatan daya beli masyarakat daya saing daerah
- Bencana alam dan kualitas lingkungan hidup
- Jiwa dan semangat kewirausahaan

2.4.1.3. Isu Strategis Kabupaten Tanah Datar

Penyusunan isu-isu strategis dalam RKPD Tahun 2018 didasarkan pada rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016. Isu strategis pembangunan di daerah secara umum adalah :

- Masih rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ABS-SBK dan aturan hukum
- Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan, kesadaran hidup bersih dan kesehatan lingkungan
- Belum optimalnya kualitas dan akses pendidikan
- Belum optimalnya pengelolaan pariwisata daerah
- Masih adanya pengangguran dan kemiskinan
- Masih rendahnya investasi di daerah

7. Masih rendahnya penerapan teknologi dan inovasi serta daya saing produk daerah
8. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah
9. Belum optimalnya pelayanan publik dan penerapan e-government yang terintegrasi

Adapun isu strategis sesuai aspek pembangunan adalah sebagai berikut:

1) Aspek Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan identifikasi permasalahan aspek geografi dan potensi sumber daya alam, maka rumusan isu strategis untuk aspek ini adalah:

1. Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan daerah dengan mempertimbangkan potensi geografis kawasan strategis, konektivitas, kondisi rawan bencana alam serta konstelasi antar kawasan pengembangan di daerah.
2. Optimalisasi perencanaan tata ruang yang telah ada untuk dapat meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kawasan budi daya yang berwawasan lingkungan.
3. Perencanaan dan pengembangan ekonomi terpadu pada kawasan pengembangan ekonomi daerah dengan melakukan kajian peluang investasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

2) Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Masih ditemukan pengangguran tersembunyi.
2. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang diindikasikan dengan belum tuntasnya wajib belajar 9 tahun.
3. APK dan APM semakin rendah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi
4. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran maka diperlukan peningkatan koordinasi dan integrasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada masing-masing Perangkat Daerah.
5. Dibutuhkan peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan nilai IPM dan daya saing SDM.
- 6.

3) Aspek Infrastruktur, Transportasi, Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan daftar permasalahan yang dapat diidentifikasi tersebut, maka dirumuskan isu strategisnya yaitu:

1. Untuk dapat mendorong mobilitas dan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan daerah, maka diperlukan peningkatan kualitas infrastuktur (jalan, jembatan, irigasi, drainase dan air bersih) dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana guna mengantisipasi berbagai kerawanan bencana alam di daerah.
2. Untuk meningkatkan intensitas dan konektivitas antar daerah dalam kabupaten dan antar kota/kabupaten diperlukan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan lalu lintas yang memenuhi standar kelayakan angkutan umum baik antar nagari maupun antar kota dalam provinsi termasuk penataan dan kepastian aturannya.
3. Dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan kewaspadaan terhadap berbagai bencana maka diperlukan penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang memenuhi persyaratan sanitasi, drainase, pelayanan air bersih dan daya terpasang listrik yang berbasis mitigasi bencana.
4. Untuk mendorong percepatan perluasan pembangunan daerah maka perlu dilakukan percepatan pembangunan pada pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan cepat tumbuh daerah dengan mempertimbangkan potensi kawasan strategis daerah dan konektivitas serta korelasi eksternal antar kawasan pengembangan.
5. Peningkatan dan pemerataan fasilitas serta akses informasi dan komunikasi.

4) Aspek ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Perlu upaya peningkatan keterkaitan antar dan intra lapangan usaha agar dapat mewujudkan penguatan fundamental makro ekonomi daerah, peningkatan daya dorong terhadap produktivitas, peningkatan nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi daerah.
2. Usaha Mikro Kecil dan industri non formal memiliki jumlah yang besar di dalam perekonomian daerah, untuk itu diperlukan pemberdayaan dan peningkatan status usaha menjadi usaha formal sesuai aturan berlaku guna meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai tambah perekonomian daerah
3. Dalam upaya menghadapi persaingan global diperlukan kebijakan dan regulasi untuk standarisasi produk daerah, pengawasan keamanan produk dan peningkatan akses serta jaringan kerjasama pemasaran komoditas daerah agar dapat bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.

4. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha, dan aparatur pelaksana berbasis iptek, imtak dan budaya serta kearifan lokal diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas, daya saing dan kekuatan moral sesuai nilai-nilai lokal, adat dan budaya Minangkabau.
5. Perlu peningkatan kualitas pengelolaan pasar nagari agar mampu menjadi wadah dan media pengembangan serta penguatan jaringan pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar.
6. Perlu penataan kelembaga ekonomi dan petani serta kelembagaan lainnya untuk mendorong peningkatan aktivitas, kualitas dan produktivitas ekonomi masyarakat.

5) Aspek Kelembagaan, Pemerintahan dan Sosial Budaya

Isu strategis yang perlu diperhatikan dalam upaya perencanaan pemerintahan dan sosial budaya ke depan adalah:

1. Perlu peningkatan kuantitas, kualitas dan peran SDM aparatur pada SKPD dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, santun dan melayani sesuai nilai budaya adat Minangkabau melalui Reformasi Birokrasi dan revolusi mental.
2. Perlu optimalisasi peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
3. Diperlukan adanya regulasi dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat yang berbasis nilai filosofi budaya Minangkabau.
4. Peningkatan optimalisasi penanganan penanggulangan permasalahan sosial masyarakat dan peningkatan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Anak serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

6) Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah

Isu strategis yang dirumuskan terkait dengan masalah pembangunan dalam aspek ini adalah:

1. Perlu peningkatan kapasitas dan kualitas POSYANTEK (Pusat Layanan Teknologi), dan Balai Benih Ikan (BBI) dalam upaya pengembangan menjadi PAT (Pusat Alih Teknologi) sehingga dapat mendorong tumbuh kembangnya adaptasi teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif di daerah.
2. Diperlukan adanya pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga riset perguruan tinggi dan lembaga riset nasional untuk pengembangan inovasi daerah dalam mengembangkan ekonomi berbasis iptek dan sumberdaya lokal.



3. Diperlukan pembentukan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mendorong peningkatan kemampuan teknologi, daya inovasi dan kreativitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha dalam rangka menghadapi persaingan ekonomi di era globalisasi dan persaingan bebas.
4. Perlu adanya edukasi dan sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna, teknologi komunikasi dan informasi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi makro dan kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2017 dan proyeksi kondisi ekonomi dan keuangan daerah tahun 2018 dan 2019, serta sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019.

Dalam perekonomian terbuka, kondisi perekonomian daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Tanah Datar, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Tanah Datar namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi perekonomian regional Sumatera Barat, perekonomian Nasional dan bahkan ekonomi global.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019) “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar antara 5,4 – 5,8 %
2. Persentase inflasi secara nasional berkisar 2,5 – 4,5%
3. Tingkat kemiskinan 8,5 – 9,5%
4. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera sebesar 21,87%; Jawa sebesar 58,15%; Kalimantan sebesar 8,09 %; Sulawesi sebesar 6,15%; Maluku sebesar 0,52% dan Papua sebesar 2,01%.

Lima Prioritas Nasional yang menjadi fokus RKP Tahun 2019, yaitu:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Penciptaan nilai tambah baik sektor pertanian, manufaktur, dan jasa;
4. Ketahanan pangan energi, air, dan kelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan pengamanan Pemilu.

Untuk mencapai skenario pertumbuhan ekonomi tersebut beberapa upaya yang dilaksanakan pemerintah pusat adalah:

- 1) Investasi Pemerintah secara selektif; dilaksanakan melalui ruang peningkatan investasi yang terbatas, tetapi tetap dijaga dengan merelokasi belanja non produktif ke belanja investasi serta fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta (infrastruktur listrik, transportasi dan logistik).
- 2) Fasilitasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; dilaksanakan melalui peningkatan investasi pada 5 (lima) sektor utama penghela pertumbuhan ekonomi daerah (Industri pengolahan, terutama nonmigas, pertanian, perdagangan, konstruksi dan informasi telekomunikasi) dan 2 (dua) sektor prioritas yang akan ditingkatkan perannya (Pariwisata dan Jasa Keuangan).
- 3) Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6% adalah:
 - a) Deregulasi peraturan terkait investasi
 - b) Pembenahan Iklim investasi terutama di daerah (termasuk penguatan PTSP daerah dan standarisasi layanan dan perijinan investasi).
 - c) Fasilitasi masalah investasi (RTRW, infrastruktur, penguatan data potensi investasi, penyelesaian pengaduan masalah investasi).
 - d) Pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi.
 - e) Perbaikan iklim ketenagakerjaan: penyempurnaan UU ketenagakerjaan (harmonisasi UU 13/2003 dengan SJSN).
5. Pencapaian target kemiskinan sebesar 12,5% dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 10,25%; Jawa sebesar 9,45%; Bali-Nusa Tenggara sebesar 13,87%; Kalimantan sebesar 5,40%; Sulawesi sebesar 9,96%; Maluku sebesar 12,52% dan Papua sebesar 25,85%.
6. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44% dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 4,80%; Jawa-Bali sebesar 5,90%; Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80%; Kalimantan sebesar 5,10%; Sulawesi sebesar 4,00%; Maluku sebesar 4,90% dan Papua sebesar 3,60%.
7. Laju Inflasi 3,5%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan I tahun 2017 tumbuh sebesar 5,01 %, sejalan dengan perekonomian makro secara global terutama negara-negara berkembang tengah mengalami pertumbuhan yang melambat (Global growth disappointed) sedangkan negara ekonomi kuat (high income economic) tengah mengalami pemulihan ekonomi (continued recovery) seperti

USA, Jepang dan Uni Eropa. Membaiknya perekonomian Tiongkok yang tumbuh 6,9 persen dari sebelumnya 6,7 persen, perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) menguat 1,9 persen dari sebelumnya 1,8 persen, dan perdagangan dengan Singapura menguat 2,5 persen dari sebelumnya 1,9 persen. Sampai pada semester pertama tahun 2017 pertumbuhan ekonomi nasional telah mencapai 5,01%.

Perekonomian Nasional di Triwulan I 2017 tumbuh lebih baik didukung oleh percepatan perbaikan investasi dan kinerja ekspor. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku kuartal I-2017 mencapai Rp. 3.227,2 triliun. Persentase ekspor Indonesia ke AS tumbuh sepanjang kuartal pertama meskipun ketidakpastian atas kebijakan perdagangan AS tetap membayangi. Kuartal pertama tahun ini, ekspor Indonesia ke AS menyentuh 11,7 persen dari seluruh komposisi ekspor. Pertumbuhan ekspor kuartalan kali ini bahkan menyentuh 18,16 persen. Hal ini dinilai menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kekhawatiran adanya kebijakan Trump mengenai proteksionisme belum terlihat. Namun perlu tetap diwaspadai karena resiko eksternal yang harus dihadapi nantinya.

Secara keseluruhan, nilai ekspor Indonesia US\$40,61 miliar atau naik 1,33 persen secara kuartalan dan meningkat 20,84 persen secara tahunan. Sedangkan nilai impor Indonesia US\$36,68 miliar atau menurun 0,75 persen secara kuartalan, namun meningkat 14,83 persen secara tahunan.

Selain perdagangan ekspor dan impor, pengeluaran pemerintah rupanya turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Tercatat realisasi belanja pemerintah sampai kuartal I 2017 telah mencapai Rp. 400,14 triliun atau 19,23 persen dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang mencapai Rp. 2.080,5 triliun. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2016 yang sebesar Rp. 391,04 triliun atau 18,77 persen dari pagu 2016 Rp. 2.082,9 triliun.

Sementara dari sisi konsumsi rumah tangga, masih cukup baik meski dari sisi inflasi cukup tertekan. Pasalnya, dalam tiga bulan pertama, masyarakat Indonesia mengalami sejumlah tekanan dari pengeluaran rumah tangga yang tercermin dari fluktuatifnya inflasi, tercatat Januari inflasi 0,97 persen, Februari inflasi 0,23 persen, Maret deflasi 0,02 persen. Adapun inflasi kuartal I 2017 mendapat banyak tekanan dari komponen tingkat harga yang diatur oleh pemerintah (administered price) berupa kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dalam tiga tahap bagi pengguna listrik dengan kapasitas 900 voltampere (VA) yang tak lagi disubsidi pemerintah.

Perbaikan kinerja ekspor, diantaranya dengan kenaikan harga komoditas minyak sawit mentah dan karet. Kenaikan harga minyak sawit mentah ini dapat menggenjot pendapatan dan konsumsi masyarakat khususnya di daerah penghasil komoditas seperti Kalimantan dan Sumatera. Ditinjau dari pertumbuhan setiap komponen penyusun PDRB dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen ekspor barang dan jasa sebesar 8,04 persen, diikuti pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 8,02 persen, dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) sebesar 4,93 persen. Dari sisi investasi, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami kenaikan 13,2 persen. Pertumbuhan investasi secara menyeluruh menyentuh 4,81 persen.

Dilihat dari sisi produksi, pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 0,49 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 9,1 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 8,01 persen; transportasi dan Pergudangan sebesar 7,65 persen; dan Jasa Kesehatan Kegiatan Sosial sebesar 7,13 persen. Perubahan zaman ke era digital dimana informasi cepat berkembang, kebutuhan akan informasi cukup tinggi sehingga menyebabkan lapangan usaha ini tumbuh tinggi di kuartal pertama 2017 ini. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha harga berlaku (current prices) pada triwulan I 2017 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Konstruksi yang mendominasi PDB.

Pertumbuhan PDB riil diproyeksikan naik menjadi 5,2 persen di tahun 2017, dan mencapai 5,3 persen pada 2018. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan semakin baik dengan adanya Rupiah yang stabil, upah riil lebih tinggi dan terus menurunnya angka pengangguran. Pertumbuhan investasi swasta diproyeksikan naik seiring pulihnya harga-harga komoditas, serta dampak kemudahan moneter pada tahun 2017 dan mulai berdampak reformasi ekonomi belakangan ini. Harga komoditas yang lebih tinggi juga akan mengurangi hambatan fiskal dan mengangkat belanja pemerintah, sementara pertumbuhan global yang lebih kuat akan mendorong ekspor. Inflasi diperkirakan naik sementara dari 3,5 persen pada tahun 2016 menjadi 4,3 persen pada tahun 2017 akibat naiknya tarif listrik dan pajak kendaraan. (worldbank.org)

Besarnya pertumbuhan ini didukung oleh semakin menguatnya permintaan konsumsi rumah tangga dan meningkatnya peranan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi, terutama dari investasi pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Realisasi investasi ekonomi nasional di tahun 2015 telah mendekati target yang ditetapkan pemerintah, dimana realisasi investasi tahun 2015 mencapai Rp 545,4 triliun yang terdiri dari 179,4 triliun berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan 366 triliun berasal dari penanaman modal asing (PMA). Peningkatan periode yang sama pada tahun 2014 adalah sebesar 16,1%. (sumber: www.bi.go.id/RED, April 2016). Sepanjang tahun 2017, trend peningkatan harga komoditas global, termasuk batu bara, diperkirakan terus berlanjut dan menjadi faktor pendukung peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor beberapa kuartal ke depan. Tidak hanya pada perdagangan internasional, trend tersebut juga diperkirakan mampu meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan terutama pada sektor yang terkait dengan sektor pertambangan. Dampak positif peningkatan aktivitas ekonomi dari sektor tersebut terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan mulai terjadi pada paruh kedua tahun 2017. Selain faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi global dan volume perdagangan ekonomi dunia yang diperkirakan membaik diharapkan turut mendorong perekonomian nasional. Perekonomian tahun 2017 diperkirakan mampu tumbuh lebih baik dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2016.

Perekonomian nasional tahun 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dari tahun 2017 yaitu pada kisaran sebesar 5,4 hingga 6,1 persen. Kinerja ekonomi diperkirakan lebih baik dengan dukungan tidak hanya berasal dari sisi eksternal namun juga perbaikan perekonomian domestik. Pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi terus diupayakan sebagai bentuk bagian dalam mendorong investasi langsung non pemerintah. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga dijaga melalui stabilitas tingkat inflasi dan daya beli masyarakat.

Sepanjang 2013-2017, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan LNPRM merupakan komponen penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 57,1 persen mampu tumbuh rata-rata sebesar 5,2 persen. Tingkat inflasi yang relatif terkendali, mampu menjaga daya beli masyarakat dan turut mendukung kinerja konsumsi rumah tangga. Selain itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga sosial dan masyarakat turut memberikan kontribusi pada konsumsi baik hari besar keagamaan, pemilihan umum maupun pada saat terjadi bencana alam. Pada tahun 2017, pertumbuhan konsumsi rumah

tangga dan LNPRT diperkirakan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan kebijakan stabilitas inflasi, peningkatan aksesibilitas terhadap kebutuhan barang pokok dan pemberian program bantuan sosial yang komprehensif sehingga pemerataan pendapatan antar masyarakat juga dapat dicapai.

Pada sisi lain, trend penurunan laju inflasi masih terus berlanjut hingga tahun 2006. Di dalam APBN dan APBD, laju inflasi diasumsikan mencapai 4,7 dan 4,0 persen (yoy). Selain itu menurun dibandingkan inflasi tahun sebelumnya, laju inflasi tahun 2016 juga merupakan inflasi terendah dalam 5 tahun terakhir. Rendahnya inflasi tersebut dipengaruhi oleh terjaganya keseimbangan sisi permintaan dan penawaran dan juga rendahnya inflasi komponen harga diatur Pemerintah.

Di tahun 2016, keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran di dalam negeri cukup terjaga, tercermin dari pergerakan laju inflasi inti pada tingkat yang relatif rendah. Laju inflasi komponen inti mencapai tingkat 3,1 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,0 persen (yoy). Secara umum, rendahnya tekanan inflasi inti dipengaruhi oleh moderasi perkembangan ekonomi domestik seiring pelemahan ekonomi global. Namun pada saat yang sama, berbagai kebijakan pemerintah yang ditempuh mampu menjaga daya beli masyarakat secara umum, diantaranya melalui program-program kesejahteraan dan sosial masyarakat, pembangunan infrastruktur untuk memperlancar sistem distribusi dan logistik, serta stabilisasi harga.

Dari sisi komponen harga diatur Pemerintah, laju inflasi di tahun 2016 hanya mencapai 0,2 persen (yoy), lebih rendah dari tingkat inflasi di tahun 2015 sebesar 0,4 persen (yoy). Rendahnya inflasi komponen tersebut juga memberikan andil terhadap terkendalinya laju inflasi umum tahunan. Laju inflasi komponen harga bergejolak pada tahun 2016 sebesar 5,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir yang sebesar 7,3 persen (yoy). Hal ini antara lain ditopang oleh cukup terjaganya pasokan dalam memenuhi perkembangan permintaan masyarakat sepanjang 2016. Disamping itu, penurunan harga komoditas energi, terutama BBM juga berdampak pada biaya logistik dan distribusi. Penurunan laju inflasi di tahun 2016 juga tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah dalam memperbaiki pasokan barang kebutuhan masyarakat, khususnya pada periode menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pada periode tersebut, berbagai kebijakan ditempuh untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, termasuk melalui penguatan distribusi dan kebijakan impor bahan pangan dalam waktu tertentu.

Ditahun 2017, laju inflasi diperkirakan meningkat namun tetap berada pada kisaran sasaran inflasi 4,0 persen. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian dan kapasitas produksi domestik serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Faktor risiko tekanan inflasi pada tahun 2017, terutama berasal dari kelanjutan program pemerintah untuk menciptakan kebijakan subsidi energi. Realokasi anggaran subsidi energi akan digunakan pada kegiatan pembangunan yang lebih produktif, misalnya infrastruktur dan program perlindungan sosial. Pembangunan infrastruktur akan memungkinkan perluasan kapasitas produksi dan penguatan sisi penawaran dalam perekonomian yang pada gilirannya menjadi faktor yang mampu menurunkan tekanan inflasi. Perbaikan infrastruktur juga berdampak positif pada kelancaran distribusi barang kebutuhan dan penurunan biaya logistik.

Di tahun 2018, inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga dalam rentang sasaran inflasi. Perbaikan kapasitas produksi nasional yang didukung program-program untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga akan mampu menjaga keseimbangan sisi penawaran dan permintaan dalam negeri. Sementara dari sisi eksternal, faktor tekanan harga komoditas global masih relatif rendah. Pemerintah pusat juga mendorong peran aktif Pemerintah Daerah untuk menjaga laju inflasi di masing-masing wilayah. Pemerintah tetap berkomitmen dalam upaya pemantauan dan pengendalian inflasi, mengingat sasaran inflasi telah ditetapkan dengan trend penurunan secara jangka menengah. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, maka laju inflasi tahun 2018 diperkirakan bergerak dalam rentang sasaran inflasi sebesar 3.5 ± 1.0 persen.

Selama tahun 2016, terdapat perkembangan positif lainnya seperti laju inflasi yang terjaga di tingkat yang cukup rendah. Rendahnya inflasi disertai dengan stabilnya nilai tukar telah memberi ruang kepada Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pelonggaran arah kebijakan moneter, seperti penurunan suku bunga acuan BI serta pelonggaran kebijakan makroprudensial tanpa menyebabkan arus modal keluar. Pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak juga telah memberikan dampak positif pada perekonomian. Hal ini juga memberikan perkembangan positif pada kinerja neraca modal dan finansial dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) di tahun 2016. Secara umum nilai tukar rupiah pada periode 2013-2017 mengalami depresiasi sebesar 42 persen yaitu dari rata-rata nilai tukar Rp. 9.380 per dolar AS menjadi Rp. 13.307 per dolar AS.

Selama kuartal I 2017, rata-rata nilai tukar Rupiah adalah Rp. 13.321 per dolar AS, lebih kuat dibanding akhir tahun 2016. Secara umum

perkembangan nilai tukar di tahun 2017 diperkirakan masih mengalami depresi. Pergerakan nilai tukar tersebut didasarkan pada faktor negatif dan juga faktor positif. Faktor negatif yang menyebabkan tekanan pelemahan rupiah antara lain datang dari dampak rencana kenaikan FFR dua kali lagi di tahun 2017. Selain itu, tekanan eksternal juga akan datang dari kebijakan perdagangan luar negeri.

Dari sisi internal, membaiknya perekonomian nasional, keberhasilan program pengampunan pajak, akselerasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan terjaganya tingkat inflasi, akan memberikan dorongan apresiasi Rupiah. Sementara sisi eksternal, menurunnya debit transaksi berjalan, serta peningkatan surplus transaksi modal dan finansial juga akan memberikan kontribusi positif pada pergerakan nilai tukar. Dengan tantangan internal dan eksternal tersebut serta didukung oleh bauran kebijakan fiskal dalam mendorong percepatan reformasi guna meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi serta koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Bank Indonesia, rata-rata nilai tukar Rupiah di Tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp. 13.500 per dolar AS.

Di Tahun 2018, pergerakan nilai tukar Rupiah juga akan tetap dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, kebijakan ekonomi AS di bawah administrasi pemerintahan yang baru diperkirakan mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional baik secara langsung terhadap mitra dagangnya maupun melalui dampak tidak langsung. Dari sisi internal, peningkatan kualitas infrastruktur akan membantu proses perbaikan kondisi fundamental ekonomi, yang akan mengurangi risiko arus modal keluar.

Oleh karena itu dengan berlangsungnya perbaikan struktural di sektor keuangan, diharapkan dapat semakin memperbaiki kinerja ekspor Indonesia dan pada akhirnya turut memperkuat posisi transaksi berjalan. Dengan perkembangan kondisi dalam negeri tersebut akan semakin memperkuat posisi cadangan devisa sehingga mampu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini di atas dan dampak berbagai kebijakan yang dikeluarkan, nilai tukar rupiah pada tahun 2018 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp.13.500 - Rp. 13.800 per Dolar AS.

Selain itu, Perekonomian Nasional di Triwulan IV 2017 tumbuh lebih baik didukung oleh percepatan perbaikan investasi dan kinerja ekspor. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku kuartal IV-2017 mencapai Rp. 3.227,2 triliun. Persentase ekspor Indonesia ke AS tumbuh sepanjang kuartal pertama meskipun ketidakpastian atas kebijakan perdagangan AS tetap membayangi. Kuartal pertama tahun ini, ekspor Indonesia ke AS menyentuh

11,7 persen dari seluruh komposisi ekspor. Pertumbuhan ekspor kuartalan kali ini bahkan menyentuh 18,16 persen.

Momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas akan terus berlanjut di tahun 2018 dan 2019. Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali. Berikut adalah gambaran asumsi dan sasaran ekonomi makro secara nasional.

Ekonomi Makro	Tahun		
	2017	2018	2019
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,4	5,4 - 5,8
Inflasi	3,6	3,5	2,4 - 4,5

Investasi dan konsumsi rumah tangga diharapkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran.

Berikut akan disajikan tabel Outlook dan sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi pengeluaran dan sisi produksi.

Sisi Pengeluaran

EKONOMI MAKRO	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Pertumbuhan ekonomi	5,4	5,4 – 5,8
Konsumsi Rumah Tangga	5,1	5,0 – 5,1
Konsumsi LNRPT	5,8	9,2 – 11,1
Konsumsi Pemerintah	3,8	2,8 – 3,7
PMTB	6,3	7,5 – 8,3
Ekspor	5,1	6,0 – 7,3
Impor	4,5	6,3 – 7,6

Sisi Lapangan Usaha

EKONOMI MAKRO	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Pertanian	3,7	3,9 – 4,1
Pertambangan	1,0	0,8
Industri Pengolahan	4,9	5,1 – 5,6
Listrik	5,7	6,2 – 6,6
Perdagangan	5,7	5,4 – 6,0
Konstruksi	6,9	6,9 – 7,2
Infokom	11,0	10,7 – 11,3

EKONOMI MAKRO	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Jasa Keuangan	9,4	8,1 – 8,7
Transportasi	8,5	8,9 – 9,1

3.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan kondisi dan arahan perekonomian nasional di atas, maka untuk perekonomian Sumatera Barat tentunya tidak akan jauh bergerak dari kondisi dan arah kebijakan ekonomi nasional. Dalam tahun 2019, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan sektor ekonomi yang kuat yang berbasis kepada sumberdaya daerah, peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif yang mendukung kegiatan pariwisata dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas melalui peningkatan peran investasi swasta dalam negeri (PMDN) dan swasta asing (PMA) serta investasi pemerintah serta BUMD melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung kepada kegiatan ekspor komoditi utama, serta mengurangi jumlah pengangguran dengan mengembangkan sistem pelayanan publik yang mendorong semakin berkembangnya investasi swasta, perluasan ekspor melalui pembentukan zona prosesing ekspor pada wilayah koridor ekonomi yang ada, pemberdayaan usaha mikro menengah, peningkatan kualitas teknis pengelola agribisnis dengan pengembangan kluster agrobisnis dan agro industri dalam konteks pengembangan kawasan agropolitan serta pengembangan agrowisata dan ekowisata, pengembangan balai-balai penelitian untuk tanaman komoditi unggulan daerah, peningkatan badan sertifikasi produk ekspor untuk melakukan standardisasi komoditi perdagangan terutama dalam menyesuaikan dengan blue print masyarakat ekonomi ASEAN (MEA, 2015), pengembangan kawasan sentra industri masyarakat, memperbesar peluang pasar untuk produk industri unggulan baik antar wilayah maupun eksternal wilayah, membangun konektifitas dengan pusat-pusat koridor ekonomi Sumatera, melalui perdagangan daerah terutama produk pertanian dan ekonomi kreatif.

Adapun langkah-langkah kebijakan yang seharusnya dilakukan adalah:

1. Meningkatkan nilai ekspor terutama dengan memanfaatkan kerjasama ekonomi melalui sosialisasi MEA dan integrasi ekonomi dengan koridor ekonomi Sumatera dan dengan negara-negara ASEAN dengan mengembangkan industri pengolahan produk

- pertanian unggulan dan memperluas negara tujuan ekspor kelompok negara-negara NAFTA dan mendorong peningkatan permintaan internal dan eksternal wilayah.
2. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan Sumatera Barat melalui pengembangan zona prosesing ekspor pada koridor ekonomi yang ada, kawasan agrobisnis, agropolitan dan kawasan unggulan industri pengolahan dan harus dapat terkoneksi dengan koridor ekonomi Sumatera.
 3. Mengatasi penganguran dengan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif pada setiap kawasan utama, kawasan strategis dan kawasan potensial pariwisata daerah.
 4. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru dengan mendorong dilakukannya investasi yang padat karya, terutama dari pelaksanaan proyek-proyek APBN dan APBD, disamping proyek investasi lembaga swasta dalam negeri dan luar negeri.
 5. Mengurangi konsumsi barang-barang impor dengan menggunakan produk dalam negeri sendiri melalui peningkatan perdagangan antar daerah, peningkatan penggunaan hasil kerajinan rumah tangga yang spesifik lokal.
 6. Mengembangkan produk komoditi ekspor yang berbasis ekonomi lokal seperti produk Hortikultura, perkebunan, perikanan, ternak besar dan kecil, industri kerajinan lokal, industri makanan tradisional dan industri garmen lokal.
 7. Memperkuat jejaring bisnis lokal dengan badan usaha daerah (BUMD) melalui penyusunan kontrak-kontrak bisnis (contract farming) antara pengusaha lokal dan nasional dengan gabungan kelompok tani produsen komoditi unggulan, lembaga keuangan daerah, koperasi untuk menciptakan terjadinya persaingan di tingkat lokal dalam rangka menuju kepada keunggulan persaingan secara global.
 8. Mengembangkan sistem pengaturan yang baik (good governance) dalam sistem pengelolaan pemerintah yang kondusif bagi peningkatan peluang investor dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan investasinya di Sumatera Barat.
 9. Meningkatkan pembangunan SDM melalui pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembentukan karakter, sehingga sumber potensial tenaga kerja ahli di daerah perantauan.

10. Memprioritaskan pembangunan sumberdaya kelautan dan perikanan (maritime & marine) untuk mendukung kegiatan pariwisata, ekonomi kreatif dan industri kerajinan melalui pembangunan infrastruktur dasar pada kemaritiman dan konektivitas diantara destinasi pariwisata utama, strategis dan potensial.

Tabel 3.1 merupakan Asumsi Ekonomi Makro Sumatera Barat yang termuat pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 antara lain:

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat

Indikator	Realisasi		Proyeksi	
	2016	2017	2018	2019
A. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,26	5,7	5,78 **	5,83
I. Permintaan				
1. Konsumsi Masyarakat	4,39			
2. Konsumsi Pemerintah	1,20			
3. Investasi	3,36			
4. Ekspor	-12,84			
5. Impor	-23,04			
II. Penawaran				
1. Pertanian	1,96			
2. Industri Pengolahan	4,90			
3. Lainnya	6,53			
	100			
I. Permintaan				
1. Konsumsi Masyarakat	53,04		54,55 **	
2. Konsumsi Pemerintah	12,85		13,88 **	
3. Investasi	30,10			
4. Ekspor	10,88		10,18 **	
5. Impor	3,32		1,23 **	
II. Penawaran				
1. Pertanian	24,06		22,95 **	
2. Industri Pengolahan	10,11		11,65 **	
3. Lainnya	65,83		49,73 **	
ICOR			3,11 **	
Penduduk Miskin (%)	7,14	6,75	5,87 **	
Tingkat Pengangguran	5,81		6,25 **	
PDRB harga Konstan (Rp Triliun)	148,11		167,80 **	
PDRB harga Berlaku (Rp Triliun)	195,68		219,89 **	
PDRB/Kapita (Rp juta)	37,21		40,81 **	
Tingkat Inflasi (y on y)	5,02		5-6 **	
Investasi (Rp triliun)	58,90		48,92 **	
Penduduk (juta jiwa)	5259,53		5 387 **	
Pajak daerah terhadap APBD (%)				
PAD dan Dana perimbangan terhadap APBD (%)				
Biaya Pendidikan dlm APBD (%)			44%	
Biaya Kesehatan dlm APBD (%)			13%	
Biaya Penelitian dalam APBD (%)			0,01%	

*) Sumber : Proyeksi BI Sumatera Barat

**) Sumber : RPJMD Sumatera Barat 2016-2021

Seiring dengan perkembangan kondisi sebagaimana terlihat pada tabel di atas, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara : meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengupayakan agar laju inflasi agar tidak melebihi satu digit.

3.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Tanah Datar

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Tanah Datar, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Tanah Datar namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Tanah Datar merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Di samping 4 indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah.

Kerangka ekonomi daerah dibentuk dengan indikator-indikator yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah daerah berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha

di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

Mengacu kepada kebijakan ekonomi nasional dan memperhatikan asumsi kondisi ekonomi makro Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maka dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2016-2021, perlu didukung dengan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, antara lain :

1. Pengembangan ekonomi daerah berbasis kawasan dan potensi sumber daya lokal sehingga dapat meningkatkan produktifitas, efisiensi, nilai tambah dan distribusi produk secara sistematis dan terorganisasi dengan baik.
2. Meningkatkan daya saing produk pertanian, UMKM dan objek wisata Kabupaten Tanah Datar dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) sebagai lembaga penggerak ekonomi nagari yang dapat difungsikan untuk berbagai sektor ekonomi produktif masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama pemasaran produk unggulan
5. Mengatasi pengangguran dengan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.
6. Pengalokasian Dana Desa untuk kebutuhan revitalisasi objek wisata yang merupakan asset pemerintah nagari.

3.3.1. Kondisi Umum Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

Kondisi Umum ekonomi Kabupaten Tanah Datar tidak terlepas dari Kondisi Ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Perekonomian Kabupaten Tanah Datar beberapa tahun terakhir cenderung mengalami pertumbuhan yang melambat terutama terjadi pada sektor pertanian dan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama di Kabupaten Tanah Datar.

Kondisi ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 5,67% terealisasi sebesar 5,12%. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar diprediksi dapat tumbuh sebesar 5,79% sesuai dengan target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2016 - 2021.

Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tidak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain.

PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan Indikator yang sering digunakan sebagai tolak ukur kekuatan ekonomi suatu daerah. Secara konseptual PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, PDRB perkapita hanya merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil namun dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2013-2017 tergambar pada tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5
PDRB Perkapita menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2013 – 2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB Perkapita (juta rupiah)	23,78	26,63	28,70	32,77	33,53

Sumber : BPS Tanah Datar

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai PDRB perkapita tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan nilai PDRB perkapita tahun 2016 yakni dari Rp.32,77 juta per orang pertahun menjadi sebesar Rp.33,53 juta per orang pertahun pada tahun 2017. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat juga meningkat dari tahun ke tahun.

Laju Inflasi

Inflasi menggambarkan fenomena kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus dan diikuti oleh kenaikan harga barang

lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil diperlukan sebagai syarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selama tahun 2013-2017, laju inflasi Kabupaten Tanah Datar mengalami fluktuasi, inflasi terendah dicapai pada tahun 2017 sebesar 2,45% dan inflasi tertinggi dicapai pada tahun 2013 sebesar 7,27%. Pada tahun 2017, angka inflasi Kabupaten Tanah Datar berada pada 2,45%, lebih rendah dari inflasi tahun sebelumnya.

Fluktuasi inflasi Kabupaten Tanah Datar tidak bisa terlepas dari fenomena fluktuasi inflasi yang secara umum terjadi di Sumatera Barat yang disebabkan oleh pasokan pangan akibat cuaca, ketergantungan pasokan dari luar Sumatera Barat dan distribusi komoditas pangan keluar Sumatera Barat.

Laju inflasi Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik 3.2:

Grafik 3.2
Laju Inflasi



**) Data Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatera Barat
Vo. 17 No.03 Maret 2017*

Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Datar masih ringan (<10%). Hal ini masih menguntungkan karena

perekonomian daerah masih tetap tumbuh yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, mendorong orang lebih bergairah bekerja karena meningkatnya permintaan barang dan meningkatnya tabungan masyarakat.

Investasi Daerah

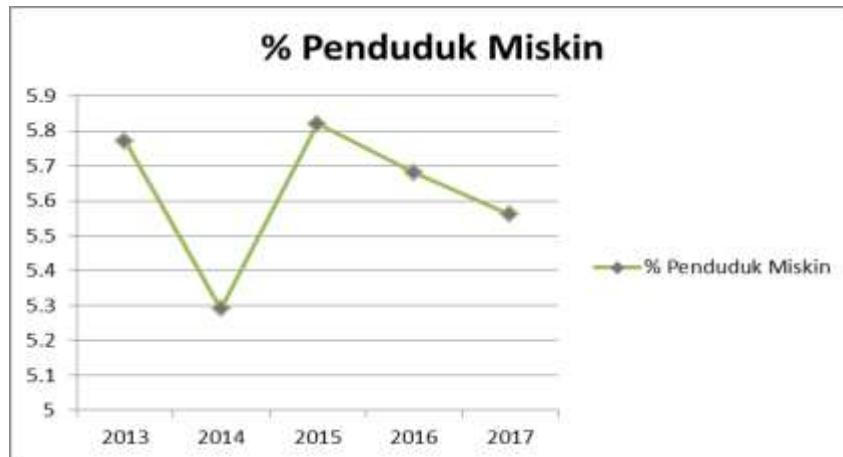
Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh peningkatan investasi di daerah. Investasi yang ada di daerah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial, politik dan perekonomian daerah. Investasi pada umumnya berasal dari investasi Pemerintah, Swasta dan masyarakat. Untuk meningkatkan investasi Pemerintah dilakukan dengan cara meningkatkan porsi belanja publik sedangkan untuk meningkatkan investasi pihak swasta dan masyarakat perlu dilakukan peningkatan promosi serta menggali peluang – peluang investasi yang ada di daerah.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong peningkatan investasi swasta pada sektor pariwisata dan pertanian untuk mempercepat berkembangnya kedua sektor utama perekonomian daerah tersebut. Dalam rangka peningkatan investasi di sector pariwisata dan pertanian, didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah Daerah yang ramah investasi, diantaranya kemudahan perizinan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, keringanan tarif pajak/retribusi daerah.

Kemiskinan dan Pengangguran

Tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat juga dapat di ukur dari persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 sebesar 5,68%, pada tahun 2017 angka kemiskinan diperkirakan sebesar 5,56%, seperti terlihat pada grafik 3.3 :

Grafik 3.3
Persentase Penduduk Miskin, 2013 – 2017



^{*)} Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

^{**) Target RPJMD 2016 – 2021}

Kebijakan untuk penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan antara lain melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja dan optimalisasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta dengan melibatkan seluruh stakeholder.

3.3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Potensi Ekonomi Kabupaten Tanah Datar yang potensial untuk dikembangkan terdiri dari sektor pertanian dan sektor pariwisata. Kabupaten Tanah Datar memiliki berbagai jenis komoditas unggulan khususnya hasil pertanian/peternakan berupa beras, kakao, kopi, kasiavera, jagung, sapi dan hasil industri sandang dan pangan olahan berupa tenun songket, bordir dan berbagai olahan makanan yang berkualitas. Potensi wisata di Kabupaten Tanah Datar merupakan potensi wisata yang komplit yang merupakan perpaduan wisata danau, gunung, budaya dan kuliner.

Untuk mengoptimalkan kedua potensi ekonomi tersebut diatas dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Tanah Datar, perlu mendorong pengembangan sektor Agro Industri yang berdaya saing tinggi melalui peningkatan integrasi dan keterkaitan manufaktur dengan sektor primer (hilirisasi pertanian) dan juga perlu mendorong pengembangan pariwisata sebagai pertumbuhan ekonomi potensial.

Dalam rangka merumuskan tantangan dan prospek ekonomi daerah dilakukan analisis atas kondisi internal ekonomi daerah yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan sedangkan dari kondisi eksternal terdapat peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah.

Kondisi Internal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

Kekuatan antara lain:

1. Memiliki kualitas dan kuantitas lahan yang baik untuk pengembangan komoditi pertanian dan peternakan;
2. Memiliki banyak potensi destinasi objek wisata alam dan budaya yang dapat dikembangkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat;
3. Memiliki keunggulan historis sebagai daerah asal muasal masyarakat Minangkabau dan pusat Kerajaan Minangkabau;
4. Memiliki potensi kuantitas tenaga kerja yang cukup untuk mendukung perekonomian daerah;
5. Memiliki tingkat keamanan yang mendukung pariwisata dan investasi ke daerah;

Kelemahan, antara lain:

1. Belum optimalnya produktivitas hasil pertanian dan peternakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat;
2. Terjadi kesulitan pengairan lahan pertanian di beberapa kecamatan;
3. Belum optimalnya pengelolaan destinasi objek wisata daerah;
4. Belum optimalnya industri pendukung pariwisata daerah seperti belum adanya industri kerajinan cendera mata khas Kabupaten Tanah Datar, serta kemasan oleh-oleh khas Tanah Datar yang belum baik;
5. Kurangnya pemahaman adat dan budaya Minangkabau terutama pada generasi muda;
6. Masih rendahnya kualitas SDM angkatan kerja;
7. Kurangnya permodalan KUMKM;
8. Rendahnya kualitas produk pertanian maupun industri kecil;
9. Kurangnya akses pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan UMKM;

Kondisi Eksternal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

Peluang antara lain:

1. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lokasi proyek prioritas nasional dalam bidang ketahanan pangan pada RKP Tahun 2019, diharapkan Kabupaten Tanah Datar dapat menjadi lokasi pelaksanaan proyek nasional ketahanan pangan.
2. Meningkatnya kebutuhan komoditi pertanian seperti kakao, kopi, karet baik dari industri pengolahan dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor.
3. Salah satu majalah pariwisata internasional dari New York, Majalah Travel Budget menobatkan Nagari Tuo Pariangan sebagai desa terindah di dunia.

4. Industri pariwisata merupakan industri yang mengalami peningkatan cukup tinggi pada tahun 2017, hal ini berarti minat masyarakat untuk berwisata semakin besar.
5. Meningkatnya penyaluran dana bantuan permodalan bagi KUMKM dari pemerintah pusat melalui berbagai program pendanaan secara nasional.

Ancaman antara lain:

1. Semakin berkembangnya pariwisata daerah tetangga.
2. Masih rendahnya kualitas sarana aksesibilitas jalan menuju Kabupaten Tanah Datar yang merupakan kewenangan dari Provinsi Sumatera Barat.

Tantangan Perekonomian Daerah

Berbagai tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 dan tahun 2019 di sektor ekonomi yaitu:

- a. Masih relatif lemahnya keterkaitan sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya, termasuk pariwisata dan industri pengolahan. Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor unggulan di dalam perekonomian Kabupaten Tanah Datar yang diharapkan berkorelasi positif dengan sektor pariwisata. Untuk itu diperlukan sinergi dengan keterkaitan sektor unggulan dengan kontribusi tinggi dengan sektor lainnya yaitu pariwisata, perdagangan, dan UMKMK. Industri pangan olahan berbasis pertanian yang didominasi oleh UMKMK menjadi salah satu alternatif meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sehingga produksi dan produktivitasnya dapat ditingkatkan pada tahun 2019.
- b. Pertumbuhan ekonomi masih menghadapi tantangan berat di tahun depan (2019) yang dikarenakan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dikhawatirkan meningkat / belum stabil dan rentan terhadap pengaruh eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi masih belum cukup inklusif apalagi optimal. Korelasi antara laju pertumbuhan ekonomi dengan jumlah dan tingkat kemiskinan dan pengangguran selama periode 7 tahun terakhir masih rendah yakni masing-masing $r=(-0,581)$ dan $r=(-0,268)$. Hal ini menunjukkan masih renggangnya keterkaitan antara laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Tanah Datar yang terindikasi dari konstanta pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Kenyataan ini sangat dirasakan terutama terlihat dari masih tetap persistennya kemiskinan dan TPT sehingga

pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kelas bawah khususnya di wilayah perdesaan. Salah satu buktinya adalah belum selaras dan terdistribusikannya secara merata pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Kualitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar perlu lebih ditingkatkan kualitas dan inklusifitasnya di masa mendatang sehingga lebih Pro Poor dan Pro Job.

Memperhatikan kondisi di atas, maka pada tahun 2019, diperkirakan perekonomian Kabupaten Tanah Datar perlu upaya optimal untuk menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir serta masih adanya ketidakpastian dan volatilitas perekonomian nasional. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:

- a. Menjaga dan/atau mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kualitasnya dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- b. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan terutama dengan mengutamakan pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) agrobisnis dan pariwisata sehingga diharapkan laju pertumbuhan ekonomi lebih pro poor dan pro job, sekaligus pro environment.
- c. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi

- atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
- d. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan (sustainable). Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.
 - e. Meningkatkan daya saing perdagangan dan ekspor daerah, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan nilai ekspor. Ekspor komoditi Kabupaten Tanah Datar sangat sedikit kandungan impor input produksinya karena berbasis produk agro. Pertumbuhan ekspor akan secara signifikan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bahkan mungkin dapat menambah lapangan kerja.
 - f. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
 - g. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL serta kelengkapan fasilitas agro complex secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Tanah Datar, di samping menciptakan lapangan kerja.
 - h. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Tanah Datar.
 - i. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Tanah Datar sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.

- j. Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Pada triwulan I 2019, berbagai indikator mengindikasikan bahwa kinerja perekonomian di seluruh wilayah berpotensi membaik. Perbaikan ekonomi terutama didorong oleh membaiknya permintaan, baik domestik maupun eksternal, terutama terkait dengan komoditas makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, kimia, serta baja. Dorongan pertumbuhan ekonomi berasal dari peningkatan konsumsi swasta dan peningkatan realisasi belanja pemerintah, baik untuk belanja barang dan jasa, maupun belanja barang modal. Meningkatnya permintaan swasta tersebut, kemudian direspons oleh sektor industri melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Sementara itu, semakin meningkatnya penyerapan anggaran pemerintah berpotensi mendorong kegiatan di sektor infrastruktur, yang mencerminkan meningkatnya kegiatan investasi, terutama investasi bangunan. Pertumbuhan ekonomi nasional untuk keseluruhan tahun 2017 diperkirakan membaik dibandingkan dengan tahun 2016.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 5,0%-5,4%, membaik terbatas dari realisasi pertumbuhan tahun 2014 yang tercatat sebesar 5,2%. Meningkatnya kegiatan konsumsi dan investasi menjadi penopang membaiknya kinerja ekonomi. Belanja pemerintah yang mulai meningkat sejak triwulan II 2015 menjadi stimulus penggerak kegiatan ekonomi, terutama investasi. Sejalan dengan hal tersebut, optimisme dunia usaha diprediksi membaik sehingga mendorong ekspansi usaha. Selain itu, harapan akan membaiknya perekonomian global, terutama ekonomi negara-negara maju, berpotensi menciptakan peluang ekspor. Geliat yang terjadi di dunia usaha akan berdampak positif pada membaiknya pendapatan masyarakat, sehingga daya beli membaik. Lebih lanjut perbaikan daya beli akan mendorong kegiatan konsumsi. Sebagai cerminan dan meningkatnya investasi, kegiatan impor juga diperkirakan akan meningkat, terutama untuk impor bahan baku dan barang modal. Perbaikan ekonomi makro tahun 2015 dan tahun 2016 akan ditopang oleh perbaikan di sektor pertanian, industri, infrastruktur, dan perdagangan, sejalan dengan perbaikan di sisi permintaan. Ke depan, dalam perspektif

yang lebih panjang, masih terdapat optimisme berlanjutnya perbaikan kinerja perekonomian nasional. Langkah strategis pemerintah untuk menempuh beberapa agenda pembangunan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 Pemerintah Pusat, diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Salah satu agenda prioritas (Nawa Cita) pemerintah adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu cerminan kemandirian ekonomi nasional adalah terwujudnya kedaulatan pangan. Peningkatan kedaulatan pangan diterjemahkan menjadi langkah-langkah holistik untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kesejahteraan pelaku, stabilnya harga pangan dengan kualitas yang terjamin, aman dan bergizi.

Upaya mencapai kedaulatan pangan, khususnya melalui peningkatan produksi dan produktivitas, perlu mendapat dukungan baik di level pusat maupun daerah. Salah satu upaya dalam mendorong produksi dan produktivitas pangan adalah tersedianya infrastruktur pertanian yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang saat ini diperlukan antara lain berupa perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengairan, seperti waduk dan saluran irigasi, serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi kepada konsumen akhir. Untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur tersebut, dukungan dan koordinasi antara instansi yang membidangi pembangunan fisik serta pemerintah daerah melalui dukungan kebijakan yang mempermudah implementasi pembangunan tersebut, mutlak diperlukan. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian juga memerlukan dukungan penyediaan teknologi dan sarana produksi, serta sumber daya manusia yang baik. Hal ini juga hanya dapat terwujud melalui dukungan banyak pihak, yaitu masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha, dari tingkat pusat hingga daerah. Dari sisi harga, tekanan inflasi pada triwulan II 2015 diperkirakan akan sedikit meningkat. Inflasi yang lebih tinggi terutama dipicu oleh faktor musiman meningkatnya permintaan, sejalan dengan masuknya bulan Ramadhan serta masa libur tahun ajaran baru yang akan mendorong naiknya aktivitas konsumsi masyarakat. Penyesuaian harga diperkirakan terjadi pada kelompok makanan (aneka daging, bumbu, dan beras). Meningkatnya permintaan bahan pangan tersebut berpotensi memicu shortage pasokan pangan antardaerah. Dengan demikian, tekanan inflasi dari sisi pangan diperkirakan cukup merata terjadi di seluruh

wilayah. Sementara itu, mobilitas masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya berpotensi direspons dengan penyesuaian tarif berbagai moda angkutan seperti tarif angkutan antarkota dan angkutan udara. Selain faktor permintaan, kebijakan Pemerintah terkait rencana kenaikan

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Prinsip pengelolaan keuangan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah pada RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.4.1. Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan sebagaimana tercantum pada tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Tahun 2016 – 2020

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun ⁽¹⁾	Realisasi Tahun	Tahun Berjalan	Proyeksi/Target pada	Proyeksi/Target
		(n-3) 2016	(n-2) 2017	(n) 2018	Tahun Rencana (n) 2019 ⁽²⁾	Tahun Rencana (n+1) 2020
		(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)	
I.	PENDAPATAN	1,188,763,795,259.84	1,224,552,541,224.56	1,260,633,146,440.00	1,288,117,179,035.00	1,535,982,348,563.60
I.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	118,971,143,693.84	172,805,136,138.56	152,110,032,440.00	138,226,411,325.00	211,132,554,807.60
I.1.1	Pajak Daerah	11,771,072,376.00	16,523,394,357.98	17,894,893,600.00	18,158,355,955.00	23,099,229,753.60
I.1.2	Retribusi daerah	8,035,472,905.00	6,867,932,810.00	9,822,642,840.00	10,849,055,500.00	18,918,813,366.24
I.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	22,072,440,727.00	23,511,196,941.00	30,292,000,000.00	18,312,000,000.00	37,615,172,830.95
I.1.4	Lain-lain PAD yang sah	77,068,969,685.84	125,902,612,029.58.00	94,100,496,000.00	90,906,999,870.00	134,565,181,359.84
II.	DANA PERIMBANGAN	963,487,573,519.00	928,980,499,474.00	985,569,207,000.00	1,008,820,060,710.00	1,185,231,990,656.00

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun ⁽¹⁾	Realisasi Tahun	Tahun Berjalan	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target Tahun Rencana (n+1)
		(n-3) 2016	(n-2) 2017	(n) 2018	2019 ⁽²⁾	2020
		(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)	
II.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15,670,214,545.00	16,512,932,135.00	16,769,633,000.00	16,769,633,000.00	17,189,152,000.00
II.2	Dana Alokasi Umum	707,992,904,000.00	695,555,745,000.00	707,992,904,000.00	695,555,745,000.00	843,230,876,550.46
II.3	Dana Alokasi Khusus	239,824,454,974.00	216,911,822,339.00	273,243,829,000.00	296,494,682,710.00	324,811,962,105.53
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	106,307,733,047.00	122,766,905,612.00	122,953,907,000.00	141,070,707,000.00	139,617,803,100.00
III.1	Hibah	7,526,024,551.00	4,291,848,786.00	450,000,000.00	44,316,800,000.00	3,000,000,000.00
III.2	Dana Bagi Hsl Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	39,489,871,496.00	42,275,284,826.00	39,954,612,000.00	39,954,612,000.00	48,362,084,650.00
III.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53,999,837,000.00	69,969,772,000.00	82,549,295,000.00	56,799,295,000.00	80,000,000,000.00
III.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	5,292,000,000.00	6,230,000,000.00	-	-	8,255,718,450.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tahun 2017 dan 2018 cenderung meningkat. Sumber pendapatan terbesar berasal dari dana perimbangan, hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah.

Penghitungan Pendapatan rencana tahun 2019 berdasarkan analisis keuangan realisasi Tahun 2016 dan Tahun 2017 terjadi kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan, begitu juga tahun 2020 yang disesuaikan dengan data RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021.

3.4.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan PAD pada dasarnya ditempuh melalui kebijakan berikut :

1. Intensifikasi

Intensifikasi PAD dilakukan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM, yang dilaksanakan melalui upaya-upaya berikut :

- a) Optimalisasi pembangunan pariwisata daerah dalam rangka meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PAD
 - b) Penyempurnaan peraturan daerah dan peraturan Bupati yang terkait dengan penyesuaian tarif retribusi;
 - c) Meningkatkan kegiatan penyuluhan/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.
 - d) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
 - e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola PAD.
 - f) Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah yang didasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme;
 - g) Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan asli daerah;
 - h) Optimalisasi pengelolaan asset daerah;
 - i) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - j) Optimalisasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD M. Ali Hanafiah.
2. Ekstensifikasi
- Melaksanakan kajian-kajian teknis yang berkaitan dengan sumber-sumber objek pendapatan yang belum tertampung di dalam peraturan daerah.

b. Dana Perimbangan

Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, hal ini terlihat dari tingginya kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Mengingat tingginya ketergantungan tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan dana perimbangan yaitu, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Penerimaan Dana Transfer Daerah dari Dana Insentif Daerah, melalui peningkatan kinerja dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta perekonomian dan kesejahteraan termasuk pengendalian inflasi.
- 2) Melakukan konsolidasi data dengan Badan Pusat Statistik, sehingga data yang digunakan dalam penghitungan dana perimbangan sudah merupakan data yang akurat.

- 3) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, DPR RI dan DPD RI dan Pemerintah Provinsi.
- 4) Memfasilitasi upaya peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak dan non pajak.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah Kabupaten Tanah Datar. Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah serta mencari peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan berupa hibah dan dana penyesuaian otonomi daerah.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan penerimaan pajak provinsi karena hal ini akan menyangkut besarnya bagi hasil untuk daerah dari Pajak Provinsi.

3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan dalam bentuk:

- a. Pemenuhan gaji PNS dengan mengantisipasi kenaikan gaji tahun 2019.
- b. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan 10 prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan.
- c. Penganggaran untuk mendukung program nasional.
- d. Pemecahan terhadap masalah mendesak antara lain penanganan bencana alam dan kerawanan sosial.
- e. Memprioritaskan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya.
- f. Pencapaian target SPM.

Selanjutnya dapat dilihat alokasi realisasi dan perkiraan belanja daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Jumlah
----	--------	--------

		Realisasi Tahun (n-3) 2016	Realisasi Tahun (n-2) 2017	Tahun Berjalan (n-1) 2018	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n) 2019	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n+1) 2020
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
II.	BELANJA	1,249,495,598,573.46	1,218,833,756,256.58	1,334,196,748,948.00	1,594,353,505,613.00	1,610,412,646,677.44
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	834,323,803,837.00	740,119,692,011.00	823,918,918,330.00	884,511,765,065.00	934,781,457,918.42
2.1.1	Belanja Pegawai	669,537,549,656.00	562,662,727,329.00	598,006,764,600.00	727,154,127,305.00	
2.1.2	Belanja Hibah	20,968,918,062.00	9,116,873,547.00	13,642,200,000.00	11,147,200,000.00	
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	354,960,000.00	1,501,710,000.00	3,319,800,000.00	3,319,800,000.00	
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan desa	2,305,317,427.00	2,402,244,672.00	3,372,295,900.00	3,501,283,400.00	
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa (Nagari) dan Parpol	141,048,475,660.00	163,936,466,280.00	193,024,354,360.00	129,389,354,360.00	
2.1.6	Belanja Tak Terduga	108,583,032.00	499,670,183.00	12,553,503,470.00	10,000,000,000.00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	415,171,794,736.46	478,714,064,245.58	510,277,830,618.00	709,841,740,548.00	628,892,115,863.10

Sumber data : Hasil rumusan TAPD

Penghitungan Belanja rencana tahun 2019 berdasarkan analisis keuangan realisasi Tahun 2016 dan Tahun 2017 terjadi kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan, begitu juga tahun 2020 yang disesuaikan dengan data RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukan bagi belanja pegawai termasuk gaji dan tambahan penghasilan, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan parpol dan belanja tidak terduga.

Rencana belanja pegawai tahun 2019 diproyeksikan naik sebesar 21% hal ini dipengaruhi oleh beberapa kebijakan pemerintah antara lain:

1. Antisipasi kenaikan gaji pegawai
2. Penambahan formasi pegawai baru
3. Penyesuaian tambahan penghasilan pegawai

3.4.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dalam hal ini meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) serta pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal kepada BUMD dan pada Bank Nagari.

Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3) 2016	Realisasi Tahun (n-2) 2017	Tahun Berjalan (n-1) 2018	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n) 2019	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n+1) 2020
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
III.	PEMBIAYAAN DAERAH	140.852.823.517,85	81.292.775.828,23	73.563.602.508.00	306.236.326.578.00	74.430.298.113.84
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	148.059.776.940,85	81.292.775.828,23	73.743.602.508.00	306.236.326.578.00	74.430.298.113.84
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA)	148.053.726.940,85	81.281.575.828,23	73.743.602.508.00	306.236.326.578.00	74.430.298.113.84
3.1.3	Penerimaan Piutang daerah	6.050.000,00	11.200.000,00	-	-	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.206.953.426,00	-	180.000.000.00	-	
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.206.953.426,00	-	180.000.000.00	-	

Sumber data: Hasil rumusan TAPD Kabupaten Tanah Datar

Penghitungan Pembiayaan rencana tahun 2019 berdasarkan analisis keuangan realisasi Tahun 2016 dan Tahun 2017 terjadi kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan, begitu juga tahun 2020 yang disesuaikan dengan data RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021. Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2019 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target dan Visi Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2021. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD Tahun 2019 berpedoman dan memperhatikan :

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam 5 prioritas pembangunan nasional.
2. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 guna tercapainya visi dan misi Gubernur Sumatera Barat sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan RKPD Tahun 2019.
4. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tanah Datar pada penyusunan RKPD Tahun 2019.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2019. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun



2019 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

Berdasarkan permasalahan pembangunan seperti yang diuraikan pada Bab II dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanah Datar serta realita tuntutan perkembangan pembangunan, maka isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 yang harus segera ditangani adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama, akhlak, budi pekerti dan tatanan kehidupan.
2. Belum optimalnya kualitas dan akses pendidikan
3. Belum optimalnya kualitas pelayan kesehatan, kesadaran hidup bersih dan sehat, serta kesehatan lingkungan.
4. Masih adanya pengangguran dan penduduk miskin.
5. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan belum optimalnya penataan ruang dan kawasan strategis.
6. Peningkatan daya saing ekonomi daerah.
7. Belum optimalnya pelaksanaan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan santun).

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019

Tujuan pembangunan nasional secara khusus telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Secara umum strategi pembangunan nasional dituangkan dalam Tiga Dimensi Pembangunan, yaitu seperti gambar 4.1 :

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL



17

Gambar 4.1
Dimensi Strategi Pembangunan Nasional

Dijabarkan kepada sembilan agenda prioritas disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.



Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Pencapaian tema tersebut dapat diwujudkan melalui lima (5) prioritas pembangunan nasional yaitu :

1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif;
4. Pemantapan Ketahanan Energi Melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif; dan
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu:

“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel 4.1 :



Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

VISI

“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama
		3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)
		4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial
	2. Penguatan kelembagaan agama dan adat	5. Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat
		6. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat
Misi 2: Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.	1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur
	2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur
		3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
		4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
	3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparans, aspiratif, dan partisipatif	5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik



MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter	1. Meningkatnya tingkat pendidikan 2. Meningkatnya integritas peserta didik
	2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat	3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan
	3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat	4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja 5. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
	4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna	6. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak	7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata 8. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana 9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga 10. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan 11. Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak
Misi 4: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya	1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah
	2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani	2. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan 3. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis



MISI	TUJUAN	SASARAN
pembangunan daerah		4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan
	3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan	5. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman
	4. Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya	6. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
	5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	7. Menurunnya jumlah penduduk miskin
		8. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
		9. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal
		10. Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas wilayah
		2. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi
		3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas
		4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air
		5. Meningkatnya ketersediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan
		6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)
	2. Meningkatkan Pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	7. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
		8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		9. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan



MISI	TUJUAN	SASARAN
	3. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana	10. Berkurangnya resiko bencana
		11. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana
	4. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	12. Terpeliharanya debit sungai
		13. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **“Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**” terkait dengan isu strategis Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Adat dan Agama.

Tujuan Misi Pertama diwujudkan dengan pencapaian sasaran yang diukur dengan implementasi pemahaman dan pengamalan keagamaan dan budaya yang baik akan melahirkan pengamalan agama dan budaya yang baik pula. Untuk sasaran penerapan nilai-nilai agama dan budaya, diperlukan keselarasan antara tujuan, sasaran dengan program-program budaya yang lebih memfokuskan pada penerapan nilai-nilai ABS-SBK ke dalam perilaku masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **“Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera Barat, dan terkait pula dengan isu Pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan dan peranan pemerintah daerah yang semakin besar dalam menggerakkan proses pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **“Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan isu strategis tentang jiwa dan semangat kewirausahaan yang cukup tinggi dan ulet masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **“Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya**



pembangunan daerah” terkait dengan isu strategis daya beli masyarakat, daya saing daerah untuk menghadapi globalisasi, akses dengan daerah tetangga, prasarana dan sarana daerah, daerah tertinggal dan ketimpangan pembangunan serta dukungan pemerintah pusat.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **“Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”** terkait dengan isu strategis bencana alam dan kualitas lingkungan hidup.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH, dengan penjelasan sebagai berikut:

Madani	adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berbudaya	adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.
Sejahtera	adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat.

Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.
---	--

Misi pembangunan RPJMD Tahun 2016 – 2021 :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.



Gambar 4.2

Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2016 – 2021



Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **“Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya”** hal ini terkait dengan isu strategis Masih rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ABS-SBK dan aturan hukum.

Tujuan Misi Pertama diwujudkan dengan pencapaian sasaran yang diukur dari indikator Persentase peningkatan zakat yang terhimpun pada BAZ Kab. Tanah Datar, Jumlah masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, Jumlah hafizh Alqur'an dan Persentase LPA (TPA, TPSA, MDTA) yang telah terakreditasi A yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi pertama diantaranya:

- Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- Program pengembangan nilai budaya
- Program pengelolaan keragaman budaya
- Program pengelolaan kekayaan budaya
- Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK”** terkait dengan isu strategis Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan, kesadaran hidup bersih dan kesehatan lingkungan serta belum optimalnya kualitas dan akses pendidikan dan masih adanya pengangguran dan kemiskinan.

Tujuan Misi Kedua diwujudkan dengan pencapaian sasaran yang diukur dari indikator Angka Partisipasi Murni SD/MI, Angka Partisipasi SMP/MTs, Angka rata-rata lama sekolah (tahun), Persentase penduduk melek huruf diatas 15 tahun, Indeks integritas siswa, Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, Angka kematian bayi (AKB) per 1000 KH, Persentase balita gizi buruk, Persentase kepesertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, Rata-rata jumlah anak dalam keluarga, Indeks pembangunan gender, Rasio KDRT, Persentase peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan, Persentase organisasi kepemudaan (OKP) yang aktif, Persentase penduduk miskin, Persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi kedua diantaranya:

- Program pendidikan anak usia dini
- Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Program pendidikan non formal
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan ibu dan anak
- Program penyelenggaraan kesehatan nasional
- Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- program penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan
- Program perbaikan gizi masyarakat
- Program keluarga berencana
- Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- Program pemberdayaan masyarakat fakir miskin

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **“Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”** terkait dengan isu strategis Belum optimalnya pelayanan publik dan penerapan *e-government* yang terintegrasi.

Tujuan Misi Ketiga diwujudkan dengan pencapaian sasaran yang diukur dari indikator Angka kriminalitas, Persentase penurunan pelanggaran perda, Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Penerapan *e-government* yang terintergrasi, Tingkat prestasi kinerja LPPD (skor) dan Persentase peningkatan PAD yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi ketiga diantaranya:

- Program pembinaan dan pengembangan aparatur
- Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan hidup
- Program peningkatan pemberantasan pekat
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
- Program perencanaan pembangunan daerah

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”** terkait dengan isu strategis masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah.

Tujuan Misi Keempat diwujudkan dengan pencapaian sasaran yang diukur dari indikator Persentase panjang jalan dalam kondisi baik, Persentase

ketersediaan prasarana lalu lintas, Persentase ketersediaan jembatan dalam kondisi baik, Persentase irigasi dalam kondisi baik, Persentase pelayanan air bersih, Persentase penurunan jumlah kawasan kumuh, Persentase kesesuaian pola pemanfaatan ruang, IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), Persentase dampak bencana yang ditangani dengan baik dan Persentase Nagari siaga bencana yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi keempat diantaranya:

- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- Program pembangunan infrastruktur pedesaan
- Program prasarana dan fasilitasi perhubungan

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **“Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah”** terkait dengan isu strategis belum optimalnya pengelolaan pariwisata daerah, masih rendahnya teknologi dan inovasi serta daya saing produk daerah, masih rendahnya investasi di daerah.

Tujuan Misi Kelima diwujudkan dengan pencapaian sasaran yang diukur dari indikator PDRB Per kapita (dalam juta Rp.), Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, Persentase pengangguran terbuka, Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (orang) dan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Rp) yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi kelima diantaranya :

- Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- Program pengembangan destinasi pariwisata
- Program pengembangan pemasaran pariwisata



4.2. Prioritas Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 disusun dengan mengangkat tema :

“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah serta kualitas SDM dalam tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

Prioritas pembangunan :

1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya.
2. Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Peningkatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, industri, perdagangan dan lembaga keuangan
4. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan.
5. Peningkatan infrastruktur daerah.
6. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Prioritas, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

PRIORITAS 1

Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya

STRATEGI

1. Pembinaan lembaga amil zakat
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemahaman terhadap Al



Quran dan Hadist.

3. Membentuk dan membina rumah tahfizh
4. Meningkatkan aktifitas kegiatan kelompok keagamaan
5. Meningkatkan kompetensi pemangku adat, lembaga adat, pelaku budaya, dan lembaga kebudayaan

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan kapasitas lembaga amil zakat
2. Satu kecamatan satu masjid percontohan
3. Satu Kecamatan satu rumah tahfidz
4. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, dai, alim ulama, dan guru TPA/TPSA
5. Akreditasi TPA/TPSA
6. Sertifikasi guru TPA/TPSA
7. Penerapan adat salingka nagari
8. Penguatan administrasi kelembagaan adat dan budaya

PRIORITAS 2

**Peningkatan kualitas pendidikan,
derajat kesehatan dan
kesejahteraan sosial masyarakat**

**STRATEGI**

1. Peningkatan layanan pendidikan dasar.
2. Peningkatan layanan pendidikan non formal.
3. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak
4. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang dan jenis pendidikan
5. Peningkatan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan
6. Memantapkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
8. Meningkatkan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi terhadap masyarakat dan stakeholder
9. Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban atau saksi tindak kekerasan
10. Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pembangunan
11. Pemberdayaan organisasi kepemudaan
12. Peningkatan sarana dan prasana olahraga

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan perluasan dan akses pendidikan dasar
2. Peningkatan perluasan dan akses pendidikan non formal



3. Peningkatan pendidikan berkarakter melalui kurikulum ABS- SBK dan tahfizhulquran
4. Meningkatkan peran siswa, guru, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan
5. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
6. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
7. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
8. Meningkatkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi
9. Peningkatan daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap resiko dan finansial di bidang kesehatan
10. Pendewasaan usia perkawinan
11. Penyebarluasan informasi tentang kependudukan dan KB
12. Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPTO)
13. Meningkatkan kapasitas anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya
14. Peningkatan kualitas lembaga masyarakat
15. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari
16. Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan daya saing pemuda
17. Meningkatkan kompetisi olahraga



18. Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

19. Peningkatan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

PRIORITAS 3

**Peningkatan ketahanan pangan,
pengembangan pariwisata,
industri, perdagangan dan
lembaga keuangan**

STRATEGI

1. Meningkatkan kontribusi sektor perekonomian dari sektor utama pertanian dan industri olahan.
2. Mendorong penciptaan pemusatan ekonomi (aglomerasi) melalui penentuan kawasan.
3. Penguatan kelembagaan usaha dan pengembangan jaringan pemasaran.
4. Mengembangkan destinasi pariwisata halal berbasis budaya dan alam dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
5. Meningkatkan dukungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
6. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja



7. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata
8. Pengembangan Ekonomi Kreatif penunjang pariwisata
9. Penyesuaian tarif masuk objek wisata Kabupaten Tanah Datar

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan Penguatan cadangan pangan
2. Peningkatan produksi komoditi unggulan pertanian dan perikanan dengan pendekatan potensi wilayah
3. Peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi tepat guna pertanian dan perikanan
4. Peningkatan pemanfaatan benih dan bibit unggul serta perluasan logistiknya
5. Mendorong pengembangan ekonomi sesuai tema pada masing-masing koridor pembangunan ekonomi daerah
6. Pengembangan dan peningkatan usaha industri berbasis klaster
7. Pengembangan dan penumbuhan sentra industri potensial
8. Fasilitasi Kemitraan Usaha dengan Perusahaan Besar
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan
10. Peningkatan produksi dan produktifitas hasil pertanian
11. Pengembangan UMKM berbasis sumberdaya lokal
12. Mendorong pengembangan ekonomisesuai tema pada masing-masing koridor pembangunan ekonomi daerah



13. Pengembangan kawasan sentra produksi, agribisnis dan minapolitan
14. Pengembangan dan Revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan
15. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah
16. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan penguatan mikro bagi masyarakat kurang mampu
17. Peningkatan pelayanan penanaman modal
18. Peningkatan kualitas tenaga kerja
19. Peningkatan perluasan kesempatan kerja
20. Penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIP-KAB)
21. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
22. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Pariwisata
23. Pemberdayaan masyarakat melalui daya saing produk dan jasa UMKM
24. Penguatan kelembagaan Kepariwisataan
25. Peningkatan pembinaan objek wisata/pokdarwis
26. Peningkatan SDM Pelaku Wisata
27. Penyusunan perubahan ranperda tarif masuk objek wisata

**PRIORITAS 4****Pengurangan pengangguran dan kemiskinan**

STRATEGI

1. Meningkatkan sinergitas dan integrasi program penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan dukungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan Kualitas Tenaga kerja
2. Pengembangan kesempatan kerja melalui peningkatan lapangan usaha produktif secara terpadu
3. Peningkatan sarana dan prasarana lapangan kerja
4. Peningkatan hubungan industrial
5. Peningkatan kewirausahaan
6. Peningkatan penyebaran informasi kesempatan kerja

PRIORITAS 5**Peningkatan infrastruktur daerah**

STRATEGI

1. Meningkatkan kualitas jalan
2. Meningkatkan prasarana lalu lintas



	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi 4. Meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman
	<p>ARAH KEBIJAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan rehabilitasi jalan 2. Peningkatan prasarana lalu lintas 3. Peningkatan dan rehabilitasi jembatan 4. Peningkatan kualitas jaringan irigasi 5. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi permukiman 6. Pengembangan dan Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih 7. Penurunan jumlah kawasan kumuh
<p>PRIORITAS 6 Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup</p>	
	<p>STRATEGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi, sarana prasarana dan SDM penanggulangan bencana 2. Mewujudkan usaha atau kegiatan yang ramah lingkungan
	<p>ARAH KEBIJAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengembangan struktur ruang 2. Mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan



3. Penyediaan informasi, sarana prasarana dan SDM penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

PRIORITAS 7

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

STRATEGI

1. Meningkatkan upaya preventif tindakan kriminalitas
2. Meningkatkan penegakan Perda
3. Meningkatkan kualitas produk hukum

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan wawasan masyarakat terhadap dampak kriminalitas
2. Peningkatan jumlah personil POL PP
3. Peningkatan kapasitas penyusunan dan pembahasan produk hukum .

PRIORITAS 8

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi

STRATEGI

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
2. Meningkatkan implementasi SAKIP



3. Meningkatkan implementasi sistem e-government
4. Penyajian laporan keuangan sesuai standar
5. Meningkatkan kapabilitas APIP
6. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan ABS-SBK bagi Aparatur
7. Meningkatkan Penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
8. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan
9. Melaksanakan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi dalam pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan
10. Melaksanakan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi dalam pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan
11. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pajak dan retribusi

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
2. Peningkatan Kapabilitas APIP
3. Penerapan budaya pelayanan prima
4. Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan publik
5. Peningkatan penataan kelembagaan, kepegawaian dan



ketatalaksanaan

6. Penyelerasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
7. Peningkatan SDM Aparatur dalam ABS- SBK
8. Optimalisasi penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
9. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan
10. Pengembangan dan penguatan jaringan kelitbangan
11. Pengembangan sistem inovasi daerah
12. Peningkatan Kemampuan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
13. Peningkatan Pemahaman Wajib Pajak dan Retribusi Daerah





BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Selanjutnya pagu per prioritas pembangunan dijabarkan kedalam Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2019 disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Pagu Indikatif
RKPD Tahun 2019 Perangkat Daerah

Nomor	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	95,957,846,051.00
2	Dinas Kesehatan	107,695,249,316.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	74,211,262,854.00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	148,500,000,000.00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	16,953,000,000.00

Nomor	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp.)
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	6,005,000,000.00
7	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3,363,240,000.00
8	Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah	2,223,204,000.00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5,447,548,000.00
10	Dinas Pangan dan Perikanan	5,804,200,000.00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4,064,919,930.00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	15,243,775,440.00
13	Dinas Perhubungan	7,110,368,780.00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5,907,122,000.00
15	Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan	21,849,143,000.00
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	3,918,500,000.00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5,381,790,000.00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	46,506,380,000.00
19	Dinas Pertanian	19,249,527,500.00
20	Sekretariat Daerah	37,833,168,000.00
21	Sekretariat DPRD	31,617,208,000.00
22	Kantor Camat X Koto	2,735,007,000.00
23	Kantor Camat Batipuh	1,479,760,000.00
24	Kantor Camat Rambatan	1,713,500,000.00
25	Kantor Camat Lima Kaum	1,502,811,000.00
26	Kantor Camat Tanjung Emas	1,046,339,250.00
27	Kantor Camat Lintau Buo	1,066,171,000.00
28	Kantor Camat Sungayang	912,000,000.00
29	Kantor Camat Sungai Tarab	913,832,972.00
30	Kantor Camat Pariangan	3,098,300,000.00
31	Kantor Camat Salimpaung	1,147,000,000.00
32	Kantor Camat Padang Ganting	1,605,750,000.00
33	Kecamatan Tanjung Baru	930,000,000.00
34	Kecamatan Lintau Buo Utara	1,302,823,750.00
35	Kecamatan Batipuh Selatan	816,919,091.00
36	Inspektorat	3,258,001,752.00
37	Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan	5,408,000,000.00
38	Badan Keuangan Daerah	6,220,798,000.00



Nomor	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp.)
39	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	9,842,273,862.00
	JUMLAH	709,841,740,548.00

Rincian rencana program kegiatan pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 6.1.



Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

VISI		TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH						
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		
						KONDISI AWAL	2019	
MISI 1 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya	1 Meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya	Persentase nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan masyarakat	100%	1 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam	1. Persentase peningkatan zakat yang terhimpun pada BAZ Kab.Tanah Datar 2. Jumlah masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	Rp.9.179.036.735,- 0	4% 14	
				2 Menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai Kabupaten Tahfizh	Jumlah hafizh Alquran	325	1.750	
				3 Meningkatnya kualitas/SDM lembaga keagamaan di masyarakat	Persentase LPA (TPA, TPSA, MDTA) yang telah terakreditasi A	0%	6%	
				4 Meningkatnya pengamalan adat dan nilai-nilai budaya	Persentase nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat	50%	70%	
MISI 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang	1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	IPM	72	1 Meningkatnya mutu pendidikan	1. Angka Partisipasi Murni (APM): - SD/MI	90.67	91.55	



VISI							
TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH							
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	
						KONDISI AWAL	2019
beriman, sehat, cerdas, berakhlak dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK					- SMP/MTs	81.69	81.85
					2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7.93	8.28
					3. Persentase penduduk melek huruf di atas 15 tahun	98.70%	98.94%
				2 Meningkatkan perilaku positif siswa, melalui pelaksanaan ABS-SBK dan tahfizh sebagai jam pelajaran wajib	Indeks integritas siswa	75	87
				3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	326	306
					2. Angka kematian bayi (AKB) per 1000 KH	15.2	12.38
					3. Persentase balita gizi buruk	0.20%	<0,2%
					4. Persentase kepersertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	56.20%	95.00%
				4 Meningkatkan pengendalian kependudukan dan keluarga berencana	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2.7	2.4
				5 Meningkatkan perlindungan	1. Indeks pembangunan gender (IPG)	98.49	98,77



VISI							
TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH							
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	
						KONDISI AWAL	2019
				terhadap perempuan dan anak	2. Rasio KDRT	0.008	0.0072
				6 Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Persentase peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan 2. Persentase organisasi kepemudaan (OKP) yang aktif	25% 34	45% 38
				7 Pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Persentase penduduk miskin 2. Persentase penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5,82% 10%	5,18% 11%
MISI 3 Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	1 Meningkatnya harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat	Angka Kriminalitas	14,90	1 Meningkatnya keamanan, ketertiban, ketentraman umum (kantrantibum)	1. Angka kriminalitas 2. Persentase penurunan pelanggaran perda	17,97 14.29%	15,80 14.29%
				2 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah 2. Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) 3. Penerapan e-government yang terintegrasi 4. Tingkat prestasi kinerja LPPD (Skor)	WTP CC n/a 3,0978	WTP BB 14 3,2978
	2 Mengoptimalan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan PAD	19,96	1 Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan PAD	12,42	18



VISI							
TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH							
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	
						KONDISI AWAL	2019
MISI 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah	Peningkatan kontribusi lapangan usaha konstruksi terhadap PDRB (%)	11,78%	1 Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik 2. Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas	49,51% 55%	62,81% 62,50%
				2 Meningkatkan kualitas infrastruktur jembatan	Persentase ketersediaan jembatan dalam kondisi baik	25,93%	59,07%
				3 Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi	Persentase irigasi dalam kondisi baik	41,42%	71,04%
				4 Meningkatkan kualitas infrastruktur air bersih	Persentase pelayanan air bersih	76,48%	100%
				5 Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	Persentase penurunan jumlah kawasan kumuh	100%	86,68%
	2 Meningkatkan pengelolaan tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup	1. Persentase peningkatan kesesuaian pola pemanfaatan ruang 2. Peningkatan Indeks kualitas Lingkungan hidup (KLS)	70%	1 Meningkatnya kesesuaian pola pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pola pemanfaatan ruang	52%	64%
				2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH (Indeks kualitas lingkungan hidup)	70%	72,68%



VISI							
TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH							
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	
						KONDISI AWAL	2019
	3 Meningkatkan pengelolaan penanggulang-an bencana			1 Meningkatnya kesiap-siagaan dan penanganan penanggulangan bencana	1. Persentase dampak bencana yang ditangani dengan baik 2. Persentase Nagari siaga bencana	100 % 3,13	100% 9,38
MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah	1 Meningkatnya pembangunan ekonomi	- PDRB - Indek Gini		1 Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan	1. PDRB Per Kapita (dalam juta Rp.)	28,64	37,34
					2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,31	5,91
					3. Persentase Pengangguran Terbuka	4,46%	3,40
	2 Menjadikan Tanah Datar sebagai tujuan wisata utama daerah Sumatera Barat, tujuan wisata nasional dan internasional	Peringkat daya saing wisata provinsi dan nasional		1 Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan (orang) 2. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (Rp)	984.929 2.640.761.000	1 075 000 6.750.000.000



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 merupakan tahun keempat perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021.

Dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019. Selanjutnya RKPD ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar khususnya Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019.

Dengan disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 ini diharapkan pelaksanaan proses pembangunan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 akan lebih terarah, menyeluruh, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang telah ditetapkan yaitu **“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah serta kualitas SDM dalam tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”**

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa peran RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 sangat penting dan strategis, sehingga perlu disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemerintah dan segenap *stakeholder* pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang dimuat dalam RKPD Tahun 2019

- dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan;
2. Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja dengan mengacu RKPD Tahun 2019 sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan;
 3. Dalam upaya menjamin penyelenggaraan RKPD dengan efisien dan efektif serta terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas penjabaran RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah dan KUA Tahun 2019, Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan analisis dan pemantauan proses dimaksud.

BUPATI TANAH DATAR

dto

IRDINANSYAH TARMIZI